

Bidang Ilmu : Ekonomi

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN HIBAH BERSAING**



**JUDUL PENELITIAN :**  
**MODEL BAURAN TERINTEGRASI (*INTEGRATED MIX MODEL*)  
DALAM MENINGKATKAN PERAN DAN FUNGSI KOPERASI  
RUKUN TETANGGA (RT) DI KABUPATEN WONOGIRI  
(Sebuah Upaya Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Rakyat)**

**Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun**

**Oleh:**  
**Hendar (NIDN : 0601026301)**  
**Moh. Ali Shahab (NIDN : 0018095001)**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG  
DESEMBER 2013**

# HALAMAN PENGESAHAN

Judul : MODEL BAURAN TERINTEGRASI  
(INTEGRATED MIX MODEL) DALAM  
MENINGKATKAN PERAN DAN FUNGSI  
KOPERASI RUKUN TETANGGA (RT) DI  
KABUPATEN WONOGIRI (Sebuah Upaya  
Mendorong Peningkatan Kesejahteraan

Peneliti/ Pelaksana

Nama Lengkap : HENDAR, SE, M.Si

NIDN : 0601026301

Jabatan Fungsional : LEKTOR KEPALA

Program Studi : MANAJEMEN

No HP : 081325731840

Alamat surel (E-mail) : [Hendar010263@yahoo.com](mailto:Hendar010263@yahoo.com)

Anggota (1)

Nama Lengkap : Dr. H. Moh. Ali Shahab, S.E, M.Si

NIDN : 0018095001

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Penanggung Jawab : Hendar, SE, M.Si

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun

Biaya Tahun Berjalan : Rp 40.000.000,00

Biaya Keseluruhan : Rp 88.633.000,00

Semarang, 6 Desember 2013

Ketua,

(Hendar, SE, M.Si)

NIK 210499041



Mengetahui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Dr. Ir. Suryani Alifah, MT

NIK. 210601024

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena cukup berkembangnya koperasi RT di Kab. Wonogiri yang dikembangkan dengan pola *top down*, padahal pola ini sudah dianggap gagal saat pengembangan KUD. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menentukan keberhasilan pemberdayaan (kinerja pemberdayaan). Beberapa faktor strategis yang sudah dilaksanakan seperti pemberdayaan kelembagaan koperasi, peningkatan akses terhadap sumber dana, pemberdayaan sumber daya, pemberdayaan bidang produksi, pengembangan jaringan pemasaran, dan pemberdayaan teknologi dan informasi diteliti secara intensif untuk mengetahui faktor mana saja yang dominan mempengaruhi kinerja pemberdayaan.

Penelitian dilakukan terhadap 156 anggota koperasi RT sampel yang diambil dengan metoda *purposive sampling*. Data yang diperoleh diuji terlebih dahulu dengan uji validitas dan reliabilitas untuk kemudian dianalisis secara deskriptif dan analisis diskriminan. Analisis deskriptif difokuskan pada kajian mengenai nilai indeks indikator dan variabel penelitian, sedangkan analisis diskriminan diarahkan untuk mengetahui variabel mana yang benar-benar menentukan kinerja pemberdayaan.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai indeks untuk variabel pemberdayaan kelembagaan koperasi, akses terhadap sumber-sumber pendanaan, pemberdayaan sumber daya, pemberdayaan bidang produksi, yang relatif tinggi (lebih dari 7) menunjukkan bahwa pemberdayaan tersebut telah dilaksanakan di Kab. Wonogiri dan mendapat respon positif dari masyarakat. Nilai indeks untuk variabel pengembangan jaringan pemasaran dan pemberdayaan teknologi dan informasi yang besarnya antara 4 - 6,99 atau tergolong sedang menunjukkan bahwa meskipun program pemberdayaan tersebut telah dilaksanakan, tapi belum sepenuhnya masyarakat di Kab. Wonogiri mengetahui, merasakan atau menikmati pemberdayaan tersebut. Meskipun demikian, secara umum pemberdayaan yang dilakukan sudah dianggap efektif. Nilai indeks untuk variabel kinerja pemberdayaan yang tinggi (lebih dari 7) menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam berkoperasi. Kemudian, berdasarkan hasil analisis diskriminan diketahui bahwa kinerja pemberdayaan sangat tergantung pada sikap anggota koperasi RT dalam merespon pemberdayaan kelembagaan, pemberdayaan teknologi dan informasi, dan pengembangan jaringan pemasaran, sementara variabel-variabel yang lain seperti pemberdayaan bidang produksi, peningkatan akses terhadap sumber pendanaan dan pemberdayaan sumber daya koperasi bukanlah variabel yang mempengaruhi kinerja pemberdayaan.

*Kata Kunci* : Kinerja pemberdayaan, kelembagaan, akses sumber dana, sumber daya, bidang produksi, jaringan pemasaran, teknologi informasi.

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul "MODEL BAURAN TERINTEGRASI (*INTEGRATED MIX MODEL*) DALAM MENINGKATKAN PERAN DAN FUNGSI KOPERASI RUKUN TETANGGA (RT) DI KABUPATEN WONOGIRI (Sebuah Upaya Mendorong Peningkatan Kesejahteraan Rakyat)". Penelitian yang dibiayai oleh Dana Hibah Bersaing Direktorat Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2013 pada dasarnya dilakukan untuk mencari dan menemukan faktor apa saja yang benar-benar mempengaruhi kinerja pemberdayaan koperasi RT. Hasil penelitian yang diperoleh akan dijadikan dasar pertimbangan Pemerintah Daerah dalam menentukan prioritas pemberdayaan koperasi RT yang lebih efektif, khususnya di Kab. Wonogiri.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan penelitian ini banyak mendapat dorongan serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Para Pejabat Direktorat Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional yang terlibat dalam penyelenggaraan Penelitian Hibah Bersaing yang telah membiayai penelitian ini dari awal hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Laode M Kamaluddin, MSc, MEng selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kesempatan yang luas dalam melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Ibu Dr. Ir. Suryani Alifah, MT sebagai ketua Lembaga Penelitian Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk ikut aktif dalam penelitian Hibah Bersaing ini.

4. Ibu Dr. Hj. Indri Kartika, SE, M.Si, Akt selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan arahan, dorongan, dan semangat dalam melaksanakan tugas-tugas di Fakultas Ekonomi, termasuk dalam bidang penelitian.
5. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu proses penelitian dari awal hingga akhir.

Kami yakin bahwa penelitian ini masih banyak kekurangannya dan jauh dari sempurna, oleh karena itu kami terbuka untuk segala kritik dan saran membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhir kata, semoga penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan praktek perkoperasian di Indonesia.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Semarang, Desember 2013

Ketua Peneliti,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hendar', is written over a faint, light-colored background that looks like a stamp or watermark.

Hendar, SE, M.Si

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Maksud Penelitian .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Sasaran penelitian .....	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	8
2.1 Peran koperasi dalam perekonomian .....	8
2.2 Pemberdayaan Koperasi .....	11
2.3 Kinerja Koperasi .....	19
2.4 Kerangka Berpikir .....	23
BAB III : METODA PENELITIAN .....	26
3.1 Populasi dan Sampel .....	26
3.2 Jenis Data .....	27
3.4 Sumber Data .....	27
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran variabel .....	28
3.5 Teknik Analisis Data .....	30
3.5.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Indikator .....	30
3.5.2 Analisis Deskriptif .....	31
3.5.3 Analisis Diskriminant .....	32
BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN ...	33
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	33

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Indikator .....	36
4.2.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Pemberdayaan Kelembagaan .....	36
4.2.2 Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen Peningkatan Akses koperasi terhadap Sumber-Sumber Pendanaan. ....	38
4.2.3 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Pemberdayaan Sumber Daya Koperasi .....	39
4.2.4 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Pemberdayaan Bidang Produksi .....	40
4.2.5 Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen Pengembangan Jaringan Pemasaran .....	41
4.2.6 Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen Pemberdayaan Teknologi dan Informasi .....	42
4.2.7 Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen Kinerja Pemberdayaan .....	43
4.3 Deskripsi Pemberdayaan Koperasi RT di Kabupaten Wonogiri .....	45
4.3.1 Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi .....	46
4.2.2 Peningkatan Akses Koperasi Terhadap Sumber Penda- naan .....	50
4.3.3 Pemberdayaan Sumber Daya Koperasi .....	54
4.3.4 Pemberdayaan Bidang Produksi .....	57
4.3.5 Pengembangan Jaringan Pemasaran .....	60
4.3.6 Pemberdayaan Teknologi Informasi .....	64
4.3.7 Kinerja Pemberdayaan .....	68
4.4 Analisis Diskriminan Faktor-Faktor Penentu Kinerja Pember- dayaan Koperasi RT .....	70
4.4.1 Pengelompokan Anggota Koperasi RT berdasarkan Kinerja Pemberdayaan .....	71
4.4.2 Uji Beda Rata-rata Kelompok Anggota Dengan Pemberdayaan Efektif dan Kurang Efektif .....	76
4.4.3 Variabel yang masuk dalam persamaan .....	77

4.4.4 Dominansi Faktor - Faktor Penentu Kinerja Pemberdayaan .....	79
4.4.5 Validitas Model Diskriminan .....	81
BAB V : SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN .....	90
5.1 Simpulan .....	90
5.2 Implikasi Kebijakan .....	92
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	92
5.4 Agenda Penelitian Mendatang .....	93
BAB VI : LUARAN PENELITIAN .....	94
6.1 Pertimbangan .....	94
6.2 Model Praktek Pemberdayaan Koperasi RT dan Rancangan Usulan Kebijakan (Raperda) Kab. Wonogiri Perihal Pemberdayaan Koperasi RT. ....	95

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 3.2 : Kriteria Nilai Indeks .....	32
Tabel 4.8 : Hasil uji validitas instrumen variabel pemberdayaan ke- lembagaan .....	37
Tabel 4.9 : Hasil uji validitas instrumen variabel peningkatan akses koperasi terhadap sumber-sumber pendanaan .....	38
Tabel 4.10 : Hasil uji validitas instrumen variabel pemberdayaan sumber daya koperasi .....	39
Tabel 4.13 : Hasil uji validitas instrumen variabel pemberdayaan teknologi dan Informasi .....	42
Tabel 4.14 : Hasil uji validitas instrumen variabel kinerja pemberda- yaan .....	44
Tabel 4.16 : Nilai Indeks instrumen dan variabel pemberdayaan kelembagaan koperasi .....	47
Tabel 4.16 : Nilai Indeks instrumen dan variabel peningkatan akses Koperasi terhadap sumber-sumber pendanaan .....	51
Tabel 4.17 : Nilai Indeks instrumen dan variabel pemberdayaan sumber daya koperasi .....	55
Tabel 4.18 : Nilai Indeks instrumen dan variabel pemberdayaan bidang produksi .....	57
Tabel 4.19 : Nilai Indeks instrumen dan variabel pengembangan Jaringan pemasaran .....	61
Tabel 4.20 : Nilai Indeks instrumen dan variabel pemberdayaa teknologi dan informasi .....	65
Tabel 4.21 : Nilai Indeks instrumen dan variabel kinerja pemberda- yaan .....	69
Tabel 4.22 : Hasil perhitungan perbedaan rata-rata antar group pem- berdayaan kurang efektif dan pemberdayaan efektif ....	75
Tabel 4.23 : Hasil uji beda antar group masing-masing variable .....	76

Tabel 4.24 : Hasil perhitungan untuk mendapatkan variabel yang digunakan dalam persamaan diskriminan .....	77
Tabel 4.25 : Hasil perhitungan Eigenvalue dan Canonical Correlation	78
Tabel 4.26 : Hasil perhitungan Wilks' Lambda .....	77
Tabel 4.27 : Hasil perhitungan Struktur Matrik .....	79
Tabel 4.28 : Urutan dominansi variable penentu kinerja pemberdayaan Koperasi RT . .....	81
Tabel 4.29 : Hasil perhitungan Classification Results analisis diskriminan .....	83

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berdasar semangat UUD 1945 Pasal 33, pemberdayaan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional merupakan sebuah keniscayaan. Koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat, meskipun dalam perkembangan ekonomi yang demikian cepat, koperasi masih belum tumbuh dengan cepat seperti yang diharapkan Undang-Undang Dasar 1945.

Bagi Indonesia, keberadaan koperasi memiliki peran yang sangat strategis bagi pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi secara mandiri. Produksi ekonomi yang dikerjakan untuk semua di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Koperasi Indonesia lebih mengutamakan kemakmuran masyarakat sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, bukan keuntungan orang seorang. Bersandar dari karakteristik di atas, pembangunan koperasi Indonesia semestinya dibangun dari kesadaran untuk melakukan usaha bersama dalam koperasi dari masing-masing anggota, yakni melalui dinamisasi dan partisipasi aktif anggota dalam pemberdayaan ekonomi secara mandiri.

Partisipasi merupakan roh pemberdayaan masyarakat (Wignyo Adiyoso, 2009). Partisipasi anggota koperasi memberikan manfaat terhadap pemilihan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Melalui partisipasi, kualitas rasa kepemilikan dan pemeliharaan infrastruktur yang dibangun dapat terjaga. Partisipasi dalam pemberdayaan koperasi merupakan pengakuan terhadap eksistensi individu dan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan atas pembangunan koperasi (Plummer, 2000). Salah satu program pemberdayaan yang dengan jelas mengadopsi partisipasi masyarakat adalah pembentukan koperasi Rukun Tetangga (RT).

Pada tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Wonogiri melakukan gerakan koperasi melalui pendekatan kewilayahan setingkat Rukun Tetangga (RT) yang berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro dalam lingkup rukun tetangga (RT). Gerakan ini bermaksud mendorong masyarakat khususnya di daerah pedesaan yang memiliki kesamaan kepentingan dan kebutuhan yang sama akan mudah terdorong membentuk usaha swadaya masyarakat. Program ini kemudian dinamakan “Program Mengangkat Ekonomi Kerakyatan Melalui Koperasi Rukun Tetangga (RT) dalam Rangka Ketahanan Desa di Kabupaten Wonogiri”. Pengelolaan koperasi RT dengan manajemen baik diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan koperasi RT juga bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Koperasi RT tersebut bisa menjadi pemangku kebijakan ekonomi tingkat desa dan diharapkan juga berperan aktif dalam pembangunan.

Gerakan pendirian Koperasi RT merupakan upaya pemberdayaan masyarakat melalui memanfaatkan potensi kegiatan ekonomi yang ada pada komunitas di tingkat Rukun Tetangga (RT). Meskipun demikian, dalam implementasi kebijakan dan penyeragaman struktur kelembagaan Koperasi RT di seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri, menunjukkan bahwa program masih berdasarkan pada pendekatan *“top down”* yang menyimpang dari semangat koperasi yang bersifat *“bottom up”*.

Program pengembangan koperasi melalui pola KUD dianggap sebagai program yang gagal karena cita-cita kemandirian koperasi tidak dapat diwujudkan. Dari ribuan KUD yang dibentuk saat awal pemerintahan orde baru, hanya sedikit yang masih bisa bertahan sampai sekarang. KUD yang dianggap telah mempunyai status mandiri sekarang ini banyak yang hanya besar unit usahanya (kadang-kadang SHU-nya juga besar), tapi cita-cita koperasi dalam mengangkat kesejahteraan anggota nampaknya masih jauh dari harapan. Menurut Hendar (2010), ketidakmampuan KUD dalam mencapai cita-citanya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Proses pendirian KUD menyimpang dari hakekat koperasi yang sebenarnya. Koperasi harusnya ditumbuhkan dari bawah (rakyat), bukan didirikan dari atas (pemerintah) seperti KUD. Akibat penyimpangan ini anggota tidak merasa memiliki koperasi dan akibatnya mereka lemah dalam partisipasi. Koperasi yang anggotanya memiliki tingkat partisipasi yang lemah tidak akan mampu berkembang dan mencapai tujuannya.
2. Partisipasi anggota yang rendah yang ditunjang oleh pengetahuan anggota tentang perkoperasian yang kurang, dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dalam jajaran manajemen KUD untuk berperilaku oportunistik terhadap bantuan-bantuan program pemerintah, sehingga kasus-kasus seperti korupsi, pemanfaatan koperasi untuk mengembangkan usaha pribadi oknum tersebut, dan pemanfaatan KUD (sebagai lembaga berbadan hukum yang sah) hanya untuk memperoleh bantuan modal dan mendapatkan proyek tertentu bagi kepentingan pribadi atau sekelompok orang tertentu.
3. Pengetahuan yang rendah tentang perkoperasian dari pihak pengurus dan pengelola, sehingga KUD dikelola sebagai organisasi bisnis yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis lain yang profit oriented. Akibatnya kadang koperasi ini hanya besar dari sisi perusahaannya, tetapi kecil dari peran yang seharusnya diemban, yaitu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi yang demikian dianggap sebagai koperasi yang tidak efisien, karena tidak mampu mencapai tujuannya.

Meskipun pola pengembangan koperasi (KUD) melalui pola “top down” telah dianggap gagal, namun beberapa Pemerintah Daerah masih percaya bahwa pola ini tidak selamanya pola ini akan menghasilkan kegagalan. Beberapa pemerintah daerah masih percaya bahwa pola “top down” dalam pengembangan koperasi rukun tetangga (RT) dapat menghasilkan koperasi mandiri yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, struktur kelembagaan koperasi RT yang dibangun oleh Pemerintah Daerah pada masyarakat melalui kelembagaan sosial Rukun Tetangga (RT), tidak secara otomatis dapat diikuti dengan perubahan nilai-

nilai yang ada di masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang dikehendaki dalam kehidupan berkoperasi. Hal ini tidak lepas dari adanya kaitan antara kelembagaan Koperasi RT dengan struktur dan nilai-nilai yang ada dalam kelembagaan Rukun Tetangga (RT), yaitu kelembagaan sosial yang memiliki peran menjalankan fungsi pemerintahan.

Sampai saat ini memperdayakan koperasi masih diperlukan mengingat banyak koperasi yang belum mandiri. Pemberdayaan ini menuntut sedikit perhatian yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah perlu melakukan intervensi pada beberapa kemudahan dan fasilitasi permodalan usaha, sistem pembinaan manajemen usaha, pelatihan dan peningkatan skill, ketersediaan bahan baku dan penunjang lain guna kelangsungan produktivitas usaha. Juga mengenai jaringan distribusi dan pemasaran hasil usaha, mengingat di era persaingan terbuka saat ini penentuan harga tidak sepenuhnya bisa diserahkan kepada pasar, terlebih lagi jika barang tersebut menjadi kebutuhan hajat hidup orang banyak.

Sejak dimulainya pola pembangunan ekonomi di Indonesia berbagai strategi dan kebijakan telah diterapkan dalam rangka menunjang perkembangan perkoperasian. Program pembangunan pemerintah yang tepat seperti pembangunan daerah pedesaan dan pertanian atau program untuk kepentingan kelompok-kelompok sasaran tertentu memang dapat dilaksanakan oleh koperasi secara otonom dan atas dasar sukarela (Hanel, 1983). Koperasi-koperasi dilibatkan dalam pelaksanaan berbagai proyek dan program untuk penyaluran kredit-kredit pertanian (KUT), pengadaan sarana produksi, pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, dan lain-lain, dengan tujuan mengentaskan kemiskinan. Program ini ternyata tidak sepenuhnya berhasil dengan baik. Pada sekitar tahun 70-an pelaksanaan pembangunan ekonomi melalui gerakan koperasi mendapat kritik terutama karena gerakan koperasi kenyataannya tidak mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mengubah struktur kekuasaan sosial politik bagi golongan masyarakat miskin (Hanel, 1983).

Meskipun dalam tiga dekade terakhir, Indonesia telah berhasil mengurangi kemiskinan, namun jumlah penduduk miskin masih tetap tinggi (Wignyo Adiyoso, 2009). Pada tahun 1997 masalah kemiskinan semakin parah sebagai dampak terkenanya krisis ekonomi. Antara tahun 1996 sampai 1999 proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat dari 18% menjadi 24% (Bappenas dan UNDP, 2001). Tahun 2006, Bank Dunia melaporkan bahwa setengah jumlah penduduk Indonesia bisa dikategorikan sebagai penduduk miskin (Hadar, 2006). Pada tahun 2009, 14 % jumlah penduduk Indonesia berada dibawah garis kemiskinan. Data tersebut menunjukkan penduduk miskin hanya berkurang 2,43 jiwa dibanding tahun 2008 yang mencapai 15% dari total penduduk Indonesia (BPS, 2009).

Menurut Disperindagkop UMKM dan Pendal (2011), *booming* koperasi sebenarnya terjadi tahun 2008, karena pada saat itu ada program bantuan kredit usaha tani (KUT). Setelah KUT berlalu, keberadaan koperasi banyak yang tidak terurus. Saat ini jumlah koperasi di Kab. Wonogiri sebanyak 7.695 buah dan terdiri dari 6.712 koperasi rukun tetangga (RT) dan sisanya 783 Koperasi Umum (KPN, KUD dan Koperasi Simpan Pinjam). Dari jumlah sebanyak itu sekitar 16,67% masih dinyatakan tidak sehat. Khusus untuk koperasi umum, sekitar 53,5 % dari jumlah koperasi umum di Kab. Wonogiri tidak aktif. Ketidakaktifan bisa diukur dari ketiadaan menggelar rapat anggota tahunan, bahkan banyak diantaranya tidak berpapan nama.

## **1.2 Maksud Penelitian**

Maksud penelitian ini adalah menggambarkan serta mengeksplorasi faktor-faktor penentu keberhasilan / kegagalan pelaksanaan strategi peningkatan peran dan fungsi koperasi rukun tetangga (RT) di Kab. Wonogiri dilihat dari faktor eksternal maupun internal dalam kaitannya dengan kinerja koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan serta mencari tahu bagaimana strategi peningkatan peran dan fungsi koperasi rukun tetangga (RT) di Kab. Wonogiri baik yang dilakukan dari pihak eksternal (Pemerintah Daerah maupun instansi terkait) dan pihak internal koperasi itu sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mengkaitkan dimensi strategi itu dengan kinerja koperasi rukun tetangga (RT). Secara khusus tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan / kegagalan strategi peningkatan peran dan fungsi koperasi rukun tetangga (RT) dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
2. Mengkaitkan dimensi strategi peningkatan fungsi dan peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan kinerja koperasi rukun tetangga (RT).
3. Menggambarkan model strategi peningkatan peran dan fungsi koperasi rukun tetangga (RT) yang tepat dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi :

1. Pemerintah Daerah dan Instansi terkait sebagai dasar percepatan pelaksanaan strategi peningkatan fungsi dan peran koperasi rukun tetangga dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
2. Pengurus koperasi beserta anggota, dan masyarakat pada umumnya sebagai dasar penyelenggaraan atau pengelolaan koperasi rukun tetangga (RT) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya.

## **1.5 Sasaran penelitian**

Pengelolaan koperasi rukun tetangga (RT) dengan manajemen baik akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan koperasi RT juga bisa untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Oleh karenanya, pihak-pihak terkait seperti Pemerintah Daerah, Instansi terkait, perguruan tinggi, dan perbankan, berkewajiban memberi pembinaan dan kredit agar koperasi tersebut bisa berkembang. Peran mereka saat ini sangat dibutuhkan mengingat masih adanya berbagai permasalahan internal koperasi seperti masalah keterbatasan modal usaha beserta manajemen pengelolaannya, keterbatasan kemampuan dalam memasarkan produk hasil usaha anggota, keterbatasan kemampuan SDM (anggota dan karyawan koperasi) dalam mengelola koperasi, keterbatasan dalam penguasaan IT, dan lain-lain. Oleh karena itu sasaran penelitian ini adalah tersedianya model praktek penerapan strategi peningkatan peran dan fungsi koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tersedianya *Manual Book* strategi peningkatan peran dan fungsi koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Peran koperasi dalam perekonomian**

Pada perekonomian Indonesia, koperasi memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan (UU No 17 Tahun 2012). Di samping itu, koperasi memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam hal : (a) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya, (b) mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, (c) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya, dan (d) mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi (UU No 25 Tahun 1992).

Peran pemerintah menjadi dominan dalam pemberdayaan koperasi saat ini. Pasal 112 UU No 17 Tahun 2012 dinyatakan bahwa, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, (1) menetapkan kebijakan yang mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, (2) menempuh langkah untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan dan pemberdayaan Koperasi bagi kepentingan anggota, (3) memberikan bimbingan dan kemudahan dalam bentuk, (a) pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian koperasi, (b) bimbingan usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota, (c) memperkuat permodalan dan pembiayaan koperasi, (d) bantuan pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antara koperasi dan badan usaha lain, (e) bantuan konsultasi dan fasilitas guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi

dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi, dan (f) memberikan insentif dalam upaya menciptakan dan pajak dan fiskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koperasi merupakan organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis (Ropke, 1989). Dengan demikian koperasi memiliki jatidiri dari, oleh dan untuk anggota serta dalam menjalankan kegiatannya berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi.

Menurut Hanel (1988) dan Muenkner (1989) koperasi sebagai organisasi ekonomi memiliki empat karakteristik, (a) adanya sekelompok orang yang menjalin hubungan antara sesamanya atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan yang sama, (b) adanya dorongan (motivasi) untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok guna memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha bersama atas dasar swadaya dan saling tolong menolong, (c) adanya perusahaan yang didirikan dan dikelola secara bersama-sama, dan (d) tugas perusahaan tersebut adalah untuk memberikan pelayanan kepada anggotanya dengan cara menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang dibutuhkan anggota.

Keempat karakteristik tersebut menunjukkan bahwa untuk dapat berkembang dengan baik, koperasi harus beranggotakan orang-orang yang memiliki usaha dan sedapat mungkin usaha tersebut relatif homogen yakni adanya kesamaan dalam kebutuhan atau kepentingan. Koperasi yang anggotanya relatif homogen akan memudahkan pihak manajemen dalam mengelola perusahaan koperasi karena konflik kepentingan relatif dapat dihindari. Sebaliknya koperasi yang anggotanya relatif heterogen, akan mudah terjadi konflik kepentingan antar anggota, sehingga berdampak pada kesulitan pihak manajemen dalam mengelola perusahaan koperasi.

Perusahaan Koperasi adalah perusahaan yang didirikan oleh kelompok orang-orang yang mempunyai kebutuhan atau kepentingan sama. Tugas dari perusahaan itu adalah melayani kepentingan anggotanya, yaitu

dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang dibutuhkan anggota. Pelayanan yang dimaksud adalah upaya membantu memperbesar usaha anggotanya. Konsep ini memberi sinyal bahwa ukuran koperasi yang sukses harus dilihat dari sejauh mana anggotanya mengalami peningkatan dalam usahanya berkat kerjasama dengan koperasi. Koperasi yang hanya kelihatan besar dalam perusahaannya, tetapi anggotanya tidak mengalami peningkatan dalam usahanya, bisa dikatakan koperasi tersebut adalah gagal (Hendar, 2010).

Selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan usahanya, koperasi di Indonesia harus tunduk pada tata nilai tertentu yang tersirat pada Undang-undang RI No. 12 Tahun 1992 dan UU No 17 Tahun 2012. Pada UU No 17 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Koperasi memiliki nilai dan prinsip yang harus ditaati. Nilai yang mendasari kegiatan koperasi adalah kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan dan kemandirian; sedangkan nilai yang diyakini anggota koperasi adalah kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab dan kepedulian terhadap orang lain. Guna mewujudkan nilai tersebut, Koperasi melaksanakan prinsip, (1) keanggotaan koperasi bersifat terbuka dan sukarela, (2) pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis, (3) anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi, (4) koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independent, (5) koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi, (6) koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat local, nasional, regional, dan internasional, dan (7) koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

Dalam kondisi ekonomi yang penuh dengan persaingan mau tidak mau peran dan kedudukan koperasi dalam masyarakat akan sangat ditentukan

oleh perannya dalam kegiatan usaha (bisnis). Oleh karena itu, strategi pengembangan koperasi dapat dilakukan antara lain : (1) mengembangkan kegiatan usaha koperasi dengan mempertahankan falsafah dan prinsip koperasi, (2) kembangkan keterkaitan koperasi dengan kegiatan pelayanan usaha umum, (3) mengatasi beberapa permasalahan teknis usaha bagi koperasi kecil untuk berkembang, (4) mengakomodasi keinginan pengusaha kecil untuk melakukan usaha atau mengatasi masalah usaha dengan membentuk koperasi, (5) pengembangan kerjasama usaha antar koperasi, (6) hormati kekhususan koperasi dalam peraturan perundangan supaya potensi koperasi dapat diwujudkan semaksimal mungkin, (7) Pemerintah memberikan aturan main yang jelas tetapi koperasi dapat dan harus mengatur dirinya sendiri, dan (8) pemberian bantuan pengembangan bagi pertumbuhan koperasi dengan tetap menganggap koperasi sebagai mitra, menjunjung tinggi hakekat koperasi dan diselenggarakan dalam kerangka jaringan.

## **2.2 Pemberdayaan Koperasi**

Pemberdayaan merupakan bagian dari pengembangan masyarakat (Wigny Adiyoso, 2009). Pengembangan masyarakat adalah proses, tugas dan visi untuk memberdayakan masyarakat agar bersama-sama bertanggung jawab untuk mengembangkan dirinya (Kenny, 1999). Pengembangan masyarakat muncul karena meningkatnya tuntutan masyarakat karena adanya masalah-masalah yang terkait dengan ekologi, ekonomi, politik, sosial dan budaya akibat globalisasi (Taylor, 2003). Sedangkan menurut Suharto (2005) pengembangan masyarakat muncul atas respon terhadap kebijakan yang kental dengan ekonomi neo-liberal, yakni kebijakan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan sering mengabaikan dimensi sosial dan budaya masyarakat.

Pemberdayaan merupakan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah (Pranarka, 1996; Lubis, dkk., 2005). Sementara itu Friedmann (1992), menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan upaya mendapatkan kekuatan (*power*) dan mengkaitkannya

dengan kemampuan golongan miskin untuk mendapatkan akses ke basis kekuasaan sosial. Menurut Ife (1995), pemberdayaan bertujuan meningkatkan kekuasaan kepada orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Dengan demikian pemberdayaan merupakan upaya untuk memberikan power (daya / kuasa) kepada kelompok yang tidak berdaya / berkuasa sehingga mereka menjadi berdaya (Wignyo Adiyoso, 2009).

Pemberdayaan sebagai proses untuk meningkatkan kapasitas individu dalam menentukan pilihan dan mewujudkan pilihan tersebut dalam tindakan nyata (Gibson & Woolcock, 2005). Dengan demikian, pemberdayaan berkaitan dengan peningkatan sumberdaya dan kemampuan masyarakat miskin untuk berpartisipasi, memutuskan, mengontrol dan terlibat setiap proses yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (Wignyo Adiyoso, 2009).

Pemberdayaan menekankan bahwa setiap orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai *resources* yang dimiliki dan dikuasai. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui, (a) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan, (b) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif, (c) pengoptimalan fungsi dan peran pemerintahan lokal, (d) peningkatan kualitas dan kuantitas, sarana dan prasarana dasar masyarakat, dan (e) pengembangan kemitraan dalam pembangunan (Tim Koordinasi Nasional PPK, 2002).

Pemberdayaan dapat dipandang sebagai sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, seperti para petani miskin yang mengalami keterbatasan kemampuan dalam mengakses sumber-sumber kekuasaan sosial, dan tidak cukup berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan yang mempengaruhi

kehidupannya. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu kelompok petani miskin yang berdaya; mampu mengakses sumberdaya untuk mencari nafkah dan memiliki cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai kejadian-kejadian yang mempengaruhi kehidupannya. Uraian tersebut pada hakekatnya menunjukkan bahwa, keberhasilan pemberdayaan paling tidak dapat diukur dari empat indikator, yaitu : (a) perubahan dalam kemampuan masyarakat dalam merencanakan dan mengelola program pembangunan, (b) meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan, (c) peningkatan kepedulian dan peran pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dan (d) hasil serta dampak ekonomi nyata sebagai hasil kegiatan ekonomi produktif masyarakat (Wignyo Adiyoso, 2009).

Strategi Pemberdayaan Koperasi, yang diharapkan berdampak pada peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional, pada intinya akan mencakup beberapa isu penting, yaitu (a) revitalisasi Peran Koperasi dan Perkuatan posisi koperasi dalam sistem perekonomian nasional, (b) revitalisasi koperasi dilakukan dengan memperbaiki akses koperasi terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar serta memperbaiki iklim usaha, (c) mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan, dan (d) mengembangkan potensi sumberdaya lokal. Dalam rangka memberdayakan KUMKM, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan beberapa kegiatan antara lain:

1. Program penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UKM. Kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini adalah :
  - a. Fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi usaha dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap untuk memperlancar proses dan biaya perijinan.
  - b. Penyempurnaan peraturan perundangan beserta ketentuan pelaksanaannya dalam rangka membangun legalitas usaha yang kuat, melanjutkan penyederhaan birokrasi, perijinan, dan lokasi, serta

peninjauan terhadap pemberlakuan berbagai pungutan biaya usaha, baik sektoral maupun spesifikasi daerah.

- c. Memperbarui/memulihkan hak-hak legal, antara lain dengan memperbarui/memulihkan surat-surat ijin usaha melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana, mudah, cepat, dan tanpa pungutan, bahkan apabila memungkinkan cukup dengan melapor atau mendaftar saja.
2. Program pengembangan sistem pendukung usaha KUKM. Kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini adalah :
- a. Perluasan sumber pembiayaan, khususnya kredit investasi dan penyediaan pembiayaan ekspor melalui lembaga modal ventura dan lembaga bukan bank lainnya, terutama yang mendukung UKM.
  - b. Penggunaan jaringan pasar domestik untuk produk-produk UKM dan anggota koperasi melalui pengembangan lembaga pemasaran jaringan/kemitraan usaha, dan sistem transaksi usaha yang bersifat on-line, terutama untuk komoditas unggulan berdaya saing tinggi.
  - c. Penguatan infrastruktur pembiayaan bagi petani dan nelayan di pedesaan dan pengembangan badan pembiayaan alternatif, seperti: sistem bagi hasil dana bergulir, sistem tanggung renteng atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai ganti agunan, dan penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas.
  - d. Fasilitasi pengembangan badan penjaminan kredit melalui kerja sama bank dan lembaga asuransi, dan fasilitasi bantuan teknis kepada BPR dan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) untuk meningkatkan penyaluran kredit bagi sektor pertanian.
  - e. Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi disertai dukungan penyediaan infrastruktur pedesaan.
  - f. Bantuan untuk KSP/USP yang masih dapat melakukan kegiatan.

- g. Memfasilitasi UKM agar dapat berdagang di pasar darurat yang disediakan Departemen Perdagangan.
3. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUKM. Kegiatan yang dilakukan melalui program ini adalah:
- a. Bantuan teknis dan pendampingan teknologi kepada pemerintah daerah, masyarakat dan UKM di wilayah perbatasan.
  - b. Penyediaan sistem insentif dan pembinaan untuk memacu pengembangan wirausaha baru UKM berbasis teknologi, berorientasi ekspor, pengembangan inkubator teknologi dan bisnis, serta pemberian dukungan pengembangan kemitraan investasi antar UKM.
  - c. Pemasyarakatan kewirausahaan, penyediaan sistem insentif dan pembinaan untuk memacu pengembangan wirausaha baru UKM berbasis teknologi, berorientasi ekspor, sub kontrak, dan agribisnis/agroindustri.
  - d. Pendataan ulang/revitalisasi kelembagaan KUKM.
  - e. Bantuan pembuatan alat/sarana usaha berupa kapal penangkap ikan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap bersama Departemen Kelautan dan Perikanan.
4. Pemberdayaan usaha skala mikro. Kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini adalah:
- a. Peningkatan kesempatan dalam berusaha dengan penyediaan kemudahan dan pembiayaan teknis manajemen dalam memulai usaha, perlindungan usaha, tempat usaha wirausaha baru, dan penyediaan badan pembiayaan alternatif untuk usaha.
  - b. Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan perkoperasian serta fasilitasi pembentukan wadah koperasi di daerah kantong-kantong kemiskinan.

- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan LKM dan KSP di sektor pertanian dan pedesaan antara lain melalui pembentukan sistem jaringan antar LKM dan antar LKM dan bank.
  - d. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pendekatan kluster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas koperasi sebagai wadah organisasi untuk meningkatkan skala ekonomi usaha dan efisiensi kolektif.
  - e. Memfasilitasi sarana usaha bagi usaha skala mikro, yang berlokasi di sekitar tenda-tenda penampungan, dan pasar darurat yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Departemen Perdagangan.
  - f. Peningkatan kredit skala mikro dan kecil serta peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan KSP/USP.
  - g. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan kewirausahaan pengusaha mikro dan kecil.
5. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini adalah:
- a. Fasilitasi penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat di pedesaan berdasarkan identifikasi best practices dan lessons learned program-program pemberdayaan masyarakat.
  - b. Peningkatan pelayanan lembaga perkoperasian dan UKM pada zona aman bencana terhadap kelompok kegiatan ekonomi terdekat yang terkena bencana. Program-program tersebut diupayakan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi sektor riil sehingga dapat membuka lapangan kerja yang luas, meningkatkan nilai tambah produk, meningkatkan daya beli masyarakat, dan meningkatkan pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah, yang pada gilirannya diharapkan akan mampu menurunkan kemiskinan.

Mengacu pada beberapa program yang dijelaskan di atas, strategi bauran (*mix strategy*) dalam meningkatkan kualitas koperasi pada dasarnya tidak bisa lepas dari 6 strategi yang menjadi kunci penentu keberhasilan peningkatan kualitas Koperasi yakni meliputi:

1. Pemberdayaan kelembagaan, di antaranya dalam bentuk strategi dan kebijakan :
  - a. penyederhanaan Perizinan dan pengembangan system perizinan satu pintu, serta bagi usaha mikro perizinan cukup dalam bentuk registrasi usaha,
  - b. penataan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung pemberdayaan koperasi,
  - c. penataan dan penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembangan koperasi,
  - d. pengembangan koperasi berkualitas,
  - e. revitalisasi koperasi.
2. Peningkatan Akses koperasi terhadap Sumber-Sumber Pendanaan, diantaranya
  - a. Pengembangan berbagai Skim Perkreditan untuk Koperasi, bisa berupa : program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro; program pembiayaan Ibu Rumah Tangga mandiri dalam rangka pemberdayaan perempuan, keluarga sehat dan sejahtera; program skim pendanaan komoditas koperasi melalui Resi Gudang; kredit bagi usaha mikro dan kecil yang bersumber dari dana Surat Utang Pemerintah Nomor 005 (SUP-005),
  - b. Pengembangan Lembaga Kredit Mikro (LKM) baik bank maupun non bank,
  - c. pemberdayaan mikro dan usaha kecil melalui program Sertifikasi Tanah,

- d. Bantuan perkuatan secara selektif pada sektor usaha tertentu sebagai stimulan
3. Pemberdayaan Sumber Daya Koperasi, seperti :
- a. penumbuhan Wirausaha baru,
  - b. peningkatan kemampuan teknis dan manajerial Koperasi,
  - c. pengembangan kualitas layanan Koperasi,
  - d. pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi kelompok usaha produktif,
  - e. pengembangan prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan; Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Koperasi : (a) Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Potensi Kendala dan Permasalahan Koperasi dan UKM, (b) diskusi permasalahan dan isu-isu strategis dalam proses pemberdayaan koperasi, (c) sosialisasi hasil-hasil kajian, penelitian, pengembangan dan diskusi pemberdayaan Koperasi dan UKM, melalui penerbitan buku, jurnal dan majalah Ilmiah, dan (d) pengkaderan dan Pengawasan kinerja aparat dan Sumberdaya Koperasi.
4. Pemberdayaan di bidang produksi melalui bantuan sektor usaha selektif sebagai stimulant, diantaranya bisa berupa :
- a. Program pengembangan pengadaan pangan koperasi dengan sistem bank padi
  - b. Program pengembangan usaha koperasi melalui pengadaan bibit Kakao, Jambu Mente dan Jarak
  - c. Program pengembangan usaha budidaya perikanan dan peternakan
  - d. Program pengembangan usaha sarana penunjang perikanan dan peternakan
  - e. Program pengembangan usaha budidaya tanaman pekarangan
5. Pengembangan Jaringan Pemasaran, seperti :

- a. promosi proyek koperasi,
  - b. modernisasi usaha ritel koperasi,
  - c. pengembangan sarana pemasaran koperasi,
  - d. pengembangan *Trading Board* dan *Data Cente*,
  - e. pameran di dalam dan di Luar negeri.
6. Pemberdayaan Teknologi dan Informasi, seperti :
- a. penyediaan perangkat keras,
  - b. penyediaan perangkat lunak,
  - c. penyediaan sistem jaringan,
  - d. optimalisasi fungsi dan sasaran penggunaan teknologi dan jaringan.

Di beberapa negara, pengembangan koperasi juga membutuhkan intervensi dari luar. Di Cina, koperasi-koperasi mengkombinasikan beberapa sumber daya, termasuk kontribusi anggota, modal institusional, dukungan keuangan publik, dukungan pemasaran, dan dukungan swasta pemilik sumber daya sumber daya, yakni para relawan dan pendonor dana. Pengamatan empiris memberikan bukti bahwa terdapat proses transformasi pengelolaan koperasi pedesaan di Cina dari tradisi saling tolong menolong dalam lingkup internal ke model baru dengan orientasi masyarakat yang lebih luar dengan karakter yang beragam. Selain itu, ditemukan bahwa lingkungan kelembagaan memfasilitasi atau menghambat pembentukan beberapa sumberdaya koperasi (Zhao Li, Gijssels C, 2011).

### **2.3 Kinerja Koperasi**

International Cooperative Alliance (ICA) mendefinisikan koperasi sebagai kumpulan orang-orang atau badan hukum, yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan ekonomi anggota dengan jalan berusaha bersama-sama saling membantu antara satu dengan lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus

didasarkan prinsip-prinsip koperasi (*ICA New, No. 5/6, 1996*). Definisi ini secara tegas dijelaskan bahwa tujuan didirikannya koperasi adalah untuk membantu memperbaiki kehidupan sosial ekonomi anggotanya dengan cara bekerja bersama-sama dan saling tolong menolong. Batasan keuntungan yang dimaksud dalam definisi ini adalah perusahaan koperasi tidak boleh mengambil keuntungan yang besar dari bisnisnya dengan anggota, sebab tugas koperasi membantu meningkatkan pendapatan anggotanya. Penetapan harga jual yang relatif murah dianjurkan untuk menopang pertumbuhan bisnis anggotanya.

Pada definisi tersebut juga tersirat bahwa koperasi yang berhasil adalah koperasi yang mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Peningkatan kesejahteraan anggota dapat dilakukan dengan memberi pelayanan terbaik kepada anggotanya, seperti harga jual yang relatif lebih menguntungkan dibanding dengan harga yang ada di pasar, pemberian bunga yang relatif lebih murah dibanding dengan bunga rentenir atau lembaga-lembaga lain yang ada di tingkat pedesaan, penyediaan sarana produksi yang memadai bagi anggota dan kecepatan petugas koperasi dalam melayani kepentingan masing-masing anggota.

Manfaat ekonomi dari koperasi pertanian mendapat perhatian dari banyak literatur, terutama dalam hal efisiensi sumber daya yang mengalir dari aksi kolektif yang mungkin hadir dari para anggota sebagai pemilik (sebagai investor perusahaan miliknya). Hasil penelitian (Yusof Ismail and Suhaimi Mhd Sarif, 2010) memberikan bukti bahwa sumber daya yang efisiensi merupakan keuntungan lingkungan, yang mungkin tidak tersedia pada perusahaan korporasi karena tujuan yang berbeda. Secara khusus, hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi dapat mencapai efisiensi melalui skala ekonomi, pengetahuan dan transfer keterampilan, berbagi risiko dan cara lain. Fenomena ini memberi harapan (ekspektasi) masa depan akan peningkatan keuntungan pasar dan adanya kebijakan bantuan pembangunan berkelanjutan.

Menurut Ropke (1989), koperasi adalah suatu organisasi bisnis yang para pemilik / anggotanya adalah juga pelanggan utama perusahaan tersebut. Kriteria identitas suatu koperasi akan merupakan dalil / prinsip identitas yang membedakan unit usaha koperasi dari unit usaha yang lainnya. Tugas dari perusahaan koperasi adalah melayani kepentingan anggotanya, yaitu dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang dibutuhkan anggota. Pelayanan yang dimaksud adalah upaya membantu memperbesar usaha anggotanya. Konsep ini memberi sinyal bahwa ukuran koperasi yang sukses harus dilihat dari sejauh mana anggotanya mengalami peningkatan dalam usahanya berkat kerjasama dengan koperasi. Koperasi yang hanya kelihatan besar dalam perusahaannya, tetapi anggotanya tidak mengalami peningkatan dalam usahanya, bisa dikatakan koperasi tersebut adalah gagal.

Guna meningkatkan pelayanan kepada anggota perusahaan koperasi dapat berorientasi ke pasar eksternal, seperti melayani kepentingan umum dan melaksanakan aktivitas ekspor impor. Di pasar eksternal ini koperasi dapat berperilaku bisnis seperti halnya perusahaan-perusahaan non koperasi melakukannya. Pendapatan yang besar yang diperoleh di pasar eksternal dapat digunakan untuk mengembangkan perusahaan koperasi dan membantu unit usaha anggotanya. Dengan demikian kinerja koperasi juga dapat dilihat dari keberhasilannya membangun jaringan usaha dengan pihak-pihak eksternal. Pembentukan jaringan ini sangat penting untuk memasarkan hasil produksi anggota koperasi atau produksi unit-unit usaha koperasi.

Dalam pasar yang bersaing, koperasi dapat bersaing dengan organisasi lain dalam hal anggota, modal pelanggan, dan lain-lain. Bila koperasi ingin menarik anggota, koperasi harus menawarkan kelebihan khusus yang tidak dapat diberikan khusus oleh perusahaan lain yang menjadi pesaingnya. Dengan kata lain kelebihan khusus itu tidak akan dijumpai pada organisasi lain dan hanya dapat direalisasikan oleh individu hanya jika mereka menjadi anggota koperasi. Koperasi harus dapat menghasilkan paling sedikit kelebihan yang sama dengan perusahaan pesaingnya, dan anggota koperasi harus mampu mempertahankan keunggulan itu dengan cara

berpartisipasi aktif pada koperasinya dan mengendalikan manajemen koperasi supaya mampu dan bersedia mempromosikan kepentingan para anggota. Dengan demikian, kinerja koperasi juga bisa dilihat dari sejauhmana koperasi ini memberikan manfaat kepada anggotanya dan sejauhmana anggota mau dan mampu berpartisipasi aktif dalam koperasi.

Manfaat koperasi terdiri dari manfaat ekonomi dan manfaat non ekonomi. Manfaat ekonomi terdiri dari manfaat langsung yang diperoleh saat transaksi dengan koperasi dan manfaat tidak langsung yang berupa bagian SHU diperoleh anggota pada akhir periode. Manfaat langsung dapat berupa harga pelayanan, yakni selisih harga atau bunga di koperasi dengan harga atau bunga yang ada di pasar.

Partisipasi anggota memegang peranan penting dalam perkembangan koperasi. Partisipasi tersebut terdiri dari partisipasi kontributif keuangan, partisipasi kontributif dalam pengambilan keputusan dan partisipasi insentif. Partisipasi kontributif keuangan berkaitan dengan keikutsertaan anggota dalam membiayai koperasinya. Partisipasi kontributif dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan sumbang saran, pendapat, ide-ide, informasi, maupun kritik terhadap manajemen koperasi dalam pengambilan keputusan (Hendar, 2010). Partisipasi insentif berkaitan dengan pemanfaatan pelayanan-pelayanan koperasi. Dengan demikian, bila anggota aktif dalam kontribusi keuangan, sering memberi saran, ide-ide dan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan aktif memanfaatkan pelayanan-pelayanan koperasi, maka akan semakin maju koperasi tersebut. Jadi partisipasi merupakan salah satu alat ukur kinerja koperasi.

Selain beberapa alat ukur kinerja koperasi di atas, terdapat salah satu alat ukur kinerja koperasi, yakni pendidikan anggota. Indikator ini menjadi penting, sehingga pendidikan yang berkesinambungan dijadikan salah satu unsur prinsip koperasi yang tertuang dalam UU No. 25 Tahun 1992. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin sering koperasi mengadakan pendidikan dan pelatihan semakin tinggi pula kinerja perusahaan koperasi.

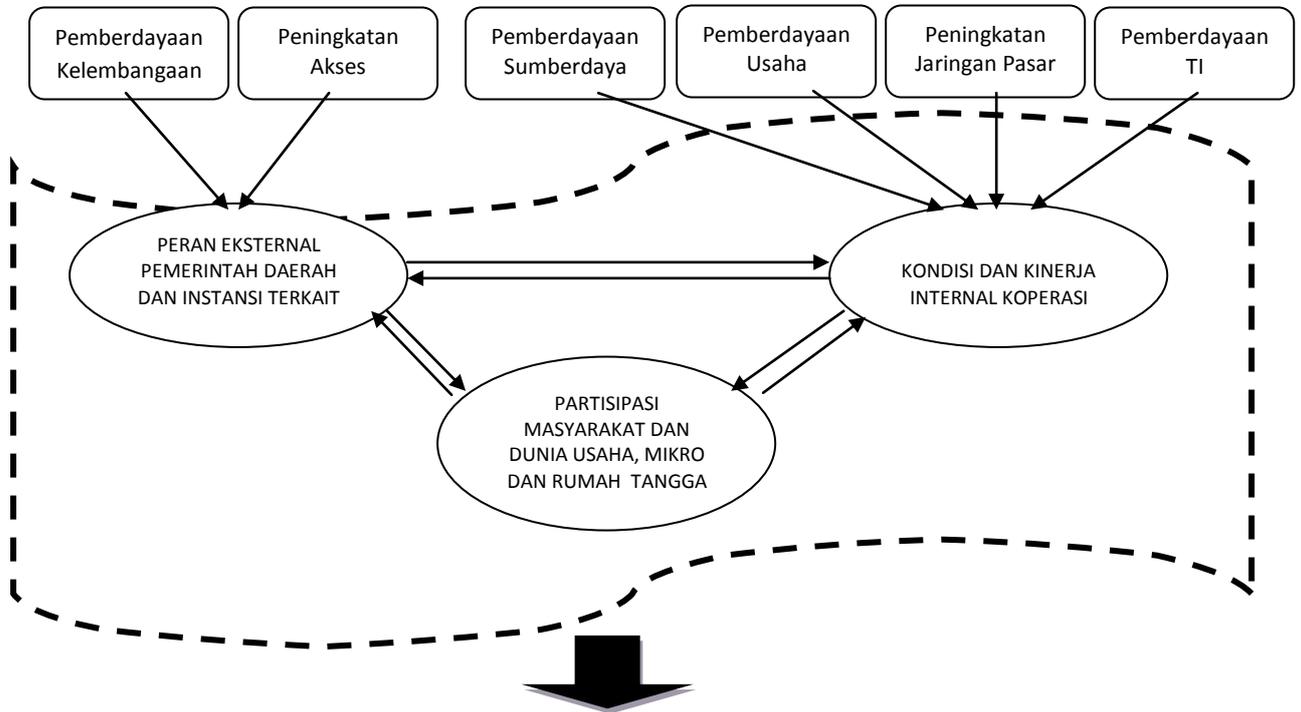
## 2.4 Kerangka Berpikir

Strategi pengembangan “Model Bauran Terintegrasi” (*Integrated Mix Model*) dalam upaya mendorong perkembangan koperasi skala rumah tangga di Kabupaten Wonogiri baik secara kuantitas maupun kualitas ditujukan untuk memberi kontribusi bagi perekonomian daerah di Wonogiri. Strategi tersebut dijalankan dengan membuat model kebijakan pengembangan koperasi yang menggabungkan secara terintegrasi “strategi eksternal” yang berasal dari perangkat kebijakan Pemerintah Daerah dan Instansi yang terkait, dan “strategi internal” koperasi yang dilakukan oleh koperasi secara mandiri. Strategi eksternal diperlukan untuk memberi dampak pada kualitas koperasi rumah tangga, sedangkan “strategi internal” koperasi diperlukan untuk mendorong kuantitas operasional dan kelangsungan usaha, sekaligus kemampuan untuk melibatkan secara aktif peran partisipasi masyarakat baik sebagai anggota maupun sebagai mitra kerja koperasi.

Jika merujuk pada 6 (enam) strategi bauran pembedayaan koperasi di atas, maka dari keenam poin tersebut yang diklasifikasikan kedalam dua strategi, eksternal dan internal, maka poin 1 berupa pengembangan dan penguatan aspek kelembagaan koperasi adalah kebijakan dan wilayah kerja “Pemerintah daerah dan instansi terkait”, begitupun poin 2 berupa peningkatan akses sumber pembiayaan eksternal, menjadi ranah kebijakan “pemerintah daerah dan instansi terkait”. Sedangkan point 3, 4,5, dan 6 adalah wilayah kerja dan operasional koperasi yang bisa dikembangkan dan ditingkatkan secara internal oleh koperasi itu sendiri, namun keberhasilan dari strategi internal sangat dipengaruhi juga bimbingan dan bantuan pihak eksternal, pemerintah daerah dan instansi terkait, serta tidak kalah pentingnya adalah partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha, terutama yang skala rumah tangga (mikro) dan kecil secara terintegrasi.

Berdasarkan kajian di atas, model kerangka konseptual dalam pemberdayaan koperasi rukun tetangga (RT) digambarkan sebagai berikut :

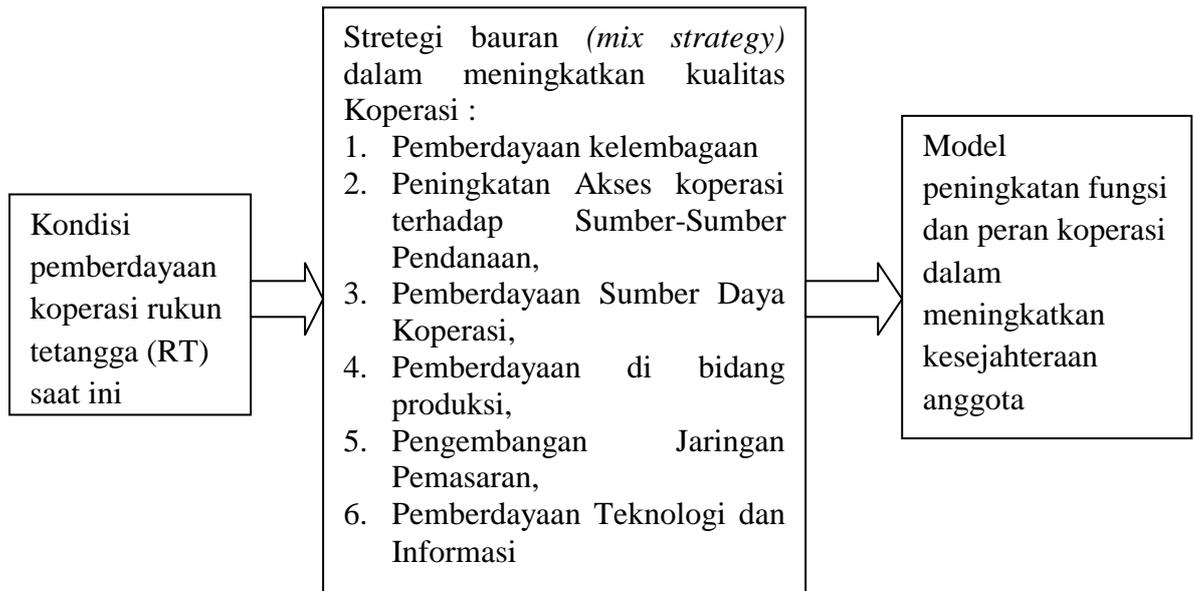
**Integrated Mix Model**  
PEMBERDAYAAN KOPERASI DI WONOGIRI



**OUPUT PENELITIAN KOPERASI RUKUN TANGGA DI WONOGIRI :**

1. JURNAL HASIL PENELITIAN PEMBERDAYAAN KOPERASI RT
2. RANCANGAN USULAN KEBIJAKAN (RAPERDA) KAB. WONOGIRI
3. BUKU PANDUAN PENGELOLAAN KOPERASI BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI KABUPATEN WONOGIRI
4. BUKU AJAR MANAJEMEN KOPERASI RUKUN TETANGGA

Kemudian dalam rangka mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan strategi peningkatan peran dan fungsi koperasi rukun tetangga (RT) dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, disusun kepangka penelitian empirik sebagai berikut :



## **BAB III**

### **METODA PENELITIAN**

#### **3.1 Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan kumpulan individu dengan kualitas serta ciri ciri yang telah ditetapkan. Populasi juga merupakan keseluruhan individu untuk siapa kenyataan yang diperoleh akan digeneralisasikan. Sedangkan sampel adalah sebagian populasi yang karakteristiknya hendak diteliti dan dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota koperasi rukun tetangga (RT) di Kab. Wonogiri. Anggota koperasi RT dipilih sebagai obyek penelitian karena anggota koperasilah yang menjadi sasaran akhir pemberdayaan. Anggota koperasilah yang pada akhirnya dapat menilai efektif tidaknya proses pemberdayaan.

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dua tahap. Metode *purposive sampling* diterapkan karena pada penelitian ini diperlukan interaksi intensif dengan subyek penelitian, sehingga subyek penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan (*judgment*) peneliti mengenai lokasi subyek dan kesediaan subyek untuk terlibat dalam penelitian ini. Tahap pertama pengambilan sampel adalah pengambilan sampel kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Wonogiri sesuai tujuan dan kepentingan penelitian. Dari 25 kecamatan yang ada di Kab. Wonogiri, dipilih 5 (lima) kecamatan yang di wilayahnya banyak terdapat koperasi rukun tetangga (RT), yakni Kec. Kecamatan Baturetno, Kecamatan Batuwarno, Kecamatan Eromoko, Kecamatan Girimarto, dan Kecamatan Jatipurno. Dari masing-masing kecamatan diambil dua desa sebagai area sampling, dan dari masing-masing desa diambil minimal 15 orang anggota koperasi rukun tetangga sebagai sampel, sehingga jumlah keseluruhan sampel minimal adalah 150 orang. Pemilihan sampel minimal sebanyak 150 orang didasarkan pada asumsi bahwa anggota koperasi RT memiliki karakteristik yang homogen terkait dengan pengetahuan mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui

koperasi RT. Pertimbangan dalam pemilihan anggota sampel adalah kesediaan mereka untuk terlibat dalam riset ini.

### 3.2 Jenis Data

Masyarakat Kab. Wonogiri telah mendapatkan pemberdayaan koperasi RT dalam hal kelembagaan, akses terhadap sumber dana, pemasaran, sumber daya, bidang produksi dan teknologi informasi dari berbagai pihak, seperti Pemerintah daerah beserta jajaran instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti BUMN dan BUMS. Sejauhmana dampak partisipasi anggota koperasi dalam proses pemberdayaan tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan mereka sendiri merupakan sasaran utama dalam penelitian ini.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berkaitan dengan persepsi responden (anggota koperasi RT) terhadap strategi bauran (*mix strategy*) dalam meningkatkan fungsi dan peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya atau masyarakat pada umumnya, yang meliputi, (a) pemberdayaan kelembagaan, (b) peningkatan akses koperasi terhadap sumber-sumber pendanaan, (c) pemberdayaan sumber daya koperasi, (d) pemberdayaan di bidang produksi, (e) pengembangan jaringan pemasaran, dan (f) pemberdayaan teknologi dan informasi. Di samping itu, data sekunder yang diperoleh dari berbagai pihak terkait seperti dari Dinas Koperasi dan UMKM, Biro Pusat Statistik, dan pihak-pihak lain dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan penelitian ini.

### 3.4 Sumber Data

Pada penelitian ini obyek yang akan diteliti adalah pihak manajemen dan anggota koperasi, pemerintah daerah dan instansi terkait di Kab. Wonogiri. Beberapa alasan pemilihan obyek penelitian ini adalah **pertama**, perlunya mengidentifikasi faktor-faktor strategis penentu keberhasilan peningkatan peran dan fungsi koperasi rukun tetangga (RT) dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, **kedua**, koperasi rukun tetangga (RT) yang dikembangkan di Kab. Wonogiri cukup berkembang, sehingga

dapat menjadi contoh bagi pengembangan koperasi di tempat lain, **ketiga**, disinyalir masih kurangnya perhatian pihak pemerintah dan perbankan terhadap pemberdayaan peran dan fungsi koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya di daerah. Pengumpulan data akan dilakukan dengan *in depth interview* dan pengiriman kuesioner secara pribadi sehingga ketidakjelasan terhadap isi kuesioner dapat segera ditanggapi. Untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian, pada beberapa hal diperlukan wawancara mendalam dengan anggota koperasi yang dapat dilakukan dengan kunjungan langsung atau melalui telpon.

### **3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran variabel**

Definisi operasional dan pengukuran variabel diperlukan untuk menjadi acuan dan arah penelitian. Dalam penelitian ini, beberapa variabel beserta definisi operasionalnya dijelaskan sebagai berikut :

#### **1. Strategi bauran dalam meningkatkan fungsi dan peran koperasi (Pemberdayaan koperasi RT)**

Strategi bauran dalam meningkatkan fungsi dan peran koperasi (Pemberdayaan koperasi RT) dapat dilakukan melalui, (a) pemberdayaan kelembagaan, (b) peningkatan akses koperasi terhadap sumber-sumber pendanaan, (c) pemberdayaan sumber daya koperasi, (d) pemberdayaan di bidang produksi, (e) pengembangan jaringan pemasaran, dan (f) pemberdayaan teknologi dan informasi. Tabel 3.1 menunjukkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel pemberdayaan. Empat indikator variabel pemberdayaan kelembagaan dijabarkan kedalam 10 item pertanyaan. Tiga indikator variabel peningkatan akses koperasi terhadap sumber-sumber pendanaan dijabarkan kedalam 6 item pertanyaan. Lima indikator variabel pemberdayaan sumber daya koperasi dijabarkan kedalam 6 item pertanyaan. Lima indikator variabel pemberdayaan di bidang produksi dijabarkan kedalam 7 item pertanyaan. Lima indikator variabel pengembangan jaringan pemasaran dijabarkan kedalam 7 item

pertanyaan. Empat indikator variabel pemberdayaan teknologi dan informasi dijabarkan kedalam 7 item pertanyaan.

Tabel 3.1 : Variabel-variabel pemberdayaan dan indikator yang digunakan

Variabel-variabel Pemberdayaan	Indikator-indikator pemberdayaan koperasi RT
Pemberdayaan kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyederhanaan perizinan dan pengembangan system perizinan bagi pendirian usaha mikro anggota</li> <li>b. praktek penerapan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung pemberdayaan koperasi,</li> <li>c. praktek pengembangan kualitas koperasi</li> <li>d. revitalisasi koperasi.</li> </ul>
Peningkatan akses koperasi terhadap sumber-sumber pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan berbagai Skim Perkreditan untuk Koperasi</li> <li>b. Pengembangan Lembaga Kredit Mikro (LKM) baik bank maupun non bank</li> <li>c. Bantuan perkuatan secara selektif pada sektor usaha tertentu sebagai stimulan</li> </ul>
Pemberdayaan Sumber Daya Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penumbuhan Wirausaha baru</li> <li>b. peningkatan kemampuan teknis dan manajerial Koperasi</li> <li>c. pengembangan kualitas layanan Koperasi,</li> <li>d. pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi kelompok usaha produktif,</li> <li>e. pengembangan prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan</li> </ul>
Pemberdayaan di bidang produksi,	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan Program pengembangan pengadaan pangan koperasi</li> <li>b. Pelaksanaan Program pengembangan usaha koperasi melalui pengadaan bibit</li> <li>c. Pelaksanaan Program pengembangan usaha budidaya perikanan dan peternakan</li> <li>d. Pelaksanaan Program pengembangan usaha sarana penunjang perikanan dan peternakan</li> <li>e. Pelaksanaan Program pengembangan usaha budidaya tanaman pekarangan</li> </ul>
Pengembangan Jaringan Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Praktek promosi proyek koperasi</li> <li>b. modernisasi usaha ritel koperasi</li> <li>c. pengembangan sarana pemasaran koperasi</li> <li>d. pengembangan <i>Trading Board</i> dan <i>Data Cente</i></li> <li>e. pameran di dalam dan di Luar negeri.</li> </ul>
Pemberdayaan Teknologi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan perangkat keras,</li> <li>b. penyediaan perangkat lunak,</li> <li>c. penyediaan sistem jaringan,</li> <li>d. optimalisasi fungsi dan sasaran penggunaan teknologi dan jaringan.</li> </ul>

Sumber : Kajian beberapa literatur, 2011

## 2. Kinerja Pemberdayaan

Kinerja pemberdayaan menggambarkan tingkat keberhasilan pemberdayaan dalam bentuk perubahan kemampuan masyarakat dalam

merencanakan dan mengelola program pemberdayaan, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pemberdayaan, dan hasil serta dampak ekonomi nyata sebagai hasil kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Dengan demikian indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (a) perubahan kemampuan masyarakat dalam merencanakan dan mengelola program pemberdayaan, (b) peningkatan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pemberdayaan, dan (c) hasil serta dampak ekonomi nyata sebagai hasil kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Ketiga indikator tersebut dijabarkan menjadi 16 item pertanyaan.

### 3. Kinerja Koperasi

Kinerja koperasi berkaitan dengan prestasi koperasi yang diperoleh dari upaya meningkatkan kesejahteraan anggota. Kinerja ini diukur dengan : (a) pemberian pelayanan terbaik kepada anggotanya, (b) keberhasilan koperasi membangun jaringan usaha dengan pihak-pihak eksternal, (c) kemampuan koperasi dalam memberikan manfaat kepada anggotanya dan (d) aktivitas partisipasi anggota dan (e) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan anggota. Kelima indikator kinerja koperasi tersebut dijabarkan 7 item pertanyaan. Kinerja koperasi akan menjadi kajian khusus pada penelitian tahap berikutnya.

## 3.5 Teknik Analisis Data

### 3.5.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Indikator

Uji validitas digunakan untuk memastikan instrumen kuesioner yang diajukan untuk mengukur variabel adalah benar-benar valid atau dapat dipercaya. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila probabilitas (p) pengujian korelasi antara skor instrumen dengan total skor atau skor untuk variabel yang bersangkutan masih berada di bawah tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Bila nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05, instrumen

tersebut dinyatakan tidak valid atau tidak bisa digunakan untuk mengukur sebuah variabel, sehingga instrumen tersebut harus dikeluarkan.

*Uji reliabilitas* data dalam penelitian ini diperlukan untuk mengetahui konsistensi dari jawaban responden. Pengukuran mengenai konsistensi jawaban responden dilakukan dengan menghitung statistic *Cronbach's Alpha*. Sebuah instrument konstruk dinyatakan reliable bila statistic *Cronbach's Alpha* berada lebih besar dari 0,60 (Imam Ghozali, 2005)

### **3.5.2 Analisis Deskriptif**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 6 (enam) variable independent dan 1 (satu) variable dependent yakni kinerja pemberdayaan. Variabel independent terdiri dari pemberdayaan kelembagaan, peningkatan akses terhadap sumber pendanaan, pemberdayaan sumber daya, pemberdayaan bidang produksi, pengembangan jaringan pemasaran, dan pemberdayaan bidang teknologi dan informasi. Penjelasan deskriptif mengenai variabel-variabel tersebut diuraikan dengan menghitung nilai indeks masing-masing indikator terlebih dahulu. Nilai indeks dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Nilai Indeks} = \{(\%F1 \times 1) + (\%F2 \times 2) + (\%F3 \times 3) + (\%F4 \times 4) + (\%F5 \times 5) + (\%F6 \times 6) + (\%F7 \times 7) + (\%F8 \times 8) + (\%F9 \times 9) + (\%F10 \times 10)\} / 10$$

Dimana F adalah frekuensi jawaban responden yang dipresentasikan dari total responden.

Beberapa nilai indeks indikator tersebut dijumlah dan di rata-ratakan akan menghasilkan nilai indeks sebuah variabel. Nilai indeks yang sudah dihitung kemudian dikelompokkan kedalam 3 kriteria interpretasi (Agusty Ferdinand, 2006), yakni :

Tabel 3.2 : Kriteria Nilai Indeks

Nilai Indeks	Kriteria Dasar
1,00 – 4,00	Rendah
4,00 – 6,99	Sedang
7,00 – 10,00	Tinggi

Sumber : Data primer yang diolah, 2012

### 3.5.3 Analisis Diskriminant

Analisis diskriminan yaitu untuk menentukan mana prediktor yang paling dominan pada praktek penerapan strategi peningkatan fungsi dan peranan koperasi rukun tetangga (RT). Pada beberapa variable yang hampir sama dilakukan pengujian untuk melakukan pengelompokan kegiatan praktek penerapan strategi peningkatan fungsi dan peranan koperasi rukun tetangga (RT) menjadi satu variable yang mengarah ke kegiatan praktek penerapan fungsi dan peranan koperasi rukun tetangga (RT). Pada tahap kedua, pengujian model yang diusulkan dilakukan dengan menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan *two step approach*. Dalam *two-step approach to SEM*, model pengukuran (*measurement model*) terlebih dahulu dirumuskan dan dievaluasi secara terpisah dan kemudian ditetapkan langkah kedua ketika model struktural diestimasi (Imam Ghozali, 2004).

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Tingkat pendidikan berpengaruh berpengaruh besar terhadap kemampuan berpikir, berkreasi dan bereaksi terhadap lingkungan dalam menjalankan kegiatan usaha anggota koperasi RT. Tabel 4.1 menunjukkan tingkat partisipasi sekolah anggota koperasi RT di Kab. Wonogiri yang dijadikan sampel penelitian. Pada penelitian ini tercatat anggota koperasi yang berpendidikan sekolah dasar sebesar 29,5 persen, pendidikan SLTP sebesar 32,7 persen, pendidikan SLTA sebanyak 30,8 persen, diploma sebesar 2,6 persen dan sarjana sebesar 4,5 persen. Dengan sedikitnya mereka yang berpendidikan tinggi setara diploma dan universitas dan masih mendominasinya anggota yang berpendidikan sekolah dasar dan SLTP, dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat pendidikan anggota koperasi RT di Kab. Wonogiri masih rendah. Rendahnya tingkat pendidikan ini merupakan salah satu penghambat dalam percepatan pembangunan ekonomi di pedesaan. Dengan demikian, tingkat pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Keadaan seperti ini sesuai dengan hakekat pendidikan itu sendiri, yakni merupakan usaha sadar untuk pengembangan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan anggota koperasi RT di Kab. Wonogiri diantaranya, (a) rendahnya pendapatan per kapita penduduk, menyebabkan orang tua tidak mampu membiayai anaknya sekolah ke tingkat yang lebih tinggi, (b) masih kurangnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan, sehingga anak tidak disekolahkan ke tingkat yang lebih tinggi tetapi justru diarahkan untuk bekerja membantu memenuhi ekonomi keluarga.

Tingkat pendidikan yang rendah memungkinkan masyarakat di Kab. Wonogiri hidup dengan matapencaharian sebagai petani dan pemilik usaha

kecil. Sekitar 29,8 persen anggota koperasi bermatapencaharian sebagai petani pemilik lahan, 26,3 persen lainnya sebagai buruh tani, dan 18,6 persen adalah para pemilik usaha kecil. Sisanya sekitar 26 persen lainnya bekerja sebagai pedagang, jasa, pegawai swasta, dan PNS.

Tingkat pendidikan yang rendah dan hidup lebih banyak mengandalkan peran sector pertanian, menyebabkan banyak anggota koperasi RT memiliki tingkat pendapatan yang rendah. Tingkat pendapatan masih menjadi indikator utama tingkat kesejahteraan masyarakat, disamping berbagai indikator sosial ekonomi lainnya. Pendapatan (terutama pendapatan perkapita) dapat memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat. Dari data yang terkumpul, sekitar 53,9 persen anggota koperasi RT memiliki pendapatan tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 perbulan. Mereka yang berpendapatan antara Rp 1.000.000,00 sampai Rp 2.000.000,00 terdapat sekitar 31,4 persen, dan sisanya sekitar 7,7 persen berpendapatan lebih dari Rp 2.000.000,00 perbulan. Data tersebut memberikan gambaran bahwa secara anggota koperasi RT masih berpendapatan rendah. Tingkat pendapatan mereka paling banyak setara dengan Upam Minimum Regional Kab. Wonogiri Rp Rp 730.000,00. Oleh karena itu, anggota koperasi RT masih berada dalam katagori rumah tangga yang belum sejahtera. Dengan laju inflasi yang meningkat terus menerus di Kab. Wonogiri, masih sangat sulit bagi anggota koperasi RT untuk memenuhi kebutuhan hidup layak keluarga. Sebagian besar pendapatan hanya diperuntukkan bagi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak memiliki kesempatan yang banyak untuk menabung. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sebagian besar (sekitar 55,1 persen) anggota koperasi memiliki pengeluaran yang kurang dari Rp 1.000.000,00. Hanya sekitar 37,1 persen yang berpengeluaran antara Rp 1.000.000,00 sampai Rp 2.000.000,00 dan sangat jarang (sekitar 7,7 persen) yang memiliki pengeluaran lebih dari Rp 2.000.000,00 perbulan.

Rendahnya tingkat tabungan menyebabkan pembiayaan kegiatan usaha anggota berasal dari pinjaman. Pembiayaan dalam hubungan dengan

kegiatan usaha anggota koperasi RT pada umumnya sebagian besar menggunakan pinjaman dari koperasi. Hasil penelitian menunjukkan 75,6 persen unit usaha anggota memperoleh pinjaman dari koperasi RT. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi RT memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan anggota. Kecilnya persentase anggota koperasi yang mendapatkan pinjaman dari pihak lain, juga menunjukkan peran yang signifikan koperasi dalam mengatasi praktek renten yang ada di pedesaan. Koperasi RT dimanfaatkan anggotanya sebagai tempat meminjam dana (56,4 persen), menabung / menyimpan (32,1 persen) dan kegiatan lainnya (11,5 persen), dan hampir tidak ada anggota koperasi yang memanfaatkan koperasi RT sebagai sarana jual beli barang. Hal ini bisa dimaklumi karena meskipun sebagian besar koperasi RT adalah koperasi serba usaha, tapi produk yang ditawarkan lebih fokus pada usaha simpan pinjam. Bila melihat besarnya anggota yang memanfaatkan koperasi sebagai tempat meminjam dana dan menabung bisa jadi hanya kedua produk layanan itulah yang bermanfaat bagi anggota.

Minimnya peran serta anggota koperasi RT dalam pemanfaatan koperasi sebagai sarana jual beli barang bisa jadi disebabkan, (a) koperasi tidak melayani pembelian barang dari anggota dan hanya fokus pada kegiatan simpan pinjam, (b) tingkat kepercayaan anggota terhadap manajemen koperasi yang masih rendah, sehingga anggota lebih memilih pasar umum sebagai sarana menjual barang-barang hasil produksinya, (c) manajemen koperasi tidak mampu mengelola pemasaran hasil produksi anggota koperasi dalam kegiatan jual beli, sehingga kepuasan anggota atas kerjasama dalam jual beli barang menjadi berkurang, (d) manajemen koperasi tidak mampu menyediakan barang-barang yang dibutuhkan anggotanya, dan (e) koperasi kalah bersaing dari para pesaingnya dalam memberikan layanan kepada anggotanya.

Sumber dana yang berasal dari tabungan sendiri dan pinjaman dari bank, juga mendukung unit usaha anggota, tapi perannya relatif lebih kecil dibanding koperasi RT. Anggota yang memanfaatkan tabungan sendiri dan

pinjaman bank hanya sekitar 23,8 persen dari keseluruhan responden yang diteliti. Hal ini memperlihatkan masih kecilnya peran dunia perbankan dalam pengembangan usaha anggota koperasi RT di Kab. Wonogiri. Keadaan seperti ini bisa ditafsirkan banyak unit usaha anggota koperasi yang kurang layak untuk diberi pinjaman dari bank. Faktor jaminan yang terbatas, profitabilitas yang rendah, dan risiko ketidakpastian yang tinggi bila perbankan focus pada pengembangan usaha anggota koperasi RT menjadi factor pembatas bank mengakses usaha mikro dan usaha kecil di Kab. Wonogiri.

## **4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Indikator**

*Uji validitas* diperlukan untuk memastikan instrumen kuesioner yang diajukan benar-benar dapat dipercaya (valid) dalam mengukur variabel. Instrumen dikatakan valid apabila probabilitas (p) pengujian korelasi antara skor instrumen dengan total skor atau skor untuk variabel yang bersangkutan masih berada di bawah tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Sedangkan, *Uji reliabilitas* data diperlukan untuk mengetahui konsistensi dari jawaban responden. Pengukuran konsistensi jawaban responden dilakukan dengan menghitung statistic *Cronbach's Alpha*. Sebuah instrument konstruk dinyatakan reliable bila statistic *Cronbach's Alpha* berada lebih besar dari 0,60 (Imam Ghozali, 2005)

### **4.2.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Pemberdayaan**

#### **Kelembagaan**

Dari ke 6 instrumen tersebut dijabarkan kedalam 10 item pertanyaan, dengan harapan ke 10 pertanyaan tersebut benar-benar memberikan gambaran yang sebenarnya dari variabel pemberdayaan kelembagaan koperasi RT.

Berdasarkan printout pengolahan data SPSS mengenai uji validitas dan reliabilitas diperoleh informasi seperti yang tertera pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 : Hasil uji validitas instrumen variabel pemberdayaan kelembagaan

No	Item Pertanyaan	Koef. Korelasi	P Value (Sig)	Ket
1	Pemerintah Daerah menganjurkan pendirian koperasi RT di lingkungan RT kami	0,800	0,000	Valid
2	Pemerintah Daerah telah mensosialisasikan kepada kami (misal melalui kelurahan) tentang aturan-aturan penyelenggaraan koperasi RT	0,802	0,000	Valid
3	Pemerintah Daerah memberikan kemudahan perijinan dalam pendirian koperasi RT	0,843	0,000	Valid
4	Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pengurusan Badan Hukum Koperasi bagi koperasi RT yang sudah terbentuk	0,849	0,000	Valid
5	Saya dengan mudah menjadi anggota koperasi RT	0,840	0,000	Valid
6	Pemerintah Daerah telah menganjurkan untuk memanfaatkan koperasi RT sebagai sarana pengembangan usaha mikro yang saya miliki	0,796	0,000	Valid
7	Pemerintah Daerah ikut membantu pengembangan usaha koperasi RT kami	0,820	0,000	Valid
8	Pemerintah Daerah juga ikut serta membantu pengembangan usaha mikro yang saya miliki	0,696	0,000	Valid
9	Pemda memiliki motivasi yang tinggi untuk membangkitkan kembali peran koperasi dalam perek daerah melalui pembentukan koperasi RT	0,824	0,000	Valid
10	Pemerintah Daerah ikut membantu menjembatani hubungan usaha mikro saya dengan perusahaan-perusahaan besar	0,771	0,000	Valid

Sumber : Hasil pengolahan data, 2012.

Informasi yang tertera pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa semua instrument yang digunakan untuk mengukur variable pemberdayaan kelembagaan koperasi adalah valid, karena p value (nilai sig) masih berada di bawah 0,05. Dengan demikian semua instrumen yang digunakan benar-benar dapat digunakan untuk mengukur kualitas pemberdayaan kelembagaan atau menjelaskan gambaran pemberdayaan kelembagaan yang sesungguhnya terjadi. Kemudian, berdasarkan statistic Cronbach's Alpha sebesar 0,781 yang lebih besar dari 0,60 diketahui pula bahwa semua responden memberikan jawaban yang konsisten atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengenai pemberdayaan kelembagaan.

#### 4.2.2 Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen Peningkatan Akses koperasi terhadap Sumber-Sumber Pendanaan

Berdasarkan printout pengolahan data SPSS mengenai uji validitas dan reliabilitas diperoleh informasi seperti yang tertera pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 : Hasil uji validitas instrumen variabel peningkatan akses koperasi terhadap sumber-sumber pendanaan

No	Item Pertanyaan	Koef. Korelasi	P Value (Sig)	Ket
1	Sangat mudah bagi saya untuk mendapatkan pinjaman modal usaha dari koperasi RT	0,710	0,000	Valid
2	Pemerintah Daerah ikut aktif memberikan dana stimulan (misal dana hibah) kepada koperasi RT kami untuk membantu pengembangan usaha koperasi dan anggotanya	0,758	0,000	Valid
3	Pemda ikut aktif memfasilitasi hubungan koperasi RT dengan lembaga keuangan seperti bank dalam rangka mendapatkan kredit dengan persyaratan yang ringan	0,763	0,000	Valid
4	Pemerintah Daerah ikut aktif memfasilitasi pemanfaatan bantuan modal usaha bagi koperasi RT dari instansi-instansi tertentu seperti Kementrian Koperasi dan UMKM RI, BUMN, dll	0,752	0,000	Valid
5	Koperasi RT kami dengan mudah mendapatkan bantuan dana dari lembaga keuangan seperti bank	0,884	0,000	Valid
6	Koperasi RT kami dengan mudah mendapatkan bantuan kredit dari instansi-instansi pemerintah	0,890	0,000	Valid

Sumber : Hasil pengolahan data, 2012.

Informasi yang tertera pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa semua instrument yang digunakan untuk mengukur variable peningkatan akses koperasi terhadap sumber-sumber pendanaan adalah valid, karena *p value* (nilai sig) masih berada di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua instrumen yang dipakai benar-benar bias mengukur kualitas peningkatan akses koperasi terhadap sumber-sumber pendanaan koperasi.

Pada uji reliabilitas yang menghasilkan statistik *Cronbach's Alpha* sebesar 0,797. Angka tersebut lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua responden memberikan jawaban yang konsisten atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengenai peningkatan akses koperasi terhadap sumber-sumber pendanaan.

### 4.2.3 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Pemberdayaan Sumber Daya Koperasi

Berdasarkan printout pengolahan data SPSS mengenai uji validitas dan reliabilitas diperoleh informasi seperti yang tertera pada Tabel 4.10. Informasi yang tertera pada Tabel 4.10 menunjukkan bahwa semua instrument yang digunakan untuk mengukur variable pemberdayaan sumber daya koperasi adalah valid, karena p value (nilai sig) masih berada di bawah 0,05. Dengan demikian semua instrumen yang digunakan benar-benar mengindikasikan kualitas pemberdayaan sumber daya koperasi yang terjadi. Kemudian, berdasarkan statistic Cronbach's Alpha sebesar 0,783 yang lebih besar dari 0,60 diketahui pula bahwa semua responden memberikan jawaban yang konsisten atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengenai pemberdayaan sumber daya koperasi.

Tabel 4.10 : Hasil uji validitas instrumen variabel pemberdayaan sumber daya koperasi

No	Item Pertanyaan	Koef. Korelasi	P Value (Sig)	Ket
1	Saya sering mendapatkan <i>pelatihan kewirausahaan</i> yang diselenggarakan oleh koperasi RT	0,847	0,000	Valid
2	Saya mendapatkan <i>pelatihan perkoperasian</i> dari pihak-pihak terkait (seperti Dinas Koperasi, Pemda, LSM, Perguruan Tinggi, dll) untuk meningkatkan usaha	0,504	0,000	Valid
3	Saya sering mendapatkan informasi dan penjelasan yang detail dari pengurus koperasi RT tentang teknis dan manajemen koperasi	0,730	0,000	Valid
4	Koperasi RT kami benar-benar memperlakukan kami sebagai mitra usaha	0,723	0,000	Valid
5	Kami biasa mendapatkan <i>informasi dari Pengurus koperasi RT</i> kami mengenai isu-isu penting yang dapat meningkatkan kinerja usaha kami	0,745	0,000	Valid
6	Kami biasa mendapatkan <i>informasi dari Pemerintah Daerah</i> mengenai isu-isu penting yang dapat meningkatkan kinerja usaha kami	0,849	0,000	Valid

Sumber : Hasil pengolahan data, 2012.

#### 4.2.4 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Pemberdayaan Bidang Produksi

Berdasarkan printout pengolahan data SPSS mengenai uji validitas dan reliabilitas diperoleh informasi seperti yang tertera pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 : Hasil uji validitas instrumen variabel pemberdayaan bidang produksi

No	Item Pertanyaan	Koef. Korelasi	P Value (Sig)	Ket
1	Pemda ikut aktif membantu kami dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi melalui pemanfaatan teknologi murah dan sederhana	0,871	0,000	Valid
2	Pemerintah Daerah ikut aktif membantu dan mendorong kami dalam pemanfaatan sumber daya lokal	0,820	0,000	Valid
3	Saya mendapat dukungan dari koperasi RT untuk aktif berpartisipasi dalam pengadaan pangan bagi kepentingan masyarakat	0,610	0,000	Valid
4	Saya mendapat dukungan dari koperasi RT untuk aktif berpartisipasi dalam pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi pertanian bagi petani, seperti bibit unggul, pupuk, insektisida, dll.	0,889	0,000	Valid
5	Saya mendapat dukungan dari koperasi RT untuk aktif berpartisipasi dalam pengembangan <i>usaha budidaya perikanan dan peternakan</i>	0,639	0,000	Valid
6	Saya mendapat dukungan dari koperasi RT untuk aktif berpartisipasi dalam pengembangan <i>usaha sarana penunjang perikanan dan peternakan</i> (seperti penyediaan pakan, obat-obatan, dll)	0,592	0,000	Valid
7	Saya mendapat dukungan dari koperasi RT untuk aktif berpartisipasi dalam pengembangan <i>usaha budidaya tanaman pekarangan</i>	0,678	0,000	Valid

Sumber : Hasil pengolahan data, 2012.

Informasi tersebut menunjukkan bahwa semua instrument yang digunakan untuk mengukur variable pemberdayaan bidang produksi adalah valid, karena p value (nilai sig) masih berada di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua instrumen yang digunakan benar-benar dapat digunakan untuk mengukur kualitas pemberdayaan bidang produksi atau dapat menggambarkan pemberdayaan bidang produksi yang sesungguhnya terjadi. Kemudian, berdasarkan statistic Cronbach's Alpha sebesar 0,782

yang lebih besar dari 0,60 diketahui pula bahwa semua responden memberikan jawaban yang konsisten atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengenai pemberdayaan bidang produksi.

#### 4.2.5 Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen Pengembangan Jaringan Pemasaran

Berdasarkan printout pengolahan data SPSS mengenai uji validitas dan reliabilitas diperoleh informasi seperti yang tertera pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12 : Hasil uji validitas instrumen variabel pengembangan jaringan pemasaran

No	Item Pertanyaan	Koef. Korelasi	P Value (Sig)	Ket
1	Daerah ikut aktif dalam mempromosikan hasil produksi koperasi RT kami	0,682	0,000	Valid
2	Pemerintah Daerah juga ikut aktif dalam mempromosikan hasil produksi angg koperasi RT	0,910	0,000	Valid
3	Pemerintah Daerah ikut aktif dalam membantu memasarkan hasil produksi koperasi RT kami	0,914	0,000	Valid
4	Pemerintah Daerah ikut aktif dalam membantu memasarkan hasil produksi angg koperasi kami	0,921	0,000	Valid
5	Pemda ikut aktif dalam mengembangkan sarana pemasaran hasil produksi koperasi (misal gedung pameran, perbaikan pasar, tempat berjualan, dll)	0,893	0,000	Valid
6	Saya dan anggota koperasi RT lainnya biasa diikutsertakan pemerintah daerah dalam pameran-pameran produk yang dihasilkan koperasi dan anggotanya	0,889	0,000	Valid
7	Banyak diantara anggota koperasi RT kami yang biasa diikutsertakan pemerintah daerah dalam pameran-pameran produk yang dihasilkan koperasi dan anggotanya	0,890	0,000	Valid

Sumber : Hasil pengolahan data, 2012.

Informasi yang tertera pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa semua instrumen yang digunakan untuk mengukur variable pengembangan jaringan pemasaran koperasi adalah valid, karena p value (nilai sig) masih berada di bawah 0,05. Dengan demikian semua instrumen yang digunakan benar-benar dapat digunakan untuk mengukur kualitas pengembangan jaringan pemasaran koperasi atau mampu menjelaskan gambaran mengenai

pengembangan jaringan pemasaran koperasi yang terjadi. Kemudian, berdasarkan uji reliabilitas yang menghasilkan statistic Cronbach's Alpha sebesar 0,804 yang lebih besar dari 0,60 diketahui pula bahwa semua responden memberikan jawaban yang konsisten atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengenai pengembangan jaringan pemasaran koperasi.

#### 4.2.6 Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen Pemberdayaan Teknologi dan Informasi

Berdasarkan printout pengolahan data SPSS mengenai uji validitas dan reliabilitas diperoleh informasi seperti yang tertera pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13 : Hasil uji validitas instrumen variabel pemberdayaan teknologi dan Informasi

No	Item Pertanyaan	Koef. Korelasi	P Value (Sig)	Ket
1	Beberapa pihak (seperti Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi, Perguruan Tinggi, LSM, dll) telah <i>mendorong</i> kami untuk memanfaatkan teknologi computer	0,921	0,000	Valid
2	Beberapa pihak telah <i>mengajari</i> kami menggunakan teknologi computer	0,930	0,000	Valid
3	Beberapa pihak telah mengajari kami tentang <i>penggunaan perangkat lunak komputer</i> (seperti penggunaan program Excel) dalam setiap transaksi keuangan koperasi RT	0,944	0,000	Valid
4	Beberapa pihak telah mengajari kami tentang penggunaan dan pemanfaatan teknologi <i>internet</i>	0,943	0,000	Valid
5	Beberapa pihak (seperti Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi, Perguruan Tinggi, LSM, dll) telah mendorong kami menggunakan transaksi secara online	0,907	0,000	Valid
6	Beberapa pihak telah membantu kami dalam mendayagunakan jaringan pasar online untuk mengembangkan pasar terbuka	0,925	0,000	Valid
7	Beberapa pihak (seperti Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi, Perguruan Tinggi, LSM, dll) telah membantu kami dalam membentuk jaringan usaha dan perdagangan produk yang dihasilkan secara online (misal pasar online)	0,907	0,000	Valid

Sumber : Hasil pengolahan data, 2012.

Informasi pada Tabel 4.13 tersebut menunjukkan bahwa semua instrument yang digunakan untuk mengukur variable pemberdayaan teknologi dan informasi adalah valid, karena p value (nilai sig) masih berada di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua instrumen yang digunakan benar-benar dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemberdayaan teknologi dan informasi pada gerakan koperasi RT. Kemudian berdasarkan uji reliabilitas yang menghasilkan statistic Cronbach's Alpha sebesar 0,809 yang lebih besar dari 0,60 diketahui pula bahwa semua responden memberikan jawaban yang konsisten atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengenai dan informasi.

#### **4.2.7 Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen Kinerja Pemberdayaan**

Berdasarkan printout pengolahan data SPSS mengenai uji validitas dan reliabilitas diperoleh informasi seperti yang tertera pada Tabel 4.14. Informasi tersebut menunjukkan bahwa semua instrument yang digunakan untuk mengukur variable pemberdayaan teknologi dan informasi adalah valid, karena p value (nilai sig) masih berada di bawah 0,05. Dengan demikian semua instrumen yang digunakan benar-benar dapat menjelaskan gambaran kinerja pemberdayaan koperasi yang terjadi. Kemudian, berdasarkan uji reliabilitas yang menghasilkkan statistic Cronbach's Alpha sebesar 0,765 yang lebih besar dari 0,60 diketahui pula bahwa semua responden memberikan jawaban yang konsisten atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengenai dan informasi.

Tabel 4.14 : Hasil uji validitas instrumen variabel kinerja pemberdayaan

No	Item Pertanyaan	Koef. Korelasi	P Value (Sig)	Ket
1	Saya sering mengikuti pertemuan yang diadakan dalam kegiatan koperasi RT ?	0,735	0,000	Valid
2	Saya sering memberikan masukan dlm pertemuan yang dilaksanakan dalam kegiatan koperasi RT	0,768	0,000	Valid
3	Saya pernah memperbincangkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan koperasi RT diluar forum koperasi bersama teman, saudara atau orang lain	0,514	0,000	Valid
4	Secara nurani saya tergerak untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan koperasi RT	0,780	0,000	Valid
5	Saya selalu mengajak orang lain untuk ikut aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan koperasi RT	0,768	0,000	Valid
6	Saya mempunyai ide-ide atau pemikiran baru dalam pengembangan koperasi RT	0,722	0,000	Valid
7	Saya pernah memikirkan bgm meningkatkan peran koperasi RT dalam memecahkan masalah kemiskinan di lingkungan sekitar anda	0,768	0,000	Valid
8	Saya suka mengkompromikan pendapat dengan orang lain dalam menyampaikan suatu program atau usulan kegiatan kop. RT agar dapat terlaksana	0,751	0,000	Valid
9	Saya merasa puas terhadap hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh koperasi RT	0,704	0,000	Valid
10	Setelah mengikuti kegiatan koperasi sekarang ini, saya lebih percaya diri.	0,737	0,000	Valid
11	Setelah mengikuti kegiatan-kegiatan koperasi RT, keterampilan administrasi saya menjadi lebih baik	0,739	0,000	Valid
12	Menurut saya, keberadaan koperasi RT memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungan kami	0,753	0,000	Valid
13	Koperasi kami memiliki tenaga yang pandai dalam mengoperasikan komputer	0,774	0,000	Valid
14	Koperasi kami aktif memanfaatkan internet untuk mendapatkan berbagai inf yang menunjang usaha	0,805	0,000	Valid
15	Koperasi RT kami mendayagunakan jaringan pasar online untuk mengembangkan pasar terbuka	0,809	0,000	Valid
16	Koperasi RT kami menggunakan jaringan komunikasi dg pihak-pihak yang berkepentingan (misal melalui blog, website, facebook, dll).	0,830	0,000	Valid
17	Koperasi RT kami menggunakan jaringan usaha dan perdagangan produk secara online.	0,791	0,000	Valid

Sumber : Hasil pengolahan data, 2012.

### 4.3 Deskripsi Pemberdayaan Koperasi RT di Kabupaten Wonogiri

Penjelasan deskriptif mengenai variabel-variabel tersebut diuraikan dengan menghitung nilai indeks masing-masing indikator terlebih dahulu. Beberapa nilai indeks indikator tersebut dijumlah dan di rata-ratakan akan menghasilkan nilai indeks sebuah variabel. Nilai indeks yang sudah dihitung kemudian dikelompokkan kedalam 3 kriteria interpretasi, yakni :

Tabel 4.15 : Kriteria Nilai Indeks

Nilai Indeks	Kriteria Dasar
1,00 – 4,00	Rendah
4,00 – 6,99	Sedang
7,00 – 10,00	Tinggi

Sumber : Data primer yang diolah, 2012

Nilai indeks dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Nilai Indeks} = \{(\%F1 \times 1) + (\%F2 \times 2) + (\%F3 \times 3) + (\%F4 \times 4) + (\%F5 \times 5) + (\%F6 \times 6) + (\%F7 \times 7) + (\%F8 \times 8) + (\%F9 \times 9) + (\%F10 \times 10)\} / 10$$

Dimana F adalah frekuensi jawaban responden yang dipresentasikan dari total responden.

Pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam penelitian ini cenderung bersifat penilaian yang positif terhadap realisasi kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya maupun oleh pihak lain. Sebagai misal, pertanyaan-pertanyaan tentang kegiatan pemberdayaan kelembagaan koperasi RT disusun untuk mengetahui sejauhmana respon anggota koperasi RT terhadap kegiatan tersebut di lapangan. Dengan cara seperti ini, nilai indeks item indicator atau pertanyaan yang semakin tinggi menggambarkan kualitas pemberdayaan yang semakin baik.

### **4.3.1 Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi**

Keyakinan bahwa kelembagaan (institutions) bisa menjadi sumber efisiensi dan kemajuan ekonomi telah diterima oleh sebagian besar ekonom, bahkan oleh mereka yang paling liberal sekalipun (Kuncoro, 2010). Kelembagaan dimaknai sebagai aturan main (rules of the game) dalam masyarakat berupa regulasi yang memapankan masyarakat untuk melakukan interaksi (Yeager, 1999). Kelembagaan mempengaruhi bagaimana masyarakat mengambil keuntungan dari berbagai kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, namun kelembagaan hanya akan mendukung kesejahteraan jika digunakan untuk aktivitas yang produktif. Kelembagaan yang paling efektif juga mendorong seseorang untuk lebih inovatif, atau produktif dari perspektif jangka panjang sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2010).

Pemberdayaan kelembagaan koperasi RT dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait dalam bentuk, (a) penyederhanaan perizinan dan pengembangan system perizinan bagi pendirian usaha mikro anggota, (b) praktek penerapan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung pemberdayaan koperasi, (c) praktek pengembangan kualitas koperasi, dan (d) revitalisasi koperasi. Informasi yang diperoleh dari anggota koperasi sampel menunjukkan bahwa nilai indeks untuk variabel pemberdayaan koperasi sebesar 8,29 termasuk dalam katagori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa secara riil pemberdayaan kelembagaan koperasi benar-benar telah dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri. Pemberdayaan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk anjuran pendirian koperasi RT, sosialisasi mengenai aturan-aturan main, kemudahan perijinan, dan dukungan dalam pengembangan usaha.

Gambaran secara lebih lengkap bisa dijelaskan berdasar nilai indeks masing-masing item pertanyaan. Nilai indeks dari masing-masing item pertanyaan yang lebih besar dari 7 yang termasuk dalam katagori tinggi memberi gambaran yang jelas bahwa masing-masing anggota telah mendapat informasi mengenai aturan main koperasi RT, kemudahan perijinan

dan dukungan pemerintah daerah dalam menciptakan kelembagaan koperasi RT.

Tabel 4.16 : Nilai Indeks instrumen dan variabel pemberdayaan kelembagaan koperasi

No	Item Pertanyaan	Nilai Indeks
1	Pemerintah Daerah menganjurkan pendirian koperasi RT di lingkungan RT kami	8.404
2	Pemerintah Daerah telah mensosialisasikan kepada kami (misal melalui kelurahan) tentang aturan-aturan penyelenggaraan koperasi RT	8.333
3	Pemerintah Daerah memberikan kemudahan perijinan dalam pendirian koperasi RT	8.609
4	Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pengurusan Badan Hukum Koperasi bagi koperasi RT yang sudah terbentuk	8.603
5	Saya dengan mudah menjadi anggota koperasi RT	8.603
6	Pemerintah Daerah telah menganjurkan untuk memanfaatkan koperasi RT sebagai sarana pengembangan usaha mikro yang saya miliki	8.237
7	Pemerintah Daerah ikut membantu pengembangan usaha koperasi RT kami	8.455
8	Pemerintah Daerah juga ikut serta membantu pengembangan usaha mikro yang saya miliki	7.994
9	Pemda memiliki motivasi yang tinggi untuk membangkitkan kembali peran koperasi dalam perek daerah melalui pembentukan koperasi RT	8.346
10	Pemerintah Daerah ikut membantu menjembatani hubungan usaha mikro saya dengan perusahaan-perusahaan besar	7.314
Nilai Indeks Pemberdayaan Kelembagaan		8.290

Sumber : Data primer yang diolah, hasil printout komputer, 2012.

Nilai indeks dengan katagori tinggi tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah, (a) menganjurkan masyarakat untuk mendirikan koperasi di masing-masing RT, (b) mensosialisasikan aturan main penyelenggaraan koperasi RT, (c) memberikan kemudahan perijinan bagi pendirian koperasi RT, (d) memberikan kemudahan dalam pemberian badan hukum koperasi, (e) memberikan kemudahan untuk menjadi anggota koperasi RT, (f) menganjurkan anggota masyarakat untuk memanfaatkan koperasi sebagai sarana pengembangan usaha mikro miliknya, (g) membantu pengembangan usaha koperasi RT, (h) ikut membantu pengembangan usaha anggota koperasi RT, (i) memiliki motivasi tinggi untuk membangkitkan peran

koperasi dalam perekonomian daerah melalui pengembangan koperasi, dan (j) ikut menjembatani hubungan usaha mikro anggota koperasi dengan perusahaan-perusahaan besar.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari jawaban kuesioner terbuka mengenai harapan anggota dari koperasi, harapan anggota atas peran serta pemerintah daerah, kekurangan koperasi RT dan saran anggota terkait dengan pemberdayaan kelembagaan ini disarikan sebagai berikut :

*A. Harapan anggota dari pemberdayaan kelembagaan koperasi RT*

1. Pemerintah perlu ikut serta dalam mensejahterakan anggota koperasi
2. Koperasi RT dapat membantu usaha kecil dan mikro milik anggota dan menjadi wadah untuk usaha kopektif
3. Koperasi RT dapat menjadi lembaga yang kuat dan diterima masyarakat sebagai alternatif permodalan dan usaha, mendapatkan tambahan penghasilan dari sisa hasil usaha (SHU), dan anggotanya terhindar dari rentenir
4. Koperasi RT bisa menjadi koperasi mandiri yang mampu membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga
5. Koperasi RT dapat menjadi lembaga yang mempererat tali persaudaraan warga dan sekaligus menjadi sokoguru perekonomian desa.
6. Koperasi RT benar-benar menjadi unit usaha yang bisa berguna dari oleh dan untuk anggota
7. Koperasi RT dapat menjadi lembaga yang membuka lapangan kerja bagi anggota atau anak-anak anggota

*B. Harapan anggota dari peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan kelembagaan koperasi RT*

1. Pemerintah Daerah dapat memberi tambahan modal (hibah) pada koperasi RT untuk penguatan kelembagaan koperasi RT
2. Pemerintah Daerah ikut aktif dalam pengembangan usaha koperasi dan anggotanya, seperti memberikan motivasi kepada anggota dan

pengurus koperasi RT, melakukan pembinaan dan pendampingan, memberikan pelatihan, memberikan bimbingan teknis mengenai kelembagaan, dan fasilitas untuk usaha

3. Pemerintah Daerah mempermudah hubungan koperasi RT dengan lembaga keuangan
4. Pemerintah Daerah dapat menjadikan koperasi sebagai mitra kerja yang saling menguntungkan
5. Pemerintah Daerah dapat melindungi koperasi RT yang sudah terbentuk dan sekaligus memonitoring koperasi tersebut

*C. Penilaian anggota mengenai kekurangan pemberdayaan kelembagaan koperasi RT*

1. Secara kelembagaan koperasi RT belum mencapai tataran koperasi yang mandiri, masih kurang dalam penanganannya, kurang dalam penyuluhan dan pembinaan,
2. Secara kelembagaan, masih banyak anggota koperasi yang kurang memahami tentang hakekat koperasi, sehingga banyak anggota yang kurang disiplin dan belum dijadikan sebagai sarana berkumpul dan berembuk warga.
3. Budaya inovasi belum terbentuk dan masih kesulitan dalam mengembangkan jaringan usaha.
4. Pemanfaatan simpan pinjam sebagian besar untuk kebutuhan konsumtif
5. Koperasi RT masih belum memberikan pelayanan maksimal kepada anggotanya, kecepatan layanan kurang, jam kerja terbatas, masih manual dan masih kekurangan fasilitas pendukung.
6. Koperasi RT belum memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam transaksi simpan pinjam, sehingga banyak pinjaman yang macet.
7. Sebagai lembaga usaha yang sebagian besar sudah berbadan hukum, masih banyak koperasi RT yang belum memiliki kantor tempat kegiatan administrasi dilaksanakan

*D. Saran anggota terkait dengan pemberdayaan koperasi RT*

1. Untuk memperkuat kelembagaan koperasi, diperlukan peran serta pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan secara kontinyu, seperti dalam bentuk pelatihan-pelatihan perkoperasian dan usaha bagi Pengurus dan anggotanya
2. Pemberian tambahan hibah Pemerintah Daerah yang semakin besar kadang bisa membuat koperasi menjadi tidak mandiri, sehingga koperasi RT perlu dimotivasi dan dilatih untuk berinovasi mencari sumber modal sendiri.
3. Profesionalisme dalam koperasi RT perlu ditegakkan sehingga berlaku tertib administrasi, tertib simpanan wajib dan tertib angsuran pinjaman, terbuka dan jujur.
4. Diperlukan kerjasama yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dengan koperasi RT. Jika Pemerintah Daerah memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, maka kesejahteraan itu dapat tercapai manakala peran koperasi RT dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya terwujud. Inilah makna kerjasama yang saling menguntungkan.
5. Aturan main tentang koperasi RT yang sudah disepakati bersama hendaknya ditegakkan, misalnya aturan mengenai kepengurusan, keanggotaan, usaha simpan pinjam, usaha sewa, dll.

#### **4.2.2 Peningkatan Akses Koperasi Terhadap Sumber Pendanaan**

Salah satu masalah dan sekaligus tantangan yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah, termasuk yang ada di Kab. Wonogiri adalah kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan. Strategi pemberdayaan yang telah diupayakan dalam mengatasi masalah ini adalah mengembangkan berbagai Skim Perkreditan untuk Koperasi, mengembangkan Lembaga Kredit Mikro (LKM) baik bank maupun non bank, pemberdayaan mikro dan usaha kecil melalui program Sertifikasi Tanah, dan bantuan perkuatan secara selektif pada sektor usaha tertentu sebagai stimulan. Proses pemberdayaan yang telah dilakukan mendapatkan respon yang sangat baik dari anggota koperasi.

Hal ini bisa ditunjukkan dari nilai indeks yang sangat besar untuk instrumen dan variabel peningkatan akses koperasi terhadap sumber-sumber pendanaan koperasi, yakni lebih dari 7,00 atau berada dalam katagori nilai indeks tinggi.

Bila mengacu pada instrumen atau item pertanyaan yang diajukan, maka dapat diketahui bahwa :

1. Anggota koperasi memiliki kemudahan dalam melakukan pinjaman dana dari koperasinya,
2. Pemerintah Daerah ikut aktif memberikan dana stimulan (misal dana hibah) kepada koperasi RT guna membantu pengembangan usaha koperasi dan anggotanya, misalnya pemberian dana hibah secara bertahap mulai dari Rp 500.000, Rp 1.000.000, sampai Rp 2.000.000.
3. Pemerintah Daerah ikut aktif memfasilitasi hubungan koperasi RT dengan lembaga keuangan seperti bank dalam rangka mendapatkan kredit dengan persyaratan yang ringan,

Tabel 4.16 : Nilai Indeks instrumen dan variabel peningkatan akses koperasi Terhadap sumber-sumber pendanaan

No	Item Pertanyaan	Nilai Indeks
1	Sangat mudah bagi saya untuk mendapatkan pinjaman modal usaha dari koperasi RT	8.378
2	Pemerintah Daerah ikut aktif memberikan dana stimulan (misal dana hibah) kepada koperasi RT kami untuk membantu pengembangan usaha koperasi dan anggotanya	8.647
3	Pemda ikut aktif memfasilitasi hubungan koperasi RT dengan lembaga keuangan seperti bank dalam rangka mendapatkan kredit dengan persyaratan yang ringan	7.808
4	Pemerintah Daerah ikut aktif memfasilitasi pemanfaatan bantuan modal usaha bagi koperasi RT dari instansi-instansi tertentu seperti Kementrian Koperasi dan UMKM RI, BUMN, dll	8.051
5	Koperasi RT kami dengan mudah mendapatkan bantuan dana dari lembaga keuangan seperti bank	7.256
6	Koperasi RT kami dengan mudah mendapatkan bantuan kredit dari instansi-instansi pemerintah	7.064
Nilai Indeks Peningkatan Akses Koperasi Terhadap Sumber Pendanaan		7.868

Sumber : Data primer yang diolah, hasil printout komputer, 2012.

4. Pemerintah Daerah ikut aktif memfasilitasi pemanfaatan bantuan modal usaha bagi koperasi RT dari instansi-instansi tertentu seperti Kementerian Koperasi dan UMKM RI, BUMN, dan lain-lain,
5. Ada kemudahan koperasi RT dalam mendapatkan bantuan dana dari lembaga keuangan seperti bank,
6. Ada kemudahan koperasi RT dalam mendapatkan bantuan kredit dari instansi-instansi pemerintah

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari jawaban kuesioner terbuka mengenai harapan anggota dari koperasi, harapan anggota atas peran serta pemerintah daerah, kekurangan koperasi RT dan saran anggota terkait dengan peningkatan akses koperasi terhadap sumber-sumber pendanaan ini disarikan sebagai berikut :

*A. Harapan anggota dari upaya peningkatan akses koperasi terhadap sumber-sumber pendanaan koperasi RT*

1. Anggota koperasi sangat mengharapkan memperoleh kemudahan dalam mendapatkan pinjaman dari koperasi dengan jasa yang murah, bila perlu lebih murah dari bunga bank
2. Koperasi dapat menjadi alternatif pinjaman dan tambahan penghasilan dari sisa hasil usaha
3. Banyak anggota koperasi yang menghendaki jumlah pinjaman yang lebih besar dan dalam jangka waktu pelunasan yang lebih panjang (misal lebih dari 2 tahun)
4. Anggota koperasi RT banyak yang mengharapkan pinjaman dari koperasi RT agar terhindar dari praktek lintah darat (rentenir)

*B. Harapan anggota dari peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan akses koperasi terhadap sumber-sumber pendanaan koperasi RT*

1. Sampai saat ini, jumlah modal yang dimiliki koperasi RT masih sangat terbatas dibanding dengan permintaan modal anggota. Oleh karena itu, banyak anggota yang mengharapkan tambahan bantuan modal dari Pemerintah Daerah atau instansi-instansi yang lain untuk pengembangan usaha koperasi RT dan usaha anggotanya.

2. Masih diperlukan peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan agar ketergantungan terhadap modal hibah pemerintah daerah semakin berkurang.
3. Anggota koperasi sangat mengharapkan peran pemerintah daerah dalam menjembatani hubungan koperasi RT dengan lembaga keuangan baik bank maupun non bank (instansi-instansi, BUMN dan LSM).

*C. Penilaian anggota mengenai kekurangan upaya peningkatan akses koperasi terhadap sumber-sumber pendanaan koperasi RT*

1. Terlalu tergantung pada dana hibah pemerintah daerah menyebabkan modal koperasi tidak cukup memenuhi permintaan anggotanya.
2. Proses akuntansi yang kurang transparan menyebabkan munculnya masalah-masalah keuangan di tingkat operasional koperasi, seperti pinjaman yang macet, angsuran simpanan wajib yang tidak lancar, rendahnya simpanan sukarela, dll.
3. Belum adanya sentuhan-sentuhan pemerintah dalam mengatasi masalah permodalan koperasi RT berdampak pada penyelenggaraan administrasi yang kurang baik di tingkat koperasi RT.

*D. Saran anggota terkait upaya peningkatan akses koperasi terhadap sumber-sumber pendanaan dengan pemberdayaan koperasi RT*

1. Keterbatasan dana hibah pemerintah daerah mengharuskan koperasi RT menggali dana sendiri yang lebih aktif, melancarkan usaha simpan pinjam, mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan modal koperasi, menyelenggarakan administrasi yang baik seperti tertib administrasi, tertib simpanan wajib dan tertib angsuran pinjaman.
2. Adanya desakan bagi pengurus untuk selalu mencari informasi dari pemerintah mengenai sumber-sumber permodalan murah yang dapat bermanfaat bagi koperasi.
3. Sudah waktunya koperasi RT mencari terobosan usaha baru yang dapat memupuk permodalan koperasi, sehingga koperasi RT akan terhindar dari ketergantungan sumber dana dari luar.

4. Anggota koperasi RT masih mengharapkan kepedulian dari pemerintah daerah akan bantuan hibah untuk pengembangan usaha koperasi dan anggotanya.
5. Banyak anggota yang mengharapkan pemberian bantuan dana koperasi yang disertai pendampingan usaha supaya usaha anggota dapat berjalan lancar, demikian juga angsurannya.

#### **4.3.3 Pemberdayaan Sumber Daya Koperasi**

Manusia adalah sumber daya yang paling utama dalam koperasi. Sumber daya manusia tersebut yang paling utama adalah anggota dan karyawan. Baik anggota maupun karyawan koperasi memiliki keinginan yang sama untuk dipuaskan. Jika anggota puas dengan keberadaannya di koperasi, ia akan berpartisipasi aktif terhadap koperasinya. Demikian juga dengan karyawan koperasi, kepuasan atas pelayanan koperasi akan mendorong mereka tetap bekerja di koperasi.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas anggota koperasi, kualitas sumber daya manusia koperasi perlu ditingkatkan, terutama melalui pendidikan dan pelatihan. Kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kab. Wonogiri dalam kaitan dengan ini antara lain adalah penumbuhan Wirausaha baru, peningkatan kemampuan teknis dan manajerial koperasi, pengembangan kualitas layanan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi kelompok usaha produktif, dan pengembangan prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan.

Proses pemberdayaan yang telah dilakukan mendapatkan respon yang sangat baik dari anggota koperasi. Hal ini bisa ditunjukkan dari nilai indeks yang sangat besar untuk instrumen dan variabel pemberdayaan sumber daya koperasi, yakni lebih dari 7,00 atau berada dalam katagori nilai indeks tinggi.

Bila mengacu pada instrumen atau item pertanyaan yang diajukan, maka dapat diketahui bahwa :

1. Koperasi RT sering memberikan pelatihan kewirausahaan kepada anggotanya.

2. Beberapa pihak seperti Dinas Koperasi, Pemda, LSM, Perguruan Tinggi, dll telah memberikan pelatihan perkoperasian,
3. Para pengurus koperasi RT telah terbiasa memberikan informasi dan penjelasan yang detail tentang teknis dan manajemen koperasi serta isu-isu penting yang dapat meningkatkan kinerja usaha anggota.
4. Koperasi RT memperlakukan anggotanya sebagai mitra usaha
5. Pemerintah Daerah sudah biasa memberikan informasi mengenai isu-isu penting yang dapat meningkatkan kinerja usaha anggota koperasi.

Tabel 4.17 : Nilai Indeks instrumen dan variabel pemberdayaan sumber daya koperasi

No	Item Pertanyaan	Nilai Indeks
1	Saya sering mendapatkan <i>pelatihan kewirausahaan</i> yang diselenggarakan oleh koperasi RT	6.462
2	Saya mendapatkan <i>pelatihan perkoperasian</i> dari pihak-pihak terkait (seperti Dinas Koperasi, Pemda, LSM, Perguruan Tinggi, dll) untuk meningkatkan usaha	7.026
3	Saya sering mendapatkan informasi dan penjelasan yang detail dari pengurus koperasi RT tentang teknis dan manajemen koperasi	7.782
4	Koperasi RT kami benar-benar memperlakukan kami sebagai mitra usaha	8.224
5	Kami biasa mendapatkan <i>informasi dari Pengurus koperasi RT</i> kami mengenai isu-isu penting yang dapat meningkatkan kinerja usaha kami	7.846
6	Kami biasa mendapatkan <i>informasi dari Pemerintah Daerah</i> mengenai isu-isu penting yang dapat meningkatkan kinerja usaha kami	6.788
Nilai Indeks Pemberdayaan Sumber Daya Koperasi		7.355

Sumber : Data primer yang diolah, hasil printout komputer, 2012.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari jawaban kuesioner terbuka mengenai harapan anggota dari koperasi, harapan anggota atas peran serta pemerintah daerah, kekurangan koperasi RT dan saran anggota terkait dengan pemberdayaan sumber daya koperasi ini disarikan sebagai berikut :

*A. Harapan anggota dari upaya pemberdayaan sumber daya koperasi RT*

1. Koperasi RT dapat menjadi sarana pemberdayaan bagi usaha kecil dan mikro
2. Koperasi RT dapat menjadi media belajar dan perolehan informasi

3. Koperasi RT dapat ikut mengembangkan keterampilan anggota
4. Koperasi RT dapat menjadi sarana peningkatan pengetahuan dan pengalaman anggota tentang koperasi
5. Anggota koperasi RT mendapatkan pelatihan kewirausahaan baik dari koperasi maupun pihak lain seperti pemerintah daerah.

*B. Harapan anggota dari peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan sumber daya koperasi RT*

1. Pemerintah Daerah mengadakan pembinaan rutin, paling tidak satu tahun sekali untuk memberi pencerahan dalam kegiatan koperasi
2. Pemerintah Daerah dapat memberikan pembinaan baik dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan, maupun pendampingan usaha anggota koperasi.
3. Mengingat koperasi RT memiliki kualitas SDM yang rendah, Pemerintah Daerah ikut membantu mengatasi keterbatasan SDM di koperasi RT melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian.
4. Pemerintah Daerah dapat memberikan pelatihan kepada pengurus dan anggota koperasi untuk meningkatkan usaha demi kesejahteraan anggota koperasi

*C. Penilaian anggota mengenai kekurangan upaya pemberdayaan sumber daya koperasi RT*

1. Pemerintah membantu pengembangan usaha anggotanya lewat penyuluhan dan pelatihan keterampilan, serta membantu pemasarannya
2. Kurangnya mendapat pelatihan-pelatihan dari pemerintah atau swasta
3. Rendahnya pengetahuan pengurus

*D. Saran anggota terkait upaya pemberdayaan sumber daya koperasi RT*

1. Peningkatan SDM anggota koperasi
2. Mengadakan pelatihan untuk pengurus dan anggota koperasi
3. Koperasi RT pembinaannya supaya ditingkatkan sehingga lebih maju dan berkembang
4. Diberikan penyuluhan secara rutin

#### 4.3.4 Pemberdayaan Bidang Produksi

Kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kab. Wonogiri dalam kaitan dengan ini antara lain adalah (a) program pengembangan pengadaan pangan koperasi dengan sistem bank padi, (b) program pengembangan usaha koperasi melalui pengadaan bibit Kakao, Jambu Mente dan Jarak, (c) program pengembangan usaha budidaya perikanan dan peternakan, (d) program pengembangan usaha sarana penunjang perikanan dan peternakan, dan (e) program pengembangan usaha budi daya tanaman pekarangan.

Tabel 4.18 : Nilai Indeks instrumen dan variabel pemberdayaan bidang produksi

No	Item Pertanyaan	Nilai Indeks
1	Pemda ikut aktif membantu kami dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi melalui pemanfaatan teknologi murah dan sederhana	6.987
2	Pemerintah Daerah ikut aktif membantu dan mendorong kami dalam pemanfaatan sumber daya lokal	7.205
3	Saya mendapat dukungan dari koperasi RT untuk aktif berpartisipasi dalam pengadaan pangan bagi kepentingan masyarakat	7.756
4	Saya mendapat dukungan dari koperasi RT untuk aktif berpartisipasi dalam pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi pertanian bagi petani, seperti bibit unggul, pupuk, insektisida, dll.	7.205
5	Saya mendapat dukungan dari koperasi RT untuk aktif berpartisipasi dalam pengembangan <i>usaha budidaya perikanan dan peternakan</i>	7.276
6	Saya mendapat dukungan dari koperasi RT untuk aktif berpartisipasi dalam pengembangan <i>usaha sarana penunjang perikanan dan peternakan</i> (seperti penyediaan pakan, obat-obatan, dll)	7.115
7	Saya mendapat dukungan dari koperasi RT untuk aktif berpartisipasi dalam pengembangan <i>usaha budidaya tanaman pekarangan</i>	7.449
Nilai Indeks Pemberdayaan Bidang Produksi		7.285

Sumber : Data primer yang diolah, hasil printout komputer, 2012.

Proses pemberdayaan yang telah dilakukan mendapatkan respon yang sangat baik dari anggota koperasi. Hal ini bisa ditunjukkan dari nilai indeks yang sangat besar untuk beberapa instrumen pemberdayaan dan variabel pemberdayaan bidang produksi, yakni lebih dari 7,00 atau berada dalam katagori nilai indeks tinggi.

Bila mengacu pada instrumen atau item pertanyaan yang diajukan, maka dapat diketahui bahwa :

1. Pemerintah Daerah ikut aktif membantu anggota koperasi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi melalui pemanfaatan teknologi murah dan sederhana, dan mendorong anggota koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal.
2. Koperasi RT mendukung anggotanya untuk aktif berpartisipasi dalam pengadaan pangan dan pemanfaatan sarana produksi pertanian bagi petani, pengembangan *usaha budidaya perikanan dan peternakan*, pengembangan *usaha sarana penunjang perikanan dan peternakan* (seperti penyediaan pakan, obat-obatan, dan lain-lain), dan pengembangan *usaha budidaya tanaman pekarangan*

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari jawaban kuesioner terbuka mengenai harapan anggota dari koperasi, harapan anggota atas peran serta pemerintah daerah, kekurangan koperasi RT dan saran anggota terkait dengan pemberdayaan bidang produksi ini disarikan sebagai berikut :

*A. Harapan anggota dari upaya pemberdayaan bidang produksi pada koperasi RT*

1. Anggota mengharapkan koperasi RT dapat membantu memperlancar produksi usaha kecil dan mikro yang dimilikinya. Oleh karena itu, mereka sangat mengharapkan informasi dari berbagai pihak, termasuk dari pemerintah.
2. Bagi para petani yang menjadi anggota koperasi RT, umumnya mereka mengharapkan kontribusi koperasi dalam membantu usaha produktif di sektor pertanian, termasuk memfasilitasi para anggota untuk dapat mengolah hasil pertanian supaya mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi.
3. Banyak anggota yang mengharapkan koperasi RT menjadi tempat usaha kelompok (wadah usaha kolektif) untuk menyalurkan bahan pertanian dan manampung hasil pertanian

*B. Harapan anggota dari peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan bidang produksi pada koperasi RT*

1. Anggota mengharapkan Pemerintah Daerah ikut aktif dalam pengembangan koperasi RT.
2. Pemerintah Daerah hendaknya sering mengadakan pembinaan ke koperasi RT.
3. Pemerintah Daerah senantiasa mendorong tumbuh kembang usaha koperasi dan anggotnya.
4. Anggota mengharapkan ada penyuluhan sampai ke tingkat koperasi RT
5. Anggota mengharapkan Pemerintah Daerah ikut membantu menyalurkan produk home industri dari anggota koperasi RT.
6. Anggota koperasi berharap Pemerintah Daerah ikut memfasilitasi sarana dan prasarana untuk pengembangan koperasi.
7. Perlunya sosialisasi secara intensif program-program bidang pertanian dan peternakan yang baik dan benar

*C. Penilaian anggota mengenai kekurangan upaya pemberdayaan bidang produksi pada koperasi RT*

1. Koperasi belum mampu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk memajukan koperasi, termasuk dalam pengembangan pertanian dan peternakan.
2. Kurang ada penyuluhan dan pembinaan khusus dalam bidang produksi pertanian dan peternakan bagi anggota koperasi
3. Anggota koperasi RT banyak yang belum mendapatkan pelatihan-pelatihan keterampilan, terutama dalam bidang pertanian, peternakan, industri, dan lain-lain, baik dari pemerintah maupun swasta.
4. Tingkat inovasi dalam koperasi masih rendah
5. Koperasi belum mampu membantu dalam pengembangan bidang peternakan
6. Koperasi RT belum mampu menampung hasil produksi para petani dan peternak

*D. Saran anggota terkait upaya pemberdayaan bidang produksi koperasi RT*

1. Perlu diadakan pembinaan secara kontinyu dalam bidang produksi dan pemasaran produk-produk anggota koperasi RT
2. Perlunya pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang memperkenalkan inovasi-inovasi baru bagi anggota
3. Pengurus hendaknya aktif mencari mencari informasi dari pemerintah perihal produk-produk inovatif yang dapat dikembangkan anggota.
4. Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi peralatan, bila perlu memberikan hibah peralatan untuk peningkatan produksi koperasi dan anggotanya.
5. Perlu ditingkatkan kepedulian Pemerintah Daerah dalam peningkatan produksi anggota koperasi RT, khususnya dari Dinas Perkoperasian.
6. Perlu adanya upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas seluruh anggota koperasi dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai perkoperasian yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat.

#### **4.3.5 Pengembangan Jaringan Pemasaran**

Jaringan pemasaran merupakan salah satu komponen modal sosial yang mampu mendorong kinerja koperasi. Jaringan pemasaran berkaitan dengan hubungan komunikasi antara individu atau organisasi satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan *mutual benefit* (Holmund & Fulton ,1999). Jaringan juga dimaksudkan sebagai seperangkat relasi yang dimiliki perusahaan (termasuk koperasi), baik horisontal maupun vertikal dengan organisasi lain, seperti penyedia, pelanggan, pesaing atau entitas lainnya (Gulati et al, 2000).

Jaringan pemasaran koperasi akan tersusun dalam mata rantai kerjasama antar koperasi yang saling terkait, seperti koperasi yang menangani produksi barang dan jasa dengan koperasi lain yang menangani distribusi, dan lembaga keuangan koperasi. Kerjasama sektoral ini tidak hanya bersifat lokal, tetapi hendaknya berkembang secara nasional dan internasional sebagaimana tercantum dalam salah satu prinsip koperasi. Dasar pemikiran dan konsep kerjasama yang dibangun dalam koperasi harus diarahkan pada upaya menggalang kekuatan bersama dalam menghadapi

persaingan-persaingan yang merugikan koperasi yang timbul dari konsentrasi-konsentrasi perusahaan kapitalis (Hendar, 2010).

Tabel 4.19 : Nilai Indeks instrumen dan variabel pengembangan Jaringan pemasaran

No	Item Pertanyaan	Nilai Indeks
1	Daerah ikut aktif dalam mempromosikan hasil produksi koperasi RT kami	6.494
2	Pemerintah Daerah juga ikut aktif dalam mempromosikan hasil produksi angg koperasi RT	6.160
3	Pemerintah Daerah ikut aktif dalam membantu memasarkan hasil produksi koperasi RT kami	6.244
4	Pemerintah Daerah ikut aktif dalam membantu memasarkan hasil produksi angg koperasi kami	6.378
5	Pemda ikut aktif dalam mengembangkan sarana pemasaran hasil produksi koperasi (misal gedung pameran, perbaikan pasar, tempat berjualan, dll)	6.288
6	Saya dan anggota koperasi RT lainnya biasa diikutsertakan pemerintah daerah dalam pameran-pameran produk yang dihasilkan koperasi dan anggotanya	6.410
7	Banyak diantara anggota koperasi RT kami yang biasa diikutsertakan pemerintah daerah dalam pameran-pameran produk yang dihasilkan koperasi dan anggotanya	6.359
Nilai Indeks Pengembangan Jaringan Pemasaran		6.333

Sumber : Data primer yang diolah, hasil printout komputer, 2012.

Kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kab. Wonogiri dalam pengembangan jaringan pemasaran diantaranya adalah promosi proyek koperasi, modernisasi usaha ritel koperasi, pengembangan sarana pemasaran koperasi, pengembangan *Trading Board* dan *Data Cente*, pameran di dalam dan di Luar negeri. Proses pemberdayaan yang telah dilakukan mendapatkan respon yang cukup baik dari anggota koperasi. Hal ini bisa ditunjukkan dari nilai indeks yang sangat besar untuk beberapa instrumen pemberdayaan dan variabel pengembangan jaringan pemasaran, yakni antara 4 – 7,00 atau berada dalam katagori nilai indeks sedang.

Bila mengacu pada instrumen atau item pertanyaan yang diajukan, maka dapat diketahui bahwa :

1. Pemerintah Daerah masih belum begitu aktif dalam mempromosikan hasil produksi koperasi RT dan anggotanya

2. Pemerintah Daerah masih belum begitu aktif dalam membantu memasarkan hasil produksi koperasi RT dan anggotanya
3. Pemerintah Daerah belum begitu aktif dalam mengembangkan sarana pemasaran hasil produksi koperasi (misal gedung pameran, perbaikan pasar, tempat berjualan, dll)
4. Pemerintah Daerah belum begitu aktif mengikutsertakan anggota koperasi RT dalam pameran-pameran produk yang dihasilkan koperasi dan anggotanya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari jawaban kuesioner terbuka mengenai harapan anggota dari koperasi, harapan anggota atas peran serta pemerintah daerah, kekurangan koperasi RT dan saran anggota terkait dengan pengembangan jaringan pemasaran ini disarikan sebagai berikut :

*A. Harapan anggota dari upaya pengembangan jaringan pemasaran pada koperasi RT*

1. Koperasi RT diharapkan dapat menjadi media belajar dan informasi, termasuk informasi pasar potensial untuk menjual produk-produk yang dihasilkan koperasi dan anggotanya.
2. Koperasi diharapkan menjadi pasar bagi anggota dan mampu memberikan pelayanan yang baik dan memberi kemudahan untuk melakukan usaha
3. Koperasi RT diharapkan menjadi sarana yang mampu memenuhi kebutuhan anggotanya disamping sebagai sarana yang dapat membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga.
4. Koperasi RT diharapkan menjadi sarana yang dapat mempromosikan produk daerah.
5. Koperasi RT dapat membantu menyalurkan bahan-bahan pertanian pertanian dan menampung hasil pertanian
6. Koperasi RT tidak hanya bergerak dalam usaha simpan pinjam, tapi juga bergerrak dalam unit usaha lain, seperti pertokoan yang menjual barang-barang kebutuhan anggota seperti LPG, pupuk, benih, dan lain-lain. Demikian juga dengan usaha jasa persewaan.

*B. Harapan anggota dari peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan jaringan pemasaran pada pada koperasi RT*

1. Anggota mengharapkan pemerintah daerah dapat memfasilitasi usaha pemasaran bagi penyaluran produk-produk koperasi dan anggotanya.
2. Anggota mengharapkan Pemerintah Daerah dapat membantu pembentukan jaringan usaha guna memudahkan penjualan produk-produk koperasi dan anggotanya.
3. Pemerintah Daerah ikut membantu mempromosikan hasil produksi daerah
4. Anggota koperasi RT mengharapkan bahwa Pemerintah Daerah dapat membantu menyalurkan produk home industri yang dihasilkannya.
5. Mengingat masih sangat minimnya sarana dan prasarana bagi pengembangan usaha koperasi RT, maka sangat diharapkan pemerintah daerah dapat memfasilitasi sarana dan prasarana yang dapat membantu melancarkan pemasaran produk-produk koperasi dan anggotanya.

*C. Penilaian anggota mengenai kekurangan upaya pengembangan jaringan pemasaran pada pada koperasi RT*

1. Kurang penyuluhan dan pembinaan serta pelatihan keterampilan khusus bagi anggota koperasi termasuk dalam bidang pemasaran hasil produksi dan pembentukan jaringan pemasaran.
2. Pengembangan kewirausahaan masih kurang sehingga banyak anggota kesulitan mencari pasar baru
3. Masih banyak anggota koperasi yang kurang mengerti maksud koperasi, sehingga mereka kurang memanfaatkan koperasi sebagai jaringan pemasaran bagi produk-produk yang dihasilkannya
4. Koperasi RT belum dijadikan sebagai sarana berkumpul dan berembuk, sehingga anggota kurang inovatif terutama dalam menghasilkan produk baru dan pasar baru.
5. Koperasi masih belum bisa mengembangkan jaringan usaha baik bagi kepentingan koperasi itu sendiri maupun kepentingan anggotanya.

6. Koperasi belum memberikan pelayanan maksimal kepada anggotanya, sehingga banyak anggota yang merasa tidak puas.
  7. Banyak koperasi RT yang belum memiliki fasilitas komputer dan internet sehingga kesulitan untuk membangun jaringan pasar secara online.
  8. Pengetahuan pengurus yang terbatas mengenai pemasaran koperasi sehingga kesulitan membangun jaringan pemasaran koperasi.
- D. *Saran anggota terkait upaya pengembangan jaringan pemasaran pada koperasi RT*
1. Perlunya kerjasama koperasi RT dengan Pemerintah Daerah, organisasi swasta atau pihak lain dalam pengembangan koperasi RT baik melalui penyuluhan, pelatihan maupun pendampingan mulai dari pengembangan produk hingga pembentukan jaringan pemasaran bagi produk-produk yang dihasilkan anggota koperasi RT.
  2. Perlu pelatihan kewirausahaan bagi anggota koperasi dan para pengurus untuk memacu munculnya inovasi-inovasi dalam produk maupun pasar.
  3. Pengurus hendaknya lebih aktif dalam berkomunikasi dengan pemerintah untuk mencari informasi mengenai perkembangan ekonomi dan peluang pasar yang dapat dimasuki.
  4. Pengurus koperasi harus aktif dalam mencari terobosan usaha baru yang berguna bagi anggota koperasi RT.
  5. Perlu ditingkatkan kepedulian Pemerintah Daerah, khususnya dari Dinas Perkoperasian dalam mencari pasar baru dan pembentukan jaringan pemasaran yang lebih luas.
  6. Pemerintah perlu memfasilitasi anggota koperasi untuk studi banding ke koperasi lain yang memiliki jaringan pemasaran yang baik.

#### **4.3.6 Pemberdayaan Teknologi Informasi**

Pemberdayaan teknologi dan informasi merupakan upaya untuk mendorong sumber daya koperasi dalam memanfaatkan teknologi untuk

membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan menyebarkan informasi tentang koperasi. Teknologi informasi ini sangat penting bagi koperasi untuk membuat jaringan yang luas dengan pihak luar melalui sistem online. Pemberdayaan Teknologi dan Informasi yang dilakukan antara lain penyediaan perangkat keras, penyediaan perangkat lunak, penyediaan sistem jaringan, dan optimalisasi fungsi dan sasaran penggunaan teknologi dan jaringan. Proses pemberdayaan yang telah dilakukan mendapatkan respon yang cukup baik dari anggota koperasi. Hal ini bisa ditunjukkan dari nilai indeks yang cukup untuk beberapa instrumen pemberdayaan dan variabel pemberdayaan teknologi dan informasi, yakni antara 4 – 7,00 atau berada dalam katagori nilai indeks sedang.

Tabel 4.20 : Nilai Indeks instrumen dan variabel pemberdayaan teknologi dan informasi

No	Item Pertanyaan	Nilai Indeks
1	Beberapa pihak (seperti Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi, Perguruan Tinggi, LSM, dll) telah <i>mendorong</i> kami untuk memanfaatkan teknologi computer	5.538
2	Beberapa pihak (seperti Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi, Perguruan Tinggi, LSM, dll) telah <i>mengajari</i> kami menggunakan teknologi computer	5.423
3	Beberapa pihak (seperti Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi, Perguruan Tinggi, LSM, dll) telah mengajari kami tentang <i>penggunaan perangkat lunak komputer</i> (seperti penggunaan program Excel) dalam setiap transaksi keuangan koperasi RT	5.449
4	Beberapa pihak (seperti Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi, Perguruan Tinggi, LSM, dll) telah mengajari kami tentang penggunaan dan pemanfaatan teknologi <i>internet</i>	5.237
5	Beberapa pihak (seperti Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi, Perguruan Tinggi, LSM, dll) telah mendorong kami menggunakan transaksi secara online	5.301
6	Beberapa pihak telah membantu kami dalam mendayagunakan jaringan pasar online untuk mengembangkan pasar terbuka	5.083
7	Beberapa pihak (seperti Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi, Perguruan Tinggi, LSM, dll) telah membantu kami dalam membentuk jaringan usaha dan perdagangan produk yang dihasilkan secara online (misal pasar online)	5.083
Nilai Indeks Pemberdayaan Teknologi dan Informasi		5.302

Sumber : Data primer yang diolah, hasil printout komputer, 2012.

Bila mengacu pada instrumen atau item pertanyaan yang diajukan, maka dapat diketahui bahwa beberapa pihak (seperti Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi, Perguruan Tinggi, LSM, dll) belum banyak mendorong dan mengajari anggota koperasi RT dalam memanfaatkan teknologi komputer terutama pemanfaatan *perangkat lunak komputer* dan teknologi internet. Pihak-pihak yang dimaksud juga belum banyak mendorong anggota koperasi RT untuk membentuk dan memanfaatkan jaringan usaha secara online, serta memanfaatkan transaksi secara online dalam perdagangan produk yang dihasilkan anggotanya

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari jawaban kuesioner terbuka mengenai harapan anggota dari koperasi, harapan anggota atas peran serta pemerintah daerah, kekurangan koperasi RT dan saran anggota terkait dengan pemberdayaan teknologi dan informasi ini disarikan sebagai berikut :

*A. Harapan anggota dari upaya pemberdayaan teknologi dan informasi pada koperasi RT*

1. Koperasi RT dapat dijadikan media belajar dan pencarian informasi
2. Koperasi dapat menjadi ajang pengembangan keterampilan anggota, termasuk di dalamnya keterampilan mengoperasikan komputer dan internet.
3. Koperasi RT diharapkan menjadi sumber informasi usaha bagi anggotanya, sehingga pengetahuan mengenai teknologi dan informasi sudah merupakan keharusan.
4. Melalui gerakan koperasi RT dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, diharapkan koperasi mampu mempromosikan produk daerah

*B. Harapan anggota dari peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan teknologi dan informasi pada koperasi RT*

1. Pemerintah Daerah ikut membantu memfasilitasi pelatihan-pelatihan keterampilan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
2. Pemerintah Daerah membantu penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi

3. Pemerintah Daerah ikut membantu pembentukan jaringan usaha yang dibentuk secara online

C. *Penilaian anggota mengenai kekurangan upaya pemberdayaan teknologi dan informasi pada koperasi RT*

1. Koperasi belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk kemajuan koperasi, termasuk komputer dan internet, padahal sarana ini penting untuk mengembangkan jaringan usaha yang lebih luas.
2. Kualitas sumber daya manusia yang masih, baik anggota maupun pengurus. Pada umumnya mereka belum menguasai teknologi dan informasi.
3. Masih banyak anggota yang belum mendapatkan pelatihan keterampilan, termasuk pelatihan penggunaan teknologi dan informasi.
4. Jaringan usaha koperasi belum terbentuk. Hal ini terjadi karena kualitas SDM yang rendah dalam penguasaan teknologi dan informasi.
5. Koperasi RT tidak memiliki alat-alat komunikasi yang memadai sehingga sulit mengembangkan sayap usaha ke daerah yang lebih luas.
6. Pemerintah belum secara maksimal memberikan sentuhan-sentuhan teknologi dan informasi kepada pengurus dan anggota koperasi.
7. Sampai saat ini masih banyak koperasi yang belum memanfaatkan internet sebagai sarana pengembangan usaha.
8. Masih banyak koperasi RT yang melakukan transaksi secara manual, belum memanfaatkan teknologi komputer, apalagi internet

D. *Saran anggota terkait upaya pemberdayaan teknologi dan informasi pada koperasi RT*

1. Peningkatan kualitas SDM anggota dan pengurus koperasi melalui pelatihan-pelatihan keterampilan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
2. Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengadaan sarana kantor koperasi, termasuk di dalamnya bantuan komputer dan internet.
3. Pengurus hendaknya aktif berkomunikasi dengan pemerintah untuk mencari informasi terbaru yang berguna bagi pengembangan usaha

anggota, termasuk informasi mengenai perkembangan baru mengenai teknologi dan informasi. Hal ini penting untuk memantau posisi persaingan di pasar yang dihadapi.

#### **4.3.7 Kinerja Pemberdayaan**

Kinerja pemberdayaan koperasi dapat dilihat dari sebuah perubahan sosial, yaitu anggota koperasi yang berdaya; mampu mengakses sumberdaya untuk mencari nafkah dan memiliki cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai kejadian-kejadian yang mempengaruhi kehidupannya. Pada penelitian ini, kinerja pemberdayaan diukur melalui, (a) perubahan dalam kemampuan anggota koperasi RT dalam merencanakan dan mengelola program pembangunan, (b) meningkatnya keterlibatan anggota koperasi RT dalam setiap proses pengembangan koperasi, dan (d) hasil serta dampak ekonomi nyata sebagai hasil kegiatan ekonomi produktif anggota koperasi.

Kinerja pemberdayaan dapat diketahui melalui perilaku anggota koperasi RT pada saat kegiatan dan setelah kegiatan pemberdayaan dilaksanakan. Meskipun terdapat beberapa instrumen yang menunjukkan kinerja pemberdayaan dalam katagori cukup atau sedang, terutama yang terkait dengan pemberdayaan teknologi dan informasi, namun sebagian besar dari instrumen kinerja pemberdayaan adalah sangat baik. Informasi yang tertera pada Tabel 4.21 memberikan gambaran tingkat kesuksesan pemberdayaan koperasi RT dan anggotanya. Informasi tersebut antara lain :

1. Anggota koperasi RT sering mengikuti pertemuan yang diadakan koperasinya dan aktif dalam memberikan masukan atau usul dalam pertemuan tersebut. Nampak jelas bahwa ada kepercayaan diri yang kuat dari anggota koperasi RT yang tercermin dalam keberanian berpendapat, berani berbicara di depan umum, dan sebagainya. Demikian juga banyak anggota koperasi RT yang memperbincangkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan koperasi RT diluar forum koperasi (seperti di rumah, warung, pasar, dll) bersama teman, saudara atau orang lain. Hal ini menunjukkan ada motivasi yang kuat dalam diri anggota koperasi RT untuk berperan

aktif dalam setiap kegiatan koperasi, serta mengajak orang lain untuk ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Tabel 4.21 : Nilai Indeks instrumen dan variabel kinerja pemberdayaan

No	Item Pertanyaan	Nilai Indeks
1	Saya sering ikuti pertemuan yang diadakan kegiatan koperasi RT	8.365
2	Saya sering memberikan masukan atau usul dalam pertemuan yang dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan koperasi RT	7.859
3	Saya pernah memperbincangkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan koperasi RT diluar forum koperasi bersama teman, saudara atau orang lain	7.167
4	Secara nurani saya tergerak untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan koperasi RT	8.109
5	Saya selalu mengajak orang lain untuk ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan koperasi RT	7.897
6	Saya mempunyai ide-ide baru dalam pengembangan koperasi RT	7.801
7	Saya pernah memikirkan bagaimana meningkatkan peran koperasi RT dalam memecahkan atau menanggulangi masalah kemiskinan di lingkungan sekitar anda	7.987
8	Saya suka bernegosiasi atau mengkompromikan pendapat dengan orang lain dalam menyampaikan suatu program atau usulan kegiatan koperasi RT agar dapat terlaksana	7.641
9	Saya puas dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh koperasi RT	7.904
10	Setelah mengikuti kegiatan koperasi sekarang ini, saya lebih percaya diri (berani berpendapat dan berbicara di depan umum)	7.622
11	Setelah mengikuti kegiatan-kegiatan koperasi RT, keterampilan administrasi (seperti melakukan pencatatan keluar masuknya uang, membuat surat, membuat pembukuan dan laporan keuangan, dll) saya menjadi lebih baik	7.577
12	Menurut saya, keberadaan koperasi RT memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungan kami	8.218
13	Koperasi kami memiliki tenaga yang pandai dalam mengoperasikan komputer	7.25
14	Koperasi kami aktif memanfaatkan internet untuk mendapatkan berbagai inf yang menunjang usaha	7.243
15	Koperasi RT kami mendayagunakan jaringan pasar online untuk mengembangkan pasar terbuka	5.359
16	Koperasi RT kami menggunakan jaringan komunikasi dg pihak-pihak yang berkepentingan (misal melalui blog, website, fecebook, dll).	5.308
17	Koperasi RT kami menggunakan jaringan usaha dan perdagangan produk yang dihasilkan secara online (misal pasar online)	5.051
Nilai Indeks Kinerja Pemberdayaan		7.315

Sumber : Data primer yang diolah, hasil printout komputer, 2012.

2. Banyak anggota koperasi RT yang memiliki ide atau pemikiran baru dalam pengembangan koperasi, termasuk di dalamnya memikirkan bagaimana meningkatkan peran koperasi RT dalam memecahkan atau menanggulangi masalah kemiskinan. Hal ini menunjukkan, cukup banyak anggota koperasi RT yang kreatif dan inovatif dalam pengembangan koperasi, termasuk dalam penyusunan program-program koperasi. Program-program koperasi yang terbentuk sudah merupakan hasil negosiasi dan kompromi diantara sesama anggota. Oleh karena itu sebagian besar anggota koperasi RT merasa puas terhadap hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh koperasi RT, dan benar-benar merasakan manfaat atas keberadaan koperasi RT tersebut.
3. Setelah mengikuti pemberdayaan koperasi, sebagian besar anggota koperasi RT mampu meningkatkan keterampilan administrasi (seperti melakukan pencatatan keluar masuknya uang, membuat surat, membuat pembukuan dan laporan keuangan, dll).
4. Meskipun koperasi kami memiliki tenaga yang pandai dalam mengoperasikan komputer dan internet, namun masih belum memanfaatkannya untuk pengembangan pasar online atau pembentukan jaringan komunikasi dg pihak-pihak yang berkepentingan (misal melalui blog, website, fecebook, dll).

#### **4.4 Analisis Diskriminan Faktor-Faktor Penentu Kinerja Pemberdayaan Koperasi RT**

Model analisis diskriminan memiliki ciri khusus bahwa *data variabel dependen harus berupa data kategori (non metrik)*, sedangkan *data independen berupa data non kategori (metrik)*. Tujuan dari analisis diskriminan adalah untuk mengetahui perbedaan yang jelas antar grup pada variabel dependen dan jika ada perbedaan, variabel independen manakah pada fungsi diskriminan yang membuat perbedaan tersebut, serta melakukan klasifikasi terhadap obyek ke dalam kelompok (grup). Melalui analisis diskriminan, kita dapat membuat sebuah model seperti regresi yaitu satu variabel terikat (*dependent*) dan banyak variabel bebas (*independent*). Prinsip

utama dari analisis ini tidak lain adalah *membuat model yang dapat secara jelas menunjukkan perbedaan (diskriminasi) antar isi variabel dependen.*

Analisis diskriminan terhadap faktor-faktor penentu efektivitas pemberdayaan koperasi (kinerja pemberdayaan) dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan katagori efektivitas pemberdayaan kedalam pemberdayaan yang efektif (kode 1) dan pemberdayaan yang kurang efektif (kode 0). Pada penelitian ini kinerja pemberdayaan (variabel dependent) diukur melalui 17 indikator yang telah dinyatakan valid dan reliabel dalam uji validitas dan reliabilitas. Skor dari masing-masing indikator dijumlahkan sehingga menghasilkan nilai kinerja pemberdayaan koperasi. Nilai kinerja pemberdayaan tersebut dihitung rata-ratanya dan berdasarkan nilai rata-rata tersebut katagori efektivitas pemberdayaan dapat dibuat. Katagori pemberdayaan yang kurang efektif (kode 0) adalah skor kinerja pemberdayaan yang berada di bawah nilai rata-rata, sedangkan katagori pemberdayaan yang efektif (kode 1) adalah yang berada di atas nilai rata-rata.

Variabel independent atau variabel yang hendak diduga sebagai penentu efektivitas pemberdayaan (kinerja pemberdayaan) terdiri dari 6 (enam) variabel. Keenam variabel tersebut adalah pemberdayaan kelembagaan, peningkatan akses koperasi terhadap sumber pendanaan, pemberdayaan sumber daya koperasi, pemberdayaan bidang produksi, pengembangan jaringan pemasaran, dan pemberdayaan teknologi dan informasi. Masing-masing variabel independent diukur dengan indikator-indikator yang sudah dinyatakan valid dan reliabel dalam uji validitas dan reliabilitas. Cara menghitung nilai variabel independent dilakukan dengan menjumlahkan skor indikator dari variabel yang dimaksud. Nilai total inilah yang dipakai dalam perhitungan analisis diskriminan.

#### **4.4.1 Pengelompokan Anggota Koperasi RT berdasarkan Kinerja Pemberdayaan**

Setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat akan mendapatkan tanggapan beragam dari anggota masyarakat yang diberdayakan.

Pemberdayaan akan dirasakan efektif bila melalui pemberdayaan itu terjadi perubahan perilaku positif dari sebagian besar masyarakat yang diberdayakan. Sebaliknya, pemberdayaan akan dirasakan kurang efektif bila melalui pemberdayaan itu tidak terjadi perubahan positif dari sebagian besar anggota masyarakat yang diberdayakan atau walaupun terdapat perubahan perilaku, perubahan itu sangatlah kecil.

Pada penelitian ini kinerja pemberdayaan dikelompokkan menjadi pemberdayaan yang efektif (kode 1) dan pemberdayaan yang kurang efektif (kode 0). Hasil printout SPSS mengenai perbedaan rata-rata antara kelompok anggota koperasi yang menganggap pemberdayaan koperasi efektif dan kelompok anggota yang menganggap pemberdayaan koperasi kurang efektif terlihat pada Tabel 4.21. Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 156 anggota koperasi sampel terlihat 87 anggota yang menganggap pemberdayaan kurang efektif dan 69 anggota koperasi RT yang menganggap pemberdayaan efektif. Tabel tersebut juga menunjukkan perbandingan rata-rata untuk kelompok anggota yang menganggap pemberdayaan kurang efektif dan kelompok anggota yang menganggap pemberdayaan tersebut efektif. Semakin besar nilai koefisien, semakin besar peran variabel tersebut dalam menentukan kinerja pemberdayaan. Hal ini terkait dengan setting jawaban kuesioner yang dibuat, dimana skor jawaban semakin besar semakin bernilai positif, artinya semakin berperan dalam pembentukan kinerja pemberdayaan koperasi. Deskripsi perbandingan kelompok anggota yang menganggap pemberdayaan kurang efektif dan anggota yang menganggap pemberdayaan efektif adalah sebagai berikut :

#### 1. Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi

Rata-rata skor pemberdayaan kelembagaan koperasi untuk kelompok anggota koperasi yang menganggap pemberdayaan kurang efektif (77,23) lebih rendah dari rata-rata skor untuk kelompok anggota koperasi yang menganggap kinerja pemberdayaan efektif (90,04). Hal ini menunjukkan bahwa kelompok anggota yang menganggap pemberdayaan koperasi efektif memiliki sikap yang lebih positif dan baik terhadap kebijakan

pemberdayaan kelembagaan, dibanding dengan kelompok anggota koperasi yang menganggap pemberdayaan kurang efektif. Dalam pengertian lain, kelompok anggota koperasi yang menganggap pemberdayaan koperasi efektif, pemberdayaan kelembagaan koperasi dianggap sebagai faktor yang memiliki peran lebih besar dalam menentukan kinerja pemberdayaan dibanding dengan kelompok anggota yang menganggap pemberdayaan koperasi kurang efektif.

## 2. Peningkatan Akses Koperasi Terhadap Sumber Pendanaan

Rata-rata skor peningkatan akses koperasi terhadap sumber pendanaan untuk kelompok anggota koperasi yang menganggap pemberdayaan kurang efektif (44,17) lebih rendah dari rata-rata skor untuk kelompok anggota koperasi yang menganggap kinerja pemberdayaan efektif (51,03). Hal ini menunjukkan bahwa kelompok anggota yang menganggap pemberdayaan koperasi efektif memiliki sikap yang lebih positif dan baik terhadap aktivitas peningkatan akses koperasi terhadap sumber pendanaan, dibanding dengan kelompok anggota koperasi yang menganggap pemberdayaan kurang efektif. Dalam pengertian lain, kelompok anggota koperasi yang menganggap pemberdayaan koperasi efektif, peningkatan akses koperasi terhadap sumber pendanaan dianggap sebagai faktor yang memiliki peran lebih besar dalam menentukan kinerja pemberdayaan (efektivitas pemberdayaan) dibanding dengan kelompok anggota yang menganggap pemberdayaan koperasi kurang efektif.

## 3. Pemberdayaan Sumber Daya Koperasi

Rata-rata skor pemberdayaan sumber daya koperasi untuk kelompok anggota koperasi yang menganggap pemberdayaan kurang efektif (41,02) lebih rendah dari rata-rata skor untuk kelompok anggota koperasi yang menganggap kinerja pemberdayaan efektif (48,93). Hal ini menunjukkan bahwa kelompok anggota yang menganggap pemberdayaan koperasi efektif memiliki sikap yang lebih positif dan baik terhadap pemberdayaan sumber daya koperasi, dibanding dengan kelompok anggota koperasi yang menganggap pemberdayaan kurang efektif. Dalam pengertian lain,

kelompok anggota koperasi yang menganggap pemberdayaan koperasi efektif, pemberdayaan sumber daya koperasi dianggap sebagai faktor yang memiliki peran lebih besar dalam menentukan kinerja pemberdayaan (efektivitas pemberdayaan) dibanding dengan kelompok anggota yang menganggap pemberdayaan koperasi kurang efektif.

#### 4. Pemberdayaan Bidang Produksi

Rata-rata skor pemberdayaan bidang produksi untuk kelompok anggota koperasi yang menganggap pemberdayaan kurang efektif (47,89) lebih rendah dari rata-rata skor untuk kelompok anggota koperasi yang menganggap kinerja pemberdayaan efektif (54,91). Hal ini menunjukkan bahwa kelompok anggota yang menganggap pemberdayaan koperasi efektif memiliki sikap yang lebih positif dan baik terhadap pemberdayaan bidang produksi, dibanding dengan kelompok anggota koperasi yang menganggap pemberdayaan kurang efektif. Dalam pengertian lain, kelompok anggota koperasi yang menganggap pemberdayaan koperasi efektif, pemberdayaan bidang produksi dianggap sebagai faktor yang memiliki peran lebih besar dalam menentukan kinerja pemberdayaan (efektivitas pemberdayaan) dibanding dengan kelompok anggota yang menganggap pemberdayaan koperasi kurang efektif.

#### 5. Pengembangan Jaringan Pemasaran

Rata-rata skor pengembangan jaringan pemasaran untuk kelompok anggota koperasi yang menganggap pemberdayaan kurang efektif (40,83) lebih rendah dari rata-rata skor untuk kelompok anggota koperasi yang menganggap kinerja pemberdayaan efektif (48,75). Hal ini menunjukkan bahwa kelompok anggota yang menganggap pemberdayaan koperasi efektif memiliki sikap yang lebih positif dan baik terhadap pengembangan jaringan pemasaran, dibanding dengan kelompok anggota koperasi yang menganggap pemberdayaan kurang efektif. Dalam pengertian lain, kelompok anggota koperasi yang menganggap pemberdayaan koperasi efektif, pengembangan jaringan pemasaran dianggap sebagai faktor yang memiliki peran lebih besar dalam menentukan kinerja pemberdayaan

(efektivitas pemberdayaan) dibanding dengan kelompok anggota yang menganggap pemberdayaan koperasi kurang efektif.

Tabel 4.22 : Hasil perhitungan perbedaan rata-rata antar group pemberdayaan kurang efektif dan pemberdayaan efektif

Group Statistics					
Kinerja Pemberdayaan		Mean	Std. Deviation	Valid N (listwise)	
				Unweighted	Weighted
Kurang efektif	Kelembagaan	77.23	11.957	87	87.000
	Sumber Pendanaan	44.17	9.034	87	87.000
	Sumber Daya	41.02	7.981	87	87.000
	Bidang Produksi	47.89	10.377	87	87.000
	Jaringan Pemasaran	40.83	15.481	87	87.000
	Teknologi & Informasi	30.15	14.593	87	87.000
Efektif	Kelembagaan	90.04	8.366	69	69.000
	Sumber Pendanaan	51.03	5.171	69	69.000
	Sumber Daya	48.93	6.098	69	69.000
	Bidang Produksi	54.91	7.918	69	69.000
	Jaringan Pemasaran	48.75	11.944	69	69.000
	Teknologi & Informasi	45.90	15.464	69	69.000
Total	Kelembagaan	82.90	12.280	156	156.000
	Sumber Pendanaan	47.21	8.287	156	156.000
	Sumber Daya	44.52	8.196	156	156.000
	Bidang Produksi	50.99	9.976	156	156.000
	Jaringan Pemasaran	44.33	14.531	156	156.000
	Teknologi & Informasi	37.12	16.871	156	156.000

Sumber : Data primer yang diolah, hasil print out komputer, 2012.

## 6. Pemberdayaan Teknologi dan Informasi

Rata-rata skor pemberdayaan teknologi dan informasi untuk kelompok anggota koperasi yang menganggap pemberdayaan kurang efektif (30,15) lebih rendah dari rata-rata skor untuk kelompok anggota koperasi yang menganggap kinerja pemberdayaan efektif (45,90). Hal ini menunjukkan bahwa kelompok anggota yang menganggap pemberdayaan koperasi efektif memiliki sikap yang lebih positif dan baik terhadap pemberdayaan teknologi dan informasi, dibanding dengan kelompok anggota koperasi yang menganggap pemberdayaan kurang efektif. Dalam pengertian lain, kelompok anggota koperasi yang menganggap pemberdayaan koperasi efektif, pemberdayaan teknologi dan informasi dianggap sebagai faktor yang memiliki peran lebih besar dalam menentukan kinerja pemberdayaan

(efektivitas pemberdayaan) dibanding dengan kelompok anggota yang menganggap pemberdayaan koperasi kurang efektif.

#### 4.4.2 Uji Beda Rata-rata Kelompok Anggota Dengan Pemberdayaan Efektif dan Kurang Efektif

Untuk menguji apakah benar-benar terjadi perbedaan yang nyata antar kelompok variabel independent yang diteliti digunakan *test of equality group means* dengan menggunakan uji F. Jika nilai F menghasilkan nilai probabilitas (nilai sig) lebih besar dari 0,05 maka tidak ada perbedaan antar kelompok, sebaliknya bila nilai probabilitas (nilai sig) kurang dari 0,05 maka ada perbedaan antar kelompok.

Tabel 4.23 : Hasil uji beda antar group masing-masing variable

Tests of Equality of Group Means					
	Wilks' Lambda	F	df1	df2	Sig.
Kelembagaan	.730	57.052	1	154	.000
Sumber Pendanaan	.830	31.529	1	154	.000
Sumber Daya	.769	46.246	1	154	.000
Bidang Produksi	.877	21.643	1	154	.000
Jaringan Pemasaran	.926	12.282	1	154	.001
Teknologi & Informasi	.784	42.512	1	154	.000

Sumber : Data primer yang diolah, hasil print out komputer, 2012.

Bila melihat dari hasil printout komputer (Tabel 4.22), maka nilai sig untuk semua variabel independent berada di bawah 0,05. Hal ini memang terdapat perbedaan secara nyata antar kelompok diantara ke-enam variabel independen tersebut. Kelompok anggota koperasi yang menganggap pemberdayaan efektif memang benar-benar dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap pemberdayaan kelembagaan, peningkatan akses koperasi terhadap sumber pendanaan, pemberdayaan sumber daya koperasi, pemberdayaan bidang produksi, pengembangan jaringan pemasaran, dan pemberdayaan teknologi dan informasi. Ada keyakinan bahwa apabila kelembagaan koperasi diperbaiki, akses koperasi terhadap sumber

pendanaan dipermudah, sumber daya koperasi dikembangkan, bidang produksi dikembangkan, jaringan pemasaran diperluas, dan pengetahuan teknologi dan informasi ditingkatkan, kinerja pemberdayaan akan lebih meningkat. Anggota koperasi akan merasakan bahwa pemberdayaan kelembagaan, peningkatan akses terhadap sumber pendanaan, pemberdayaan sumber daya koperasi, pemberdayaan bidang produksi, pengembangan jaringan pemasaran dan pemberdayaan teknologi dan informasi benar-benar memberi dampak bagi perkembangan koperasi RT.

#### 4.4.3 Variabel yang masuk dalam persamaan

Berdasarkan tabel *variables entered / removed* diketahui bahwa hanya 3 (tiga) variabel yang dapat dimasukkan pada persamaan diskriminan. Ketiga variabel tersebut adalah pemberdayaan kelembagaan, pemberdayaan teknologi dan informasi dan pengembangan jaringan pemasaran. Dengan demikian, berdasarkan analisis diskriminan efektif tidaknya suatu pemberdayaan koperasi dipengaruhi oleh sikap anggota koperasi RT dalam merespon pemberdayaan kelembagaan, pemberdayaan teknologi dan informasi, dan pengembangan jaringan pemasaran. Sementara itu, variabel-variabel yang lain seperti pemberdayaan bidang produksi, peningkatan akses terhadap sumber pendanaan dan pemberdayaan sumber daya koperasi bukanlah variabel yang mempengaruhi kinerja pemberdayaan.

Tabel 4.24 : Hasil perhitungan untuk mendapatkan variabel yang digunakan dalam persamaan diskriminan

Variables Entered/Removed <sup>a,b,c,d</sup>							
Step	Entered	Min. D Squared					
		Statistic	Between Groups	Exact F			
				Statistic	df1	df2	Sig.
1	Kelembagaan	1.483	Tidak efektif and Efektif	57.052	1	154.000	3.511E-12
2	Teknologi & Informasi	2.092	Tidak efektif and Efektif	39.995	2	153.000	1.066E-14
3	Jaringan Pemasaran	2.509	Tidak efektif and Efektif	31.769	3	152.000	5.325E-16

Sumber : Data primer yang diolah, hasil print out komputer, 2012.

Kemudian, berdasarkan perhitungan *Eigenvalue* yang menghasilkan canonical correlation sebesar 0,621 atau koefisien determinasi sebesar 0,3856 (38,56%) diketahui bahwa 38,56 persen dari variable kinerja pemberdayaan dapat dijelaskan oleh model diskriminan yang terbentuk, yakni hanya oleh 3 (tiga) variable, yaitu pemberdayaan kelembagaan, pemberdayaan teknologi dan informasi dan pengembangan jaringan pemasaran. Sisanya, sebesar 61,44 persen dijelaskan oleh variabel lain yang berada di luar model.

Tabel 4.25 :Hasil perhitungan Eigenvalue dan Canonical Correlation

Eigenvalues				
Function	Eigenvalue	% of Variance	Cumulative %	Canonical Correlation
1	.627 <sup>a</sup>	100.0	100.0	.621

Sumber : Data primer yang diolah, hasil print out computer, 2012

Kemudian berdasarkan perhitungan Wilks' Lambda yang menghasilkan nilai Wilks' Lambda sebesar 0,615 dan Chi-square sebesar 74,230 dengan angka probabilitas (sig) sebesar 0,000 yang lebih rendah dari 0,05 diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok (anggota yang menganggap pemberdayaan kurang efektif dan yang menganggap efektif) pada model diskriminan. Dengan demikian perilaku kelompok anggota koperasi yang menganggap pemberdayaan koperasi efektif memang berbeda dengan perilaku kelompok anggota yang menganggap pemberdayaan kurang efektif.

Tabel 4.26 : Hasil perhitungan Wilks' Lambda

Wilks' Lambda				
Test of Function(s)	Wilks' Lambda	Chi-square	df	Sig.
1	.615	74.230	3	.000

Sumber : Data primer yang diolah, hasil print out computer, 2012

#### 4.4.4 Dominansi Faktor-Faktor Penentu Kinerja Pemberdayaan

Dari 6 variabel independen yang dianggap sebagai penentu kinerja pemberdayaan koperasi, hanya 3 variabel yang menentukan kinerja

pemberdayaan koperasi. Ketiga variabel tersebut adalah pemberdayaan kelembagaan, pemberdayaan teknologi dan informasi dan pengembangan jaringan pemasaran. 3 variabel lain yakni pemberdayaan bidang produksi, peningkatan akses terhadap sumber pendanaan dan pemberdayaan sumber daya koperasi tidak memenuhi syarat masuk model diskriminan. Urutan mana yang paling dominan mempengaruhi kinerja pemberdayaan koperasi diantara ketiga variabel tersebut dapat diketahui dengan meneliti nilai function dan struktur matrix dari model analisis diskriminan.

Tabel 4.27 : Hasil perhitungan Struktur Matrik

Structure Matrix	
	Function
	1
Kelembagaan	.769
Sumber Pendanaan <sup>a</sup>	.705
Teknologi & Informasi	.664
Sumber Daya <sup>a</sup>	.572
Bidang Produksi <sup>a</sup>	.495
Jaringan Pemasaran	.357

Sumber : Hasil print out computer, 2012.

Pada struktur matrix terlihat bahwa variable-variabel yang memiliki tanda “a” adalah variable yang tidak dapat digunakan dalam analisis diskriminan, sementara variable lainnya yang tidak memiliki tanda “a” adalah variable yang diperhitungkan dalam model analisis diskriminan. Ketiga variable yang diperhitungkan tersebut adalah pemberdayaan kelembagaan, pemberdayaan teknologi dan informasi dan pengembangan jaringan pemasaran. Dengan mengurutkan besarnya koefisien dari ketiga variabel tersebut berdasarkan urutan besarnya dapat diketahui variabel mana saja yang paling dominan menentukan kinerja pemberdayaan koperasi RT. Berikut urutan besarnya koefisien variabel yang terpilih :

Tabel 4.28 : Urutan dominansi variable penentu kinerja pemberdayaan Koperasi RT

Variabel	Besar Koefisien
Pemberdayaan kelembagaan	0,769
Pemberdayaan teknologi dan informasi	0,705
Pengembangan jaringan pemasaran	0,357

Sumber : Data primer yang diolah, 2012

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemberdayaan atau efektivitas pemberdayaan koperasi sangat sensitif terhadap dua variable pertama yaitu pemberdayaan kelembagaan dan pemberdayaan teknologi informasi. Meskipun demikian, variable pemberdayaan kelembagaan merupakan variable yang paling membedakan (*discriminant the most*) dalam pengertian pemberdayaan kelembagaan merupakan factor yang paling membedakan sebuah pemberdayaan koperasi tersebut efektif atau kurang efektif. Pemberdayaan teknologi dan informasi merupakan variable pembeda penting urutan berikutnya. Variabel pembeda berikutnya adalah pengembangan jaringan pemasaran (*discriminant the least*). Variabel terakhir ini merupakan factor pembeda penting yang tetap perlu diperhatikan dalam meningkatkan efektivitas pemberdayaan, meskipun tingkat kepentingannya masih berada di bawah pemberdayaan kelembagaan dan pemberdayaan teknologi dan informasi. Dengan demikian jika sasaran pemberdayaan koperasi RT adalah meningkatkan efektivitas pemberdayaan (kinerja pemberdayaan), maka pihak-pihak yang berkepentingan seperti Manajemen koperasi itu sendiri, Pemerintah, Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga tertentu yang berminat mengembangkan koperasi RT di Kab. Wonogiri, factor utama yang perlu dikembangkan adalah pemberdayaan kelembagaan, baru kemudian pemberdayaan teknologi dan informasi pada tahap berikutnya. Pengembangan jaringan pemasaran juga penting untuk dikembangkan, namun tingkat kepentingannya masih lebih rendah dibanding kedua factor di atas.

#### 4.4.5 Validitas Model Diskriminan

Validasi model diskriminan diperlukan untuk menentukan apakah model diskriminan yang terbentuk benar-benar valid atau tidak. Jika model yang terbentuk adalah valid, berarti benar-benar model ini bisa digunakan untuk memprediksi kinerja pemberdayaan koperasi RT.

Berdasarkan tabel *Classification Results* diketahui bahwa pada bagian original terlihat kelompok anggota koperasi RT yang pada data awal menganggap pemberdayaan kurang efektif sebanyak 87 anggota dan dari model diskriminan tetap pada kelompok anggota yang menganggap pemberdayaan kurang efektif sebanyak 66 anggota koperasi. Sedangkan dengan model diskriminan, mereka yang awalnya masuk kelompok anggota yang menganggap pemberdayaan kurang efektif ternyata menjadi anggota kelompok anggota koperasi RT yang menganggap pemberdayaan efektif sebanyak 21 anggota. Demikian juga dengan kelompok anggota yang menganggap pemberdayaan koperasi efektif, yang tetap berada pada kelompok anggota yang menganggap pemberdayaan efektif sebanyak 60 anggota koperasi dan yang menjadi kelompok anggota yang menganggap kinerja pemberdayaan kurang efektif sebanyak 9 anggota. Dengan demikian ketepatan prediksi dari model ini adalah :  $(66 + 60) / 156 = 0,8077$  atau 80,77 %. Angka ketepatan ini cukup tinggi, sehingga model diskriminan yang dipakai di atas dapat digunakan untuk analisis diskriminan. Dengan kata lain penafsiran terhadap beberapa table yang dihasilkan dari analisis diskriminan yang dicantumkan di atas adalah valid untuk digunakan. Selain itu, berdasarkan metode *Leave-one-out cross validation* diketahui angka ketepatan klasifikasi data ke grup sebesar 80,8 % yang cukup tinggi sehingga model ini dapat digunakan untuk analisis diskriminan.

Arti penting dari hasil penelitian ini adalah faktor yang paling menentukan kinerja pemberdayaan koperasi RT adalah pemberdayaan kelembagaan, pengembangan jaringan pemasaran dan pemberdayaan teknologi dan informasi. Ketiga variabel tersebut harus menjadi prioritas dalam pemberdayaan koperasi RT. Prioritas pertama dalam pemberdayaan adalah pemberdayaan kelembagaan. Pemberdayaan kelembagaan tersebut

dapat dilakukan dengan cara masih tetap menganjurkan masyarakat untuk mendirikan koperasi bagi warga RT yang belum memiliki koperasi, aktif mensosialisasikan aturan main penyelenggaraan koperasi RT, mempermudah perijinan dan perolehan badan hukum, memberikan kemudahan untuk menjadi anggota koperasi RT, aktif menganjurkan anggota masyarakat untuk memanfaatkan koperasi sebagai sarana pengembangan usaha mikro miliknya, aktif membantu pengembangan usaha koperasi RT dan anggotanya, Pemerintah Daerah tetap berkomitmen dan termotivasi untuk membangkitkan peran koperasi dalam perekonomian daerah melalui pengembangan koperasi, dan ikut aktif menjembatani hubungan usaha mikro anggota koperasi dengan perusahaan-perusahaan besar.

Prioritas yang kedua adalah pengembangan jaringan pemasaran. Pada umumnya, usaha kecil dan menengah, terutama di pedesaan tidak memiliki jaringan pemasaran yang kuat. Mereka mampu membuat produk dalam jumlah yang cukup banyak, tapi mengalami kesulitan dalam pemasaran. Oleh karena itu, faktor yang terpenting bagi mereka adalah menemukan pasar baru yang lebih luas. Oleh karena keterbatasan sumber daya koperasi dalam pencarian pasar baru dan pembentukan jaringan pemasaran, maka pemilik usaha kecil dan usaha mikro di pedesaan perlu dibantu oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Pemerintah Daerah beserta jajaran instansi yang terkait, BUMN dan BUMS, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, maupun perguruan tinggi.

Pemberdayaan mengenai pengembangan jaringan pemasaran koperasi RT dan anggotanya dapat dilakukan dengan cara ikut aktif dalam membantu mempromosikan dan memasarkan hasil produksi koperasi RT dan anggotanya, aktif dalam mengembangkan sarana pemasaran hasil produksi koperasi (misal gedung pameran, perbaikan pasar, tempat berjualan, dll), aktif mengikutsertakan anggota koperasi RT dalam pameran-pameran produk yang dihasilkan koperasi dan anggotanya, aktif mendorong anggota koperasi untuk menjadikan koperasi sebagai jaringan pemasaran bagi produk-produknya, dan aktif membantu pembentukan jaringan usaha guna memudahkan penjualan produk-produk koperasi dan anggotanya. Prioritas

ketiga adalah pemberdayaan teknologi dan informasi. Pemberdayaan ini diperlukan mengingat masih banyak koperasi RT yang belum memiliki komputer, SDM-nya belum familier dengan komputer dan apalagi dengan internet. Di samping itu, pemberdayaan teknologi dan informasi tersebut penting untuk menghindari keterpurukan akibat tidak mampu bersaing dalam era global. Pemberdayaan ini dapat dilakukan dengan cara penyediaan perangkat keras, penyediaan perangkat lunak, penyediaan sistem jaringan, dan optimalisasi fungsi dan sasaran penggunaan teknologi dan jaringan, mendorong dan mengajari anggota koperasi RT dalam memanfaatkan teknologi komputer terutama pemanfaatan *perangkat lunak komputer* dan teknologi internet, serta fasilitasi dan aktifkan pelatihan-pelatihan mengenai pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mempromosikan produk dan membentuk jaringan usaha online.

Tabel 4.29 : Hasil perhitungan Classification Results analisis diskriminan

Classification Results <sup>b,c</sup>					
		Kinerja Pemberdayaan	Predicted Group Membership		Total
			Kurang efektif	Efektif	
Original	Count	Kurang efektif	66	21	87
		Efektif	9	60	69
	%	Kurang efektif	75.9	24.1	100.0
		Efektif	13.0	87.0	100.0
Cross-validated <sup>a</sup>	Count	Kurang efektif	66	21	87
		Efektif	9	60	69
	%	Kurang efektif	75.9	24.1	100.0
		Efektif	13.0	87.0	100.0
a. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by the functions derived from all cases other than that case.					
b. 80.8% of original grouped cases correctly classified.					
c. 80.8% of cross-validated grouped cases correctly classified.					

Sumber : Data primer yang diolah, hasil print out computer, 2012.

Pemberdayaan bidang produksi, peningkatan akses terhadap sumber pandanaan koperasi dan pemberdayaan sumber daya bukan berarti tidak penting dalam pemberdayaan koperasi RT, tetapi pemberdayaan ini bisa jadi sudah biasa dilakukan atau belum sama sekali dilaksanakan sehingga respon terhadap kuesioner yang ditanyakan relatif seragam.

Koperasi RT sebagai unit usaha yang bergerak dibidang ekonomi dan sosial pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang merupakan sasaran utama pembangunan ekonomi. Perubahan tingkat produktivitas dan pendapatan anggota koperasi RT hanya mungkin dicapai bila faktor-faktor produksi yang ada dikombinasikan dengan cara baru, artinya merubah fungsi produksi, melalui jalan kegiatan inovatif (penciptaan pengetahuan baru dan penerapannya), dan melalui kegiatan peningkatan kegiatan kerja (berprestasi lebih banyak dalam satuan waktu kerja tetap dan atau waktu kerja yang diperpanjang).

Menurut Ropke (1992), dalam melaksanakan kegiatan inovatif tersebut, seorang wirausaha koperasi dihadapkan pada kendala sebagai berikut :

1. kemungkinan bertindak yang bercorak inovatif tidak selalu merupakan kemungkinan yang diijinkan menurut hukum,
2. kemungkinan-kemungkinan inovatif yang diperbolehkan harus ditemukan dan kemudian dilaksanakan penerapannya. Untuk itu diperlukan kemampuan (kompetensi) personal dan organisatoris,
3. walaupun kemungkinan inovasi tertentu tidak terlarang dan masih dalam rangka kesanggupan seseorang atau kelompok, maka perseorangan atau kelompok itu perlu memiliki motivasi untuk menerapkan inovasi itu.

Ropke (1992) selanjutnya menjelaskan bahwa tindakan inovasi oleh seorang wirausaha dapat dikatakan merupakan fungsi dari hak-hak bertindak (*property righ* = PR), kesanggupan atau kemampuan (*competency* = C) dan kemauan

atau motivasi untuk berprestasi (*motivation* = M). Jadi jika dituliskan dalam sebuah fungsi, terlihat sebagai berikut :

$$I = f (PR, C, M)$$

Hak bertindak (*property righ* = PR) diartikan sebagai kemungkinan bertindak dalam kelompok-kelompok yang tidak terlarang. Hak bertindak meliputi berbagai pembatasan normatif terhadap tindakan, disamping peraturan-peraturan hukum abstrak yang dikodifikasikan, juga nilai-nilai sosial budaya, etika, agama, ketentuan-ketentuan konkrit, dan peraturan-peraturan pihak pengemban kekuasaan politik. Bila diterjemahkan dalam bahasa ekonomi, hak bertindak yang terlarang bertalian dengan biaya dan keuntungan tertentu. Perubahan hak bertindak selalu mencakup pembagian baru arus manfaat yang bertalian dengan kemungkinan tertentu dan dengan demikian berarti juga pembagian baru sumber ekonomi.

Perubahan hak bertindak karena rangsangan tindakan wirausaha, mempengaruhi tarap kemungkinan terjadinya inovatif, berarti akan mempengaruhi juga produktivitas faktor-faktor yang dikerahkan, imbalan faktor-faktor itu dan pembagian pendapatan atau kekayaan personal. Bila para wirausaha koperasi diberikan kebebasan bertindak (dalam arti kebebasan bertindak sepanjang tidak merugikan pihak lain) akan banyak muncul inovasi-inovasi baru yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya bila kebebasan untuk bertindak terhalang oleh berbagai peraturan, inovasi-inovasi baru sulit muncul ke permukaan.

Keberhasilan penerapan kombinasi-kombinasi baru dalam suatu periode tertentu bertalian dengan peningkatan kemampuan personal dan organisatoris. Kecenderungan individu atau organisasi untuk meningkatkan kemampuannya, juga tergantung dari rangsangan ekonomis dan harapan untuk dapat menerapkan peningkatan kemampuannya ke dalam tindakan-tindakan inovatif yang nyata. Dengan demikian hak bertindak juga

mempengaruhi orang-orang untuk meningkatkan kemampuannya, yang kalau dilihat dalam jangka panjang menjadi dasar yang menentukan potensi.

Perilaku inovasi juga memerlukan kemampuan wirausaha dalam mengembangkan dan menerapkan gagasan-gagasan baru dilingkungannya. Karena itu perilaku inovasi sangat tergantung dari kemampuan, ketrampilan, pengalaman, intuisi, kreativitas, untuk menerapkan berlakunya sesuatu yang baru.

Motivasi (*motivation*) menyebabkan suatu peristiwa mempunyai nilai, baik nilai yang positif maupun negatif. Segala aspek yang ada kaitannya dengan motivasi dalam situasi yang dialami mengandung kadar tuntutan, yang ditimbulkan oleh situasi yang relevan, artinya memberikan motivasi untuk melakukan tindakan tertentu. Misalnya, seorang terdorong untuk melakukan suatu kegiatan karena ada insentif yang diterima atas kegiatan tersebut. Semakin tinggi insentif yang diterima akan semakin besar motivasi untuk melaksanakan suatu tindakan.

Bagi wirausaha koperasi, kiranya yang paling penting adalah motivasi-motivasi dalam pencapaian hasil yaitu hasil kegiatan usaha perusahaan koperasi dan hasil kegiatan usaha perusahaan anggotanya, tentu saja hasil yang semakin besar.

Koperasi RT adalah organisasi sosial dan ekonomi yang dapat berkembang karena peran berbagai pihak, seperti pihak pemilik (Anggota), pihak manajemen (Pengurus dan Pengelola), Birokrat (Pemerintah Daerah), dan para Katalis (Peneliti, Dosen, dll).

Anggota sebagai pemilik koperasi dapat menjadi wirakop bila ia mampu menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan koperasi. Tetapi kemungkinan ini sangat lemah mengingat kebanyakan kemampuan anggota dalam inovasi masih sangat rendah, keterbatasan hak bertindak karena setiap tindakan harus memperhatikan anggota lainnya dan motivasi yang rendah. Berdasarkan hasil penelitian, anggota koperasi RT di Kab. Wonogiri masih mempunyai tingkat pendidikan

yang rendah sehingga tingkat kemampuan dalam menemukan sesuatu yang baru sangat terbatas. Disamping itu, meskipun anggota mempunyai kemampuan yang tinggi tapi motivasi untuk berprestasi di bidang koperasi akan menjadi rendah sebab manfaat dari hasil inovasi anggota yang dinikmati hanya sebagian kecil oleh anggota yang bersangkutan dan anggota yang punya usaha sebagian besar dinikmati oleh anggota lainnya, anggota potensial atau bahkan para pesaing koperasi. Dalam kondisi seperti ini, anggota yang rasional akan memanfaatkan peluang tersebut untuk kepentingan diri sendiri dengan jalan bekerja diluar koperasi.

Pada koperasi yang mengangkat manajer sebagai pelaksana dan penanggungjawab kegiatan operasional, koperasi tentu sangat mengharapkan perubahan yang memberikan keuntungan. Tetapi kendala yang dihadapi oleh manajer (pengelola) koperasi adalah keterbatasan kebebasan untuk bertindak. Keterbatasan ini karena manajer disamping dibebani peningkatan pertumbuhan usaha koperasi, tetapi juga dibebani peningkatan pelayanan terhadap anggotanya. Kedua hal tersebut kadang terjadi kontradiksi. Bila manajer menginginkan meningkatkan pertumbuhan koperasi, maka ia harus berorientasi ke pasar eksternal (melayani kebutuhan non anggota) dan ini berarti mengurangi nilai pelayanan terhadap anggotanya. Sebaliknya bila manajer menginginkan peningkatan pelayanan terhadap anggota (misal dengan memberikan harga pelayanan yang lebih rendah dibanding dengan harga pasar), maka ia tidak akan dapat meningkatkan pertumbuhan koperasi. Dalam kondisi seperti ini, kendatipun manajer mempunyai kemampuan dan motivasi yang tinggi untuk mengembangkan organisasi koperasi, tetap saja ia menghadapi hambatan yang besar yang harus dilewatinya.

Birokrat adalah wakip pemerintah yang ikut aktif dalam pemberdayaan koperasi. Pada awalnya pemerintah memanfaatkan koperasi sebagai alat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Pemerintah Daerah Kab. Wonogiri dengan konsep *top down* menjadi pionir pendirian koperasi-koperasi setingkat RT di pedesaan

yang diberi nama Koperasi Rukun Tetangga (Koperasi RT). Koperasi tersebut didirikan, dibantu pendanaannya, diawasi dan dikendalikan, serta dibuatkan sistem kelembagaannya oleh pemerintah daerah. Jadi, rencana, kebijakan, dan strategi-strategi ditetapkan oleh kalangan atas (para birokrat), dan kemudian dilaksanakan melalui sistem hierarki aturan, peraturan dan perintah. Tindakan kewirausahaan terdiri dari pengidentifikasian dan penentuan serangkaian tindakan yang benar yang harus diikuti oleh orang lain.

Pada tahap lanjutan, birokrat menjadi pihak yang secara tidak langsung berhubungan dengan pengembangan koperasi RT, karena koperasi diharapkan sudah menjadi koperasi mandiri. Beberapa kegiatan memang diharapkan dapat memacu perkembangan koperasi, seperti bantuan pendidikan dan pelatihan, permodalan, pemasaran, teknologi tepat guna, dan lain-lain. Tetapi dalam pelaksanaannya, ia terbelenggu oleh aturan-aturan yang telah ditetapkan dan setiap turut campur birokrat tersebut dalam organisasi koperasi belum tentu sesuai dengan keinginan anggota koperasi. Dengan demikian, kendatipun mempunyai kemampuan dan kemauan yang tinggi dalam mengembangkan koperasi, tetap saja kewirakoperasiannya terbatas.

Katalis disini diartikan sebagai pihak yang berkompeten terhadap pengembangan koperasi kendatipun ia tidak mempunyai hubungan langsung dengan organisasi koperasi. Wirausaha katalis adalah lembaga ektern atau anggota suatu lembaga lain yang bertugas memulai proses internalisasi koperasi dan bekerja serta memperkuat koperasi lokal. Wirausaha katalis merupakan para ahli lokal yang memprakarsai, mengembangkan dan membantu organisasi koperasi (Ropke, 1992). Para katalis ini jelas mempunyai kemampuan yang tinggi dan motivasi yang tinggi kendatipun insentif yang diterimanya kadang-kadang kecil. Disamping itu ia juga mempunyai kebebasan bertindak karena ia berada diluar organisasi koperasi dan tidak terikat oleh aturan-aturan organisasi koperasi tersebut. Seorang katalis biasanya adalah seorang altruis, yaitu orang yang mementingkan

kebutuhan orang lain. Dalam konteks ini pada dasarnya seorang katalislah yang mempunyai kemampuan dalam membantu pertumbuhan gerakan koperasi, sebagai contoh : peneliti, dosen, tokoh masyarakat.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN**

#### **5.1 Simpulan**

1. Nilai indeks untuk variabel pemberdayaan kelembagaan koperasi, akses terhadap sumber-sumber pendanaan, pemberdayaan sumber daya koperasi, pemberdayaan badan produksi, yang relatif tinggi (lebih dari 7) menunjukkan bahwa pemberdayaan tersebut telah dilaksanakan di Kab. Wonogiri dan mendapat respon positif dari masyarakat. Pemerintah daerah telah menganjurkan masyarakat untuk mendirikan koperasi di masing-masing RT, mensosialisasikan aturan main, memberikan kemudahan perijinan dan pemberian badan hukum koperasi, ikut aktif dalam memberikan dana stimulan, memfasilitasi hubungan koperasi RT dengan lembaga-lembaga keuangan, ikut serta dalam pengembangan sumber daya koperasi terutama dalam memberikan pelatihan perkoperasian, aktif membantu anggota koperasi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi, serta mendorong anggota koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal.
2. Nilai indeks untuk variabel pengembangan jaringan pemasaran dan pemberdayaan teknologi dan informasi yang besarnya antara 4 - 6,99 atau tergolong sedang menunjukkan bahwa meskipun program pemberdayaan tersebut telah dilaksanakan, tapi belum sepenuhnya masyarakat di Kab. Wonogiri mengetahui, merasakan atau menikmati pemberdayaan tersebut. Masih banyak masyarakat yang menilai pemerintah daerah tidak begitu aktif membantu mempromosikan, memasarkan, mengembangkan sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi dan mengikutsertakan anggota dan koperasi dalam even pameran-pameran produk yang dihasilkan koperasi dan anggotanya. Disamping itu, Pemerintah Daerah juga belum banyak mendorong dan mengajari anggota koperasi RT dalam memanfaatkan teknologi komputer terutama pemanfaatan *perangkat lunak komputer* dan teknologi internet.

3. Secara umum, pemberdayaan yang dilakukan sudah dianggap efektif. Nilai indeks untuk variabel kinerja pemberdayaan yang tinggi (lebih dari 7) menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam berkoperasi.
4. Hasil uji beda antar kelompok variabel independen menunjukkan bahwa apabila kelembagaan koperasi diperbaiki, akses koperasi terhadap sumber pendanaan dipermudah, sumber daya koperasi dikembangkan, bidang produksi diberdayakan, jaringan pemasaran diperluas, dan pengetahuan teknologi dan informasi ditingkatkan, kinerja pemberdayaan akan lebih meningkat.
5. Hasil analisis diskriminan, dari 6 (enam) variabel independen yang diteliti ternyata hanya (tiga) variabel yang dapat dimasukkan pada persamaan diskriminan, yakni pemberdayaan kelembagaan, pemberdayaan teknologi dan informasi dan pengembangan jaringan pemasaran. Dengan demikian, efektif tidaknya suatu pemberdayaan koperasi dipengaruhi oleh sikap anggota koperasi RT dalam merespon pemberdayaan kelembagaan, pemberdayaan teknologi dan informasi, dan pengembangan jaringan pemasaran. Sementara itu, variabel-variabel yang lain seperti pemberdayaan bidang produksi, peningkatan akses terhadap sumber pendanaan dan pemberdayaan sumber daya koperasi bukanlah variabel yang mempengaruhi kinerja pemberdayaan. Pemberdayaan bidang produksi, peningkatan akses terhadap sumber pendanaan dan pemberdayaan sumber daya koperasi bukanlah variable yang membedakan pandangan dari kelompok anggota koperasi RT yang menganggap pemberdayaan efektif dan kelompok anggota koperasi yang menganggap pemberdayaan kurang efektif. Sikap mereka terhadap keenam variable tersebut relative sama.
6. Model diskriminan yang ada ternyata valid dan dapat digunakan karena tingkat ketepatannya cukup tinggi (80,77 %) dan mempunyai cross validation yang cukup tinggi pula (80,8%), sehingga model yang terbentuk benar-benar dapat digunakan dalam analisis diskriminan. Oleh karena itu berbagai pihak yang terkait dengan upaya pemberdayaan koperasi RT

dapat mengambil berbagai strategi yang relevan berdasarkan model diskriminan tersebut.

#### **4.4 Implikasi Kebijakan**

1. Terdapat 3 variabel yang sangat penting diperhatikan dalam pengembangan koperasi RT yakni pemberdayaan kelembagaan, penguatan jaringan pemasaran, dan pemberdayaan teknologi dan informasi. Ketiga variabel tersebut merupakan faktor pembeda penting yang tetap perlu diperhatikan dalam pemberdayaan koperasi RT. Dengan demikian jika sasaran awal pemberdayaan koperasi RT adalah kualitas pemberdayaan atau keefektifan pemberdayaan itu sendiri, maka pihak-pihak yang berkepentingan seperti Pemerintah Daerah beserta instansi-instansi yang terkait, Perguruan Tinggi, BUMN dan BUMS, serta lembaga-lembaga swadaya yang berminat memberdayakan koperasi RT, faktor utama yang perlu diberdayakan adalah kelembagaan, baru kemudian pengembangan jaringan pemasaran, dan teknologi informasi pada tahap berikutnya. Faktor-faktor yang lain seperti pemberdayaan di bidang produksi, pemberdayaan sumber daya, dan akses terhadap sumber pendanaan bukanlah faktor yang dianggap penting untuk diberdayakan.
2. Hasil penelitian ini juga menyarankan perlunya dibuat model komprehensif dalam pemberdayaan koperasi RT yang berfokus pada pemberdayaan kelembagaan, pembentukan jaringan pemasaran, dan penguasaan teknologi dan informasi. Ketiga variabel tersebut merupakan variabel yang sangat sensitive terhadap kinerja pemberdayaan.

#### **4.5 Keterbatasan Penelitian**

Obyek penelitian hanya terbatas pada anggota koperasi RT, padahal masih banyak pihak lain yang terkait dengan kesuksesan kinerja pemberdayaan. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah para pengurus koperasi beserta pengelolanya, birokrat (pihak-pihak yang diberi kewenangan mengembangkan koperasi, misal Dinas Koperasi) maupun katalis (pihak-pihak yang berada di luar lingkungan koperasi tapi memiliki komitmen

terhadap perkembangan koperasi, misal perguruan tinggi, LSM, BUMS, dan lain-lain). Pihak-pihak yang dimaksud perlu juga diteliti untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai keefektifan pemberdayaan koperasi RT.

Penelitian ini juga hanya terbatas pada keinginan untuk menentukan variabel-variabel mana yang dianggap efektif dalam pemberdayaan koperasi RT, dan belum mencakup dampak pemberdayaan yang telah dilakukan terhadap kinerja koperasi dan kinerja anggota koperasi. Penelitian mengenai kaitan faktor-faktor pemberdayaan seperti pemberdayaan kelembagaan, peningkatan akses terhadap sumber pendanaan, pemberdayaan sumber daya, pemberdayaan bidang produksi, pengembangan jaringan pemasaran dan pemberdayaan teknologi dan informasi dengan kinerja anggota koperasi dan kinerja koperasi RT sangat diperlukan untuk menentukan keberhasilan aktivitas pemberdayaan terhadap peningkatan kesejahteraan anggota koperasi RT.

#### **4.6 Agenda Penelitian Mendatang**

Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas, kiranya masih diperlukan penelitian lanjutan yang mengkaji faktor-faktor pemberdayaan seperti yang disebutkan di atas dengan kinerja anggota koperasi dan kinerja koperasi RT. Di samping itu, pada penelitian yang akan datang juga perlu diteliti pihak-pihak lain yang terkait dengan pemberdayaan koperasi, seperti para pengurus dan pengelola, para birokrat, dan para katalis. Penelitian-penelitian tersebut penting untuk menjawab kritik terhadap kegagalan pengembangan koperasi pola *top down* model Koperasi Unit Desa (KUD) yang tidak mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, dan sekaligus menjawab tantangan bahwa koperasi RT yang juga dikembangkan dengan model yang sama (*top down*) memiliki kemampuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

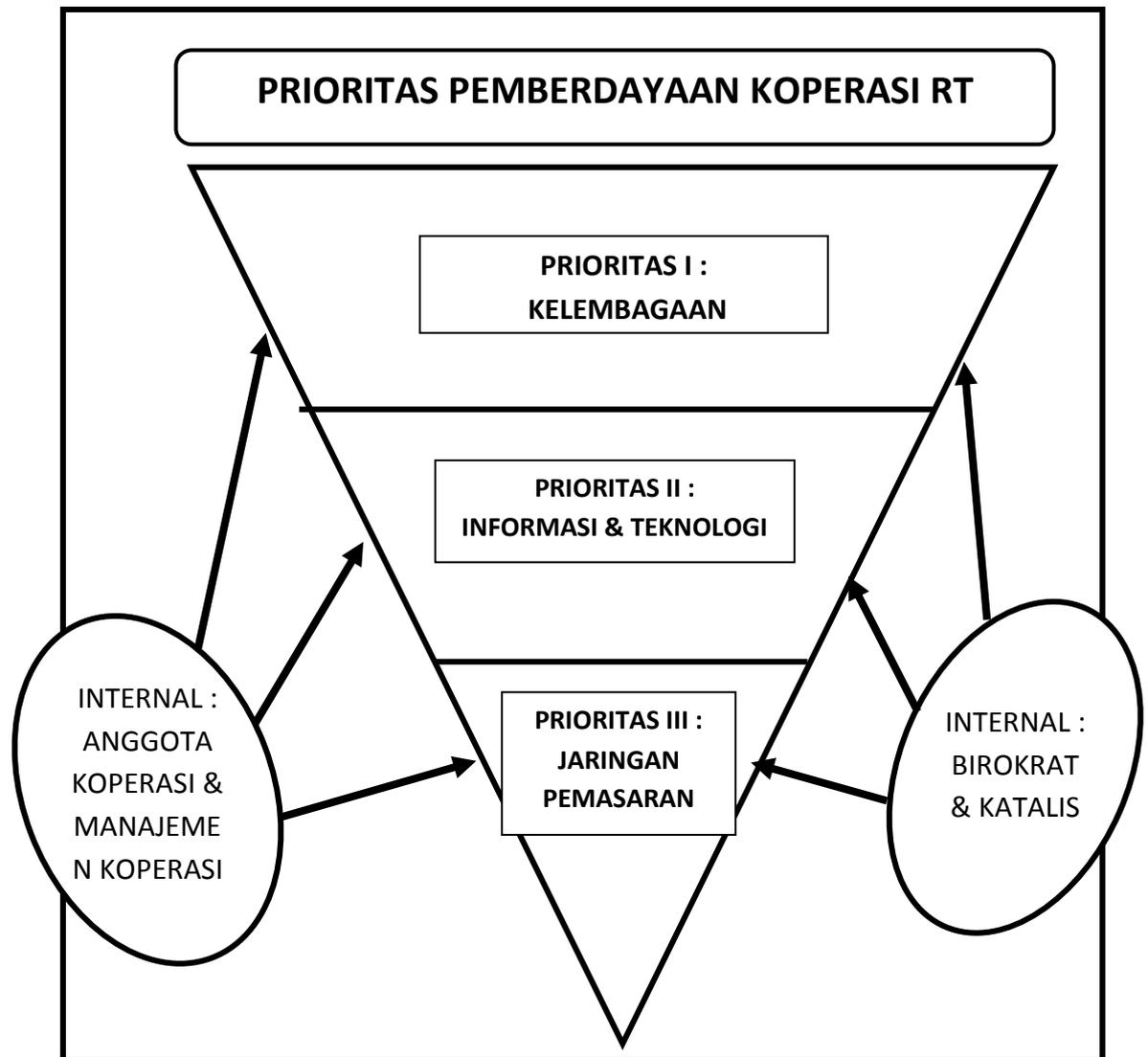
## **BAB VI**

### **LUARAN PENELITIAN**

#### **6.1 Pertimbangan**

1. Koperasi memiliki peran yang besar dalam memajukan ekonomi kerakyatan khususnya di Kabupaten Wonogiri (Pasal 33 UUD 1945). Kemajuan koperasi diharapkan dapat meningkatkan kontribusi lembaga ini terhadap PDRB, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil.
2. Peran koperasi yang masih sangat rendah dalam perekonomian Kab. Wonogiri, mengharuskan pemberdayaan koperasi dilakukan terus menerus agar benar-benar koperas menjadi sokoguru perekonomian di Kab. Wonogiri.
3. Karakteristik masyarakat Kab. Wonogiri yang sebagian besar berpendidikan rendah, berrmatapencaharian petani dan pemilik usaha kecil, berpendapatan rendah, memiliki keterampilan bercocok tanam dan produksi barang / jasa usaha kecil, menuntut peran koperasi yang lebih besar dalam mendampingi masyarakat Kab. Wonogiri dalam meningkatkan kesejahteraannya.
4. Tidak semua strategi pemberdayaan koperasi RT dapat efektif dilaksanakan di Kab. Wonogiri, maka perlu dievaluasi strategi yang tengah berlangsung untuk mengetahui mana strategi yang efektif dan mana strategi tidak efektif.

**6.2 Model Praktek Pemberdayaan Koperasi RT dan Rancangan Usulan Kebijakan (Raperda) Kab. Wonogiri Perihal Pemberdayaan Koperasi RT.**



Gambar 6.1 : Model prantek pemberdayaan koperasi RT yang diusulkan

Arti penting dari hasil penelitian ini adalah faktor yang paling menentukan kinerja pemberdayaan koperasi RT adalah pemberdayaan kelembagaan, pemberdayaan teknologi dan informasi, dan pengembangan jaringan pemasaran. Ketiga variabel tersebut harus menjadi prioritas dalam pemberdayaan koperasi RT. Prioritas pertama dalam pemberdayaan adalah

pemberdayaan kelembagaan. Pemberdayaan kelembagaan tersebut dapat dilakukan dengan cara masih tetap menganjurkan masyarakat untuk mendirikan koperasi bagi warga RT yang belum memiliki koperasi, aktif mensosialisasikan aturan main penyelenggaraan koperasi RT, mempermudah perijinan dan perolehan badan hukum, memberikan kemudahan untuk menjadi anggota koperasi RT, aktif menganjurkan anggota masyarakat untuk memanfaatkan koperasi sebagai sarana pengembangan usaha mikro miliknya, aktif membantu pengembangan usaha koperasi RT dan anggotanya, Pemerintah Daerah tetap berkomitmen dan termotivasi untuk membangkitkan peran koperasi dalam perekonomian daerah melalui pengembangan koperasi, dan ikut aktif menjembatani hubungan usaha mikro anggota koperasi dengan perusahaan-perusahaan besar.

Prioritas kedua adalah pemberdayaan teknologi dan informasi. Pemberdayaan ini diperlukan mengingat masih banyak koperasi RT yang belum memiliki komputer, SDM-nya belum familier dengan komputer dan apalagi dengan internet. Di samping itu, pemberdayaan teknologi dan informasi tersebut penting untuk menghindari keterpurukan akibat tidak mampu bersaing dalam era global. Pemberdayaan ini dapat dilakukan dengan cara penyediaan perangkat keras, penyediaan perangkat lunak, penyediaan sistem jaringan, dan optimalisasi fungsi dan sasaran penggunaan teknologi dan jaringan, mendorong dan mengajari anggota koperasi RT dalam memanfaatkan teknologi komputer terutama pemanfaatan *perangkat lunak komputer* dan teknologi internet, serta fasilitasi dan aktifkan pelatihan-pelatihan mengenai pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mempromosikan produk dan membentuk jaringan usaha online.

Prioritas yang ketiga adalah pengembangan jaringan pemasaran. Pada umumnya, usaha kecil dan menengah, terutama di pedesaan tidak memiliki jaringan pemasaran yang kuat. Mereka mampu membuat produk dalam jumlah yang cukup banyak, tapi mengalami kesulitan dalam pemasaran. Oleh karena itu, faktor yang terpenting bagi mereka adalah menemukan pasar baru yang lebih luas. Oleh karena keterbatasan sumber daya koperasi dalam pencarian pasar baru dan pembentukan jaringan pemasaran, maka pemilik

usaha kecil dan usaha mikro di pedesaan perlu dibantu oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Pemerintah Daerah beserta jajaran instansi yang terkait, BUMN dan BUMS, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, maupun perguruan tinggi.

Pemberdayaan mengenai pengembangan jaringan pemasaran koperasi RT dan anggotanya dapat dilakukan dengan cara ikut aktif dalam membantu mempromosikan dan memasarkan hasil produksi koperasi RT dan anggotanya, aktif dalam mengembangkan sarana pemasaran hasil produksi koperasi (misal gedung pameran, perbaikan pasar, tempat berjualan, dll), aktif mengikutsertakan anggota koperasi RT dalam pameran-pameran produk yang dihasilkan koperasi dan anggotanya, aktif mendorong anggota koperasi untuk menjadikan koperasi sebagai jaringan pemasaran bagi produk-produknya, dan aktif membantu pembentukan jaringan usaha guna memudahkan penjualan produk-produk koperasi dan anggotanya.

Pemberdayaan bidang produksi, peningkatan akses terhadap sumber pandanaan koperasi dan pemberdayaan sumber daya bukan berarti tidak penting dalam pemberdayaan koperasi RT, tetapi pemberdayaan ini bukan merupakan prioritas yang harus diutamakan.

Keberhasilan pemberdayaan ini sangat tergantung pada integrasi dari berbagai pihak. Dari pihak internal, yakni anggota dan pihak manajemen harus ikut terlibat dan berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan ini. Demikian pula dari pihak eksternal, dukungan dan motivasi kuat dari para birokrat dan katalis diperlukan agar benar-benar pemberdayaan ini efektif. Keberhasilan pemberdayaan ini juga mensyaratkan perlunya peningkatan kompetensi dan motivasi dari para anggota, pihak manajemen, para birokrat dan para katalis, di samping tentu saja pemberian kebebasan bertindak yang tidak melanggar aturan atau hukum, seperti kemudahan perijinan dan kemudahan memperoleh sttus badan hukum.

## DAFTAR REFERENSI

- Bappenas, BPS dan UNDP. 2001. **Indonesia Human Development Report 2001 Towards a New Consensus : Democracy and Human Development in Indonesia**. www. Undp.or.id.
- Ferdinand, Agusty. 2000. **Manajemen Pemasaran Sebuah Pendekatan Strategik**. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- \_\_\_\_\_. 2006. **Metoda Penelitian Manajemen**. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Friedmann, J. 1992. **Empowerment: the politics of alternative development**. California: Blackwell.
- Hadar, I.A. 2006. **Hak Atas Tanah**. Kompas 15 Desember 2006.
- Hanel, Alfred. 1988. **Organisasi Koperasi**. Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Hendar dan Kusnadi. 2005. **Ekonomi Koperasi**. Edisi Dua. Lembaga Penerbit UI. Jakarta.
- Hendar. 2010. **Manajemen Perusahaan Koperasi**. Edisi I. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- ICA News, No. 5/6, 1996. **Co-operative Information, Statement on the Co-operative Identity**.
- Ife, K. 1995. **Comunnity Development : Creating Community Alternatives-Vision, Analisis And Practice**. Malbourne. Longman;
- Imam Ghazali. 2004. **Model Persamaan Struktural, Konsep dan Aplikasi dengan Program AMOS Ver. 5.0**. Badan Penerbit Universitas Diponogoro. Semarang.
- Krisnamurthi, B. 1998. **Perekembangan Kelembagaan dan Perilaku Usaha Koperasi Unit Desa di Jawa Barat (Desertasi)**. Bogor. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Kenny, S. 1999. **Developing Communities for the future : Community Development in Australia**. 2<sup>nd</sup> ed. Melbourne : Nelson ITP.
- Li Zhao, Caroline Gijssels, (2011). **Multi-stakeholder co-operatives in China: a resource mix structure approach**. Social Enterprise Journal, Vol. 7 Iss: 3, pp.259 - 279

- Muenkner, Hans. 1989. **Pengantar Hukum Koperasi, Dengan Acuan Khusus Mengenai Perundang-undangan Koperasi di Indonesia.** Bandung. Universitas Padjadjaran.
- P Nganwa, M Lyne & S Ferrer. 2010. **What will South Africa's new Cooperatives Act do for small producers? An analysis of three case studies in Kwa Zulu-Natal.** *Agrekon*. Volume 49, Issue 1, pages 39-55
- Pranarka, AMW dan Vidhyandika, Moeljarto. 1996. **Pemberdayaan Empowerment). Di Dalam: Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi".** CSIS. Jakarta.
- Plummer, J. 2000. **Municipalities and community participation : a sourcebook for capacity development.** London : Farthcan.
- Rahmat Imam Santosa. 2006. **Penguatan Kelembagaan Koperasi Rukun Tetangga untuk Meningkatkan Keberdayaan Anggota.** Tesis. IPB Bogor.
- Roopke, Jochen. 1987. **The Economic Theory of Cooperative Enterprise in Developing Countries, With Special Reference of Indonesia.** Marburg, German.
- Ropke, Jochen. 1992. **Rebuilding Cooperatives for A New Country (on The Future of Indonesian Cooperative).** *Jurnal Koperasi Indonesia* Tahun VII – No. 1 – 1992. Jatinangor – Bandung. IKOPIN.
- Ropke, Jochen. 1992. **Strategik Management of Self-Help Organization.** Marburg – German.
- Ropke, Jochen. 1992. **Cooperative Entreprenship.** Marburg – German.
- \_\_\_\_\_, UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia
- Setiana Lubis. 2005. **Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat.** Ghalia Indonesia. Bogor.
- Suharto, E. 2005. **Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosisl dan Pekerjaan Sosial.** Refina Aditama. Bandung.
- Yusof Ismail and Suhaimi Mhd Sarif (2010). **Convergence of global and traditional managers' characteristics: a case of senior management of cooperatives in Malaysia.** *Journal for International Business and Entrepreneurship Development*. Volume 5, Number 1, pp 28 – 47

- Tylor, M. 2003. **Public Policy in the Community**. New York : Palgrave Macmillan.
- Tim Crescent. 2003. **Menuju Masyarakat Mandiri : Pengembangan Model Sistem Keterjaminan Sosial**. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Tim Koordinasi Nasional PPK. 2002. **Pedoman Umum Program Pengembangan Kecamatan**. Fase II. Jakarta.
- Wignyo Adiyoso. 2009. **Menggugat Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat**. Putra Media Nusantara. Surabaya.

***Outcome Hasil Penelitian***  
***Draf Buku Ajar***  
***Manajemen Koperasi***